



PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

LAPORAN

**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BINJAI (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2023**



KOTA BINJAI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim,

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kelima RPJMD Tahun 2021-2026

Dengan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pemilihan langsung Kepala Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran 2023, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Binjai, Maret 2024

WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, MAP



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	xi
Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Binjai.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan Pemerintahan Daerah Kota Binjai.....	I-3
1.2.1 Sejarah Kota Binjai.....	I-3
1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Binjai.....	I-5
1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-5
1.3.1 Visi.....	I-5
1.3.2 Misi.....	I-6
1.4 Data Umum Daerah Kota Binjai.....	I-8
1.4.1 Data Geografis Wilayah.....	I-8
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	I-8
B. Letak dan Kondisi Geografis.....	I-9
C. Klimatologi.....	I-10
D. Topografi dan Kemiringan Lereng.....	I-11
E. Geologi.....	I-12
F. Hidrologi	I-12
1.4.2 Jumlah Penduduk.....	I-13
1.4.3 Pertumbuhan Penduduk.....	I-16
1.4.4 Jumlah PNS.....	I-16
1.4.5 Keuangan Daerah.....	I-17
A. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I-17
B. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I-19



C. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I-20
---	------

**BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.....**

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II-1
2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	II-3
2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-6

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
3.1.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Binjai.....	III-1
A. Indeks Pembangunan Manusia.....	III-1
B. Persentase Penduduk Miskin.....	III-2
C. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-5
D. Inflasi.....	III-6
E. Pertumbuhan Ekonomi.....	III-8
F. Indeks Gini.....	III-9
G. Indeks Reformasi Birokrasi.....	III-10
H. Opini BPK.....	III-11
I. Indeks Profesionalitas ASN.....	III-12
J. Persentase Kondisi Jalan Baik.....	III-13
K. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-14
L. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB).....	III-15
M. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB).....	III-16
N. Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB).....	III-18
O. Indeks Pendidikan.....	III-21
P. Indeks Kesehatan.....	III-22
Q. Indeks Pengeluaran.....	III-23
3.1.2 Hasil Yang Dicapai Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	III-23
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	III-21



2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.....	III-31
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-46
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-51
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	III-52
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.....	III-60
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	III-66
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-71
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	III-76
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.....	III-77
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	III-79
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-81
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-86
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-86
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	III-91
10. Urusan Pemerinatahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	III-93
11. Urusan Pemerinatahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-93
12. Urusan Pemerinatahan Penanaman Modal.....	III-97
13. Urusan Pemerinatahan Kepemudaan dan Olah Raga.....	III-98
14. Urusan Pemerinatahan Bidang Statistik.....	III-101
15. Urusan Pemerinatahan Bidang Persandian.....	III-101
16. Urusan Pemerinatahan Bidang Kebudayaan.....	III-102
17. Urusan Pemerinatahan Bidang Perpustakaan.....	III-105
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....	III-108
C. Urusan Pemerintahan Pilihan	



1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	III-109
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	III-110
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	III-113
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	III-114
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	III-116
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
1. Sekretariat Daerah.....	III-118
2. Sekretariat DPRD.....	III-119
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	III-119
2. Keuangan.....	III-120
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	III-122
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	III-124
G. Unsur Kewilayahan.....	III-125
H. Unsur Pemerintahan Umum.....	III-125
3.1.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	III-126
3.1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III-126

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	IV-1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya.....	IV-1
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.....	IV-2
BAB IV PENUTUP.....	V-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Luas Wilayah Kota Binjai (Km²).....	I-8
Gambar I.2	Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai.....	I-10
Gambar I.3	Peta Curah Hujan Kota Binjai.....	I-11
Gambar I.4	Peta Geologi Kota Binjai.....	I-12
Gambar I.5	Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai.....	I-13
Gambar I.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai.....	I-13
Gambar I.7	Komposisi Penduduk Kota Binjai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	I-15
Gambar I.8	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai Tahun 2016-2023.....	I-16
Gambar III.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai	III-2
Gambar III.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Binjai.....	III-4
Gambar III.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai Tahun 2018-2023.....	III-5
Gambar III.4	Pencapaian Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai.....	III-6
Gambar III.5	Perkembangan Inflasi Kota Binjai.....	III-7
Gambar III.6	Pencapaian Target dan Realisasi Inflasi di Kota Binjai.....	III-8
Gambar III.7	Pencapaian Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	III-9
Gambar III.8	Perbandingan Gini Ratio Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara	III-9
Gambar III.9	Pencapaian Target dan Realisasi Gini Ratio Kota Binjai.....	III-10
Gambar III.10	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai.....	III-11
Gambar III.11	Perkembangan Indeks Profesional ASN Kota Binjai (Poin).....	III-13
Gambar III.12	Perkembangan Kondisi Jalan Mantap di Kota Binjai (Poin).....	III-14
Gambar III.13	Perkembangan Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kota Binjai..	III-14
Gambar III.14	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Binjai.....	III-14
Gambar III.15	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Industri.....	III-15



Gambar III.16	Capaian Target dan Realisasi Kontribusi Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).....	III-16
Gambar III.17	Capaian Target dan Realisasi Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (ADHB).....	III-17
Gambar III.18	Capaian Target dan Realisasi Indeks Pendidikan Kota Binjai.....	III-22
Gambar III.19	Capaian Target dan Realisasi Indeks Kesehatan Kota Binjai.....	III-22
Gambar III.20	Capaian Target dan Realisasi Indeks Pengeluaran Kota Binjai.....	III-23
Gambar III.21	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai.....	III-24
Gambar III.22	Capaian Target dan Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai.....	III-25
Gambar III.23	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Binjai.....	III-25
Gambar III.24	Capaian Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kota Binjai.....	III-26
Gambar III.25	Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Binjai Tahun 2023.....	III-26
Gambar III.26	Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Binjai Tahun 2023.....	III-27
Gambar III.27	Perkembangan Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Binjai.....	III-28
Gambar III.28	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Binjai.....	III-31
Gambar III.29	Capaian Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Binjai.....	III-32
Gambar III.30	Capaian Target dan Realisasi Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan di Kota Binjai.....	III-35
Gambar III.31	Capaian Target dan Realisasi Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan di Kota Binjai.....	III-35
Gambar III.32	Capaian Target dan Realisasi Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Binjai.....	III-36
Gambar III.33	Capaian Target dan Realisasi Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kota Binjai.....	III-37
Gambar III.34	Cakupan Target dan Realisasi Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Binjai.....	III-38
Gambar III.35	Cakupan Target dan Realisasi Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di	



Kota Binjai.....	III-39
Gambar III.36 Capaian Target dan Realisasi Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kota Binjai.....	III-40
Gambar III.37 Capaian Target dan Realisasi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Binjai.....	III-41
Gambar III.38 Capaian Target dan Realisasi Persentase penderita DM Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Binjai	III-41
Gambar III.39 Capaian Target dan Realisasi Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kota Binjai.....	III-42
Gambar III.40 Capaian Target dan Realisasi Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kota Binjai.....	III-43
Gambar III.41 Capaian Target dan Realisasi Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kota Binjai	III-44
Gambar III.42 Persentase Penduduk Kota Binjai Berakses Air Minum Tahun 2023.....	III-47
Gambar III.43 Capaian Target dan Realisasi Persentase Penduduk Kota Binjai Berakses Air Minum Tahun 2023.....	III-47
Gambar III.44 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kota Binjai (Km).	III-48
Gambar III.45 Kondisi Jalan di Kota Binjai Tahun 2023 (Km).....	III-48
Gambar III.46 Capaian Target dan Realisasi Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Binjai (Km).....	III-49
Gambar III.47 Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota Binjai.....	III-50
Gambar III.48 Capaian Target dan Realisasi Persentase Penegakan Perda di Kota Binjai.....	III-54
Gambar III.49 Capaian Target dan Realisasi Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) di Kota Binjai.....	III-67
Gambar III.50 Perkembangan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	



	(Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja di Kota Binjai.....	III-67
Gambar III.51	Jumlah Tenaga Kerja Kota Binjai Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2023 (orang).....	III-68
Gambar III.52	Capaian Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Kota Binjai Bersertifikat Kompetensi (orang).....	III-68
Gambar III.53	Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di Kota Binjai.....	III-69
Gambar III.54	Perkembangan Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Binjai.....	III-69
Gambar III.55	Capaian Target dan Realisasi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak di Kota Binjai.....	III-70
Gambar III.56	Capaian Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai (Poin).....	III-72
Gambar III.57	Capaian Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Binjai (Poin).....	III-73
Gambar III.58	Capaian Target dan Realisasi Indeks Kota Layak Anak Kota Binjai (poin).....	III-73
Gambar III.59	Perkembangan Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait di Kota Binjai.....	III-74
Gambar III.60	Perkembangan Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah di Kota Binjai...	III-78
Gambar III.61	Kondisi Status Pemilikan Tanah menurut Jenis Hak di Kota Binjai.....	III-78
Gambar III.62	Capaian Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Binjai.....	III-80
Gambar III.63	Capaian Target dan Realisasi Persentase Sampah yang Tertangani di Kota Binjai.....	III-81
Gambar III.64	Capaian Target dan Realisasi Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Binjai.....	III-83
Gambar III.65	Capaian Target dan Realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Binjai.....	III-84
Gambar III.66	Capaian Target dan Realisasi Total Fertility Rate (TFR) Kota Binjai.....	III-87



Gambar III.67	Capaian Target dan Realisasi Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MCPR) Kota Binjai.....	III-88
Gambar III.68	Capaian Target dan Realisasi Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet need) di Kota Binjai.....	III-89
Gambar III.69	Capaian Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) di Kota Binjai (Poin).....	III-89
Gambar III.70	Capaian Target dan Realisasi Persentase Koperasi yang Berkualitas di Kota Binjai.....	III-95
Gambar III.71	Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha di Kota Binjai.....	III-95
Gambar III.72	Perkembangan Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha di Kota Binjai.....	III-96
Gambar III.73	Perkembangan Nilai Investasi Kota Binjai (Rp).....	III- 97
Gambar III.74	PerkembanganTingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.....	III-99
Gambar III.75	Perkembangan Perolehan Mendali Kota Binjai Pada Event Olah Raga Nasional dan Internasional.....	III-100
GambarIII.76	Perkembangan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Binjai (Poin).....	III-106
Gambar III.77	Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai (Poin).....	III-107
Gambar III.78	Capaian Target dan Realisasi Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Binjai.....	III-110
Gambar III. 79	Perkembangan Persentase Kinerja Realisasi Pupuk di Kota Binjai.	III-115
Gambar III.80	Perkembangan Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapnnya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku di Kota Binjai.....	III-116
Gambar III.81	Perkembangan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Binjai.....	III-117
Gambar III.82	Perkembangan Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Binjai.....	III-117
Gambar III.83	Capaian Target dan Realisasi Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kota Binjai.....	III-123



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Binjai.....	I-8
Tabel I.1	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Binjai.....	I-9
Tabel I.2	Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Binjai Tahun 2023....	I-10
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2023..	I-14
Tabel I.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2023.....	I-14
Tabel I.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023.....	I-15
Tabel I.6	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023..	I-19
Tabel I.7	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023.....	I-20
Tabel I.8	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	I-21
Tabel I.9	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2023.....	I-21
Tabel II.1	Ringkasan Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2023.....	II-2
Tabel II.2	Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun 2023.....	II-5
Tabel II.3	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.....	II-7
Tabel III.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai Tahun 2020-2023.....	III-3
Tabel III.2	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai Tahun 2020-2023.....	III-6
Tabel III.3	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju pertumbuhan Lapangan Usaha Industri.....	III-15
Tabel III.4	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	III-17
Tabel III.5	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi.....	III-19



Tabel III.6	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan.....	III-19
Tabel III.7	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan.....	III-20
Tabel III.8	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	III-21
Tabel III.9	Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya.....	III-21
Tabel III.10	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-29
Tabel III. 11	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Binjai.....	III-33
Tabel III.12	Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi tahun 2023	III-34
Tabel III.13	Pencapaian Standar Minimal Bidang Kesehatan.....	III-45
Tabel III.14	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.....	III-50
Tabel III.15	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan yang Terjadi di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-53
Tabel III.16	Perda/Perkada yang Ditegakan dan Memuat Sanksi.....	III-54
Tabel III.17	Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-55
Tabel III.18	Kejadian Bencana Kota Binjai Tahun 2023.....	III-57
Tabel III.19	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-61
Tabel III.20	Banyaknya Panti Asuhan dan Penghuninya di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-62
Tabel III.21	Jumlah Penerima Bantuan dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-63
Tabel III.22	Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial (Dinas Sosial Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-63
Tabel III.23	Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-71
Tabel III.24	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan	



	dan Perlindungan Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-74
Tabel III.25	Produksi Padi Di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-77
Tabel III.26	Perekaman KTP Elektronik di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-82
Tabel III.27	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-83
Tabel III.28	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Binjai Tahun 2023.....	III-84
Tabel III.29	Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-85
Tabel III.30	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-90
Tabel III.31	Kinerja Lalu Lintas Kota Binjai Tahun 2023.....	III-92
Tabel III.32	Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-96
Tabel III.33	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-100
Tabel III.34	Benda Cagar Budaya di Kota Binjai.....	III-103
Tabel III.35	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan (Dinas Pariwisata Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-104
Tabel III.36	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan (Dinas Perpustakaan Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-107
Tabel III.37	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan (Dinas Perpustakaan Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-108
Tabel III. 38	Total Produksi Ikan dan Produksi Benih Kota Binjai Tahun 2023....	III-110
Tabel III.39	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata (Dinas Pariwisata Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-111
Tabel III.40	Luas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kota Binjai,2022 dan 2023.....	III-113
Tabel III.41	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	



Tahun 2023.....	III-118
Tabel III.42 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-121
Tabel III.43 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-124
Tabel III.44 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Kota Binjai) Tahun 2023.....	III-125
 LAMPIRAN I.....	 1
LAMPIRAN II.....	78
LAMPIRAN III.....	82



PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Binjai menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2023 yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Binjai untuk dilakukan pembahasan terkait capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Hasil pembahasan LKPJ tersebut diharapkan dapat memerikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya.

Ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Binjai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;



15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.2 Dasar Hukum Pembentukan Pemerintahan Daerah Kota Binjai

1.2.1 Sejarah Kota Binjai

Menurut riwayat, Binjai pada awalnya hanyalah sebuah kampung kecil (kuta) yang diperkirakan telah ada sejak akhir abad 17. Lokasinya terletak di hilir Sungai Bingai, tidak lain anak Sungai Wampu Kabupaten Langkat, atau tidak jauh dari muara Sungai Bangkatan, dan Sungai Mencirim. Asal kata “Binjai” sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Setidaknya dua versi utama. Pertama, kata “binjai” berasal dari nama tanaman, yakni “pohon binjai,” sejenis pohon mangga atau embacang, yang diduga pernah tumbuh di kampung atau kuta di tepi Sungai Bingei, atau lokasi Pasar Tavip Binjai sekarang. Kedua, kata “binjai” diambil dari kata serapan bahasa Batak Karo, yakni “binjei,” yang berarti “singgah.” Ini cukup relevan, mengingat penduduk asli Binjai awalnya memang masyarakat Batak Karo. Apalagi posisi Binjai saat itu sangat strategis dalam mendukung aktifitas perdagangan di kawasan hulu.

Kemudian melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Binjai kemudian dipersiapkan menjadi salah satu pusat administrasi otonom penting. Dalam struktur pemerintahannya, telah terbentuk beberapa dinas yang berfungsi menyelenggarakan sistem administrasi. Sedangkan system penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh sebuah Dewan Pemerintah Kota Kecil, dipimpin Ketua Wali-Kota Kepala Daerah Kota Kecil. Sejak itu, wilayah Binjai diperluas hingga 17,09 kilometer persegi. Wilayahnya merupakan penggabungan wilayah bekas Gemeente Binjai, sebagian wilayah Kabupaten Langkat, dan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Pada 1957, Binjai kembali mengalami perubahan status pemerintahan. Di masa itu, status Binjai berganti menjadi Daerah Swatantra Tingkat II, dengan penyelenggara pemerintahan dipegang seorang Kepala Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan di daerah oleh pemerintah pusat. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Binjai secara resmi berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II, atau setara dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II. Saat itu, penyelenggara pemerintahan dipercayakan kepada dilaksanakan Walikotamadya Daerah Tingkat II.



Setelah mempertimbangkan perkembangan segala urusan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1981, Binjai dibagi dalam 3 kecamatan, dan 19 kelurahan. Masing-masing kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, dan kecamatan Binjai Selatan. Meskipun sering mengalami perubahan status pemerintahan, namun faktanya Binjai tetap menjadi ibukota Kabupaten Langkat sebelum akhirnya dipindahkan ke Kota Stabat pada 1982. Keputusan itu sendiri ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. Selang 4 tahun kemudian, Binjai mengukir kembali sejarahnya. Sebab mulai tahun 1986, wilayah Binjai diperluas hingga 5 kali lipat dari sebelumnya, yakni menjadi 90,23 kilometer persegi, atau luas yang sama dengan saat ini.

Penambahan luas wilayah Binjai saat itu didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten daerah Tingkat II Deli Serdang. Selain itu, turut pula dilakukan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan membentuk 5 wilayah kecamatan, dengan 18 kelurahan dan 12 desa. Masing-masing, Kecamatan Binjai Kota dengan 6 kelurahan dan 1 desa, Kecamatan Binjai Barat dengan 2 kelurahan dan 2 desa, Kecamatan Binjai Utara dengan 5 kelurahan dan 2 desa, Kecamatan Binjai Timur dengan 2 kelurahan dan 3 desa, serta Kecamatan Binjai Selatan dengan 3 kelurahan dan 4 desa.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993, tentang Pembentukan 6 desa persiapan dan 1 kelurahan persiapan di Kota Binjai, maka dilakukan pemecahan wilayah desa dan kelurahan. Saat itu jumlah desa di Kota Binjai menjadi 17 dan 20 kelurahan. Dari situ, 17 desa di Kota Binjai kemudian diubah statusnya menjadi kelurahan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146/2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996. Keputusan ini pula, yang menandai keberadaan 37 kelurahan di Kota Binjai hingga saat ini.

Sejak dibentuk menjadi wilayah otonom di tahun 1956 hingga saat ini, tercatat ada 11 walikota yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan di Binjai. Antara lain, SS Paruhuman (1956-1960), Abdullah Rayani (1960-1966), Azhari Pulungan (1966-1968), A Manan (1968-1973), M Sebayang (1973-1979), HA Soepomo (1979-1984), Syarifuddin (1984-1989), Rj Hadi Siswoyo Alhaj (1989-1994), Abadi Barus (1995-1999), HM Ali Umri (2000-2005,



dan 2005-2010), dan HM Idaham (2010-2015, dan 2016-2021), serta Amir Hamzah (2021-sekarang).

1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Binjai

Peraturan perundangan sebagai dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993, tentang Pembentukan 6 desa persiapan dan 1 kelurahan persiapan di Kota Binjai,
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996 tentang 17 desa menjadi kelurahan.

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi wali kota dan wakil wali kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Binjai. Pernyataan Visi Kota Binjai periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Binjai sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi.

1.3.1 Visi

Adapun pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2021 – 2026 adalah

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”.

Adapun maksud dari visi tersebut adalah:

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan



kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

- a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.



- b. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
- d. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on the right place).

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- d. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
- e. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
- f. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
- g. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.



Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

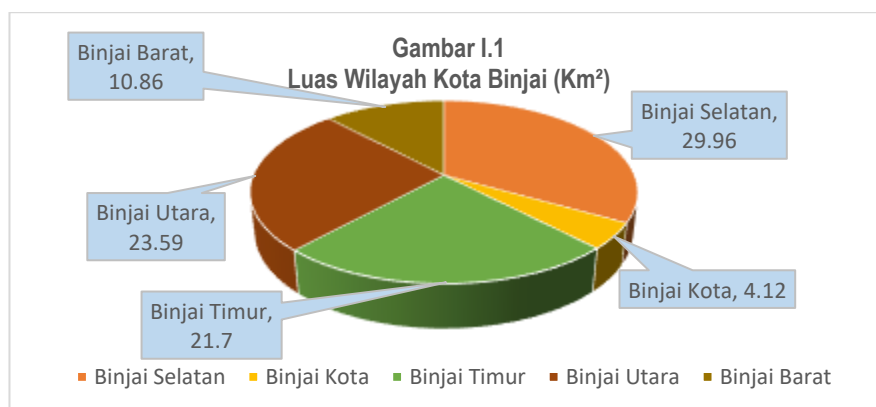
- Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan.
- Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4 Data Umum Daerah Kota Binjai

1.4.1 Data Geografis Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Binjai $\pm 90,23 \text{ Km}^2$, dengan luas kecamatan yang paling luas terdapat pada kecamatan Binjai Selatan dengan luas $29,96 \text{ Km}^2$, sedang wilayah yang paling kecil terdapat pada kecamatan Binjai Kota dengan luas wilayah sebesar $4,12 \text{ Km}^2$.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km² dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan sebanyak 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

Binjai sebagai kota yang terdekat dengan ibukota Sumatera Utara, diapit oleh dua kabupaten besar yaitu Langkat dan Deli Serdang. Binjai - Medan dapat ditempuh dengan jarak 22 Km. Wilayah Binjai luasnya 90,23 Km² atau hanya sebesar 0,13 persen dari total luas Sumatera Utara. Kota Binjai terdiri dari 37 kelurahan dan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat.

Tabel I.1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Binjai

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah Lingkungan
1	Binjai Selatan	8	61
2	Binjai Kota	7	51
3	Binjai Timur	7	65
4	Binjai Utara	9	64
5	Binjai Barat	6	43
Kota Binjai		37	284

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

B. Letak dan Kondisi Geografis

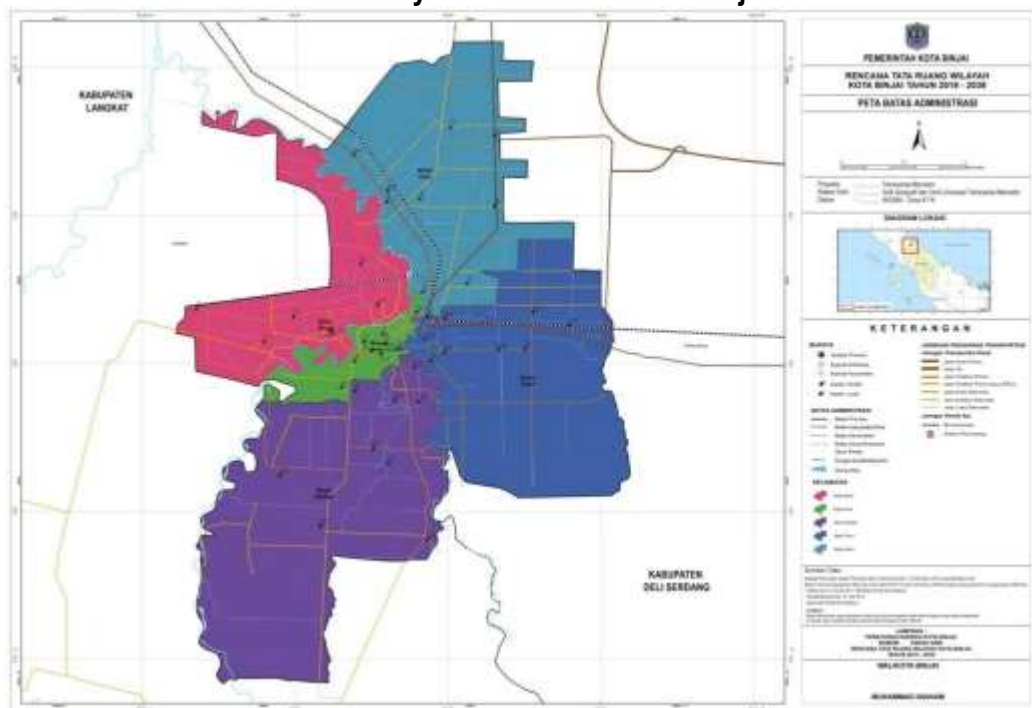
Secara umum Kota Binjai terletak pada 3°31'40" - 3°40'2" LU dan 98°27'3" - 98°32'32" BT. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kota Binjai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang)



2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Kutalimbaru (Kabupaten Deli Serdang)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai (Kabupaten Langkat)

Gambar I.2
Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai



Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

C. Klimatologi

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

Tabel I.2

Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Binjai Tahun 2023

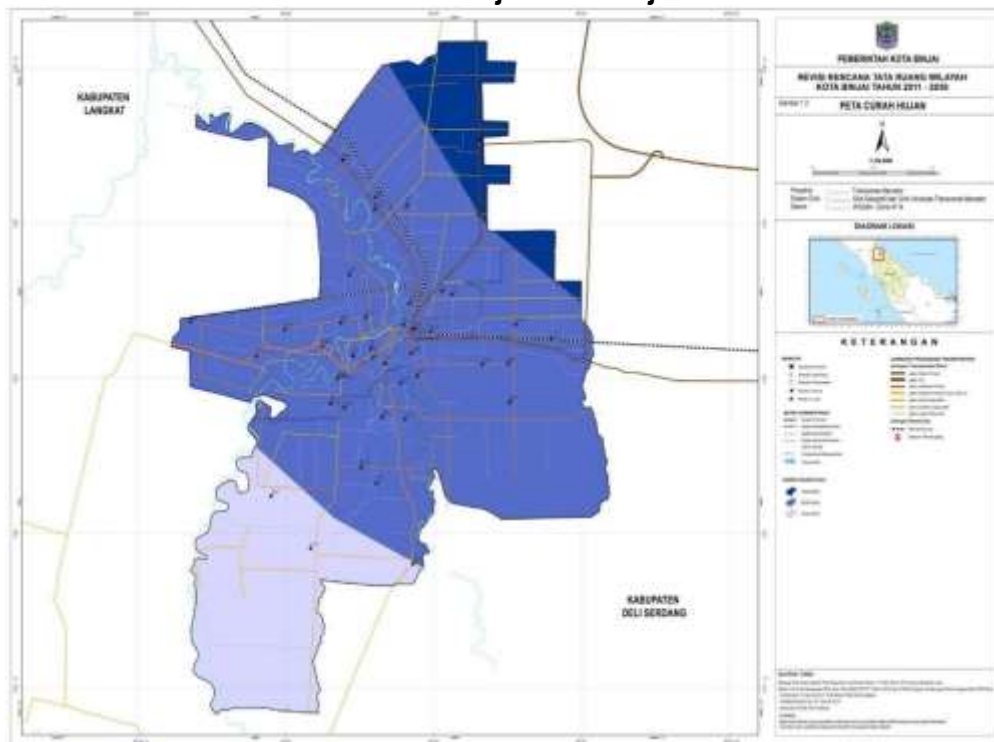
No	Kecamatan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Binjai Selatan	283.5	15.67
2	Binjai Kota	-	-
3	Binjai Timur	178.5	14.25
4	Binjai Utara	185.42	11.92
5	Binjai Barat	220.67	14.00

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 283,5 mm³ dengan rata-rata hari hujan selama 15,67 hari dan Kecamatan Binjai Barat sebesar 220,67 mm³ dengan rata-rata hari hujan selama 14 hari.

Gambar I.3
Peta Curah Hujan Kota Binjai



Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

D. Topografi dan Kemiringan Lereng

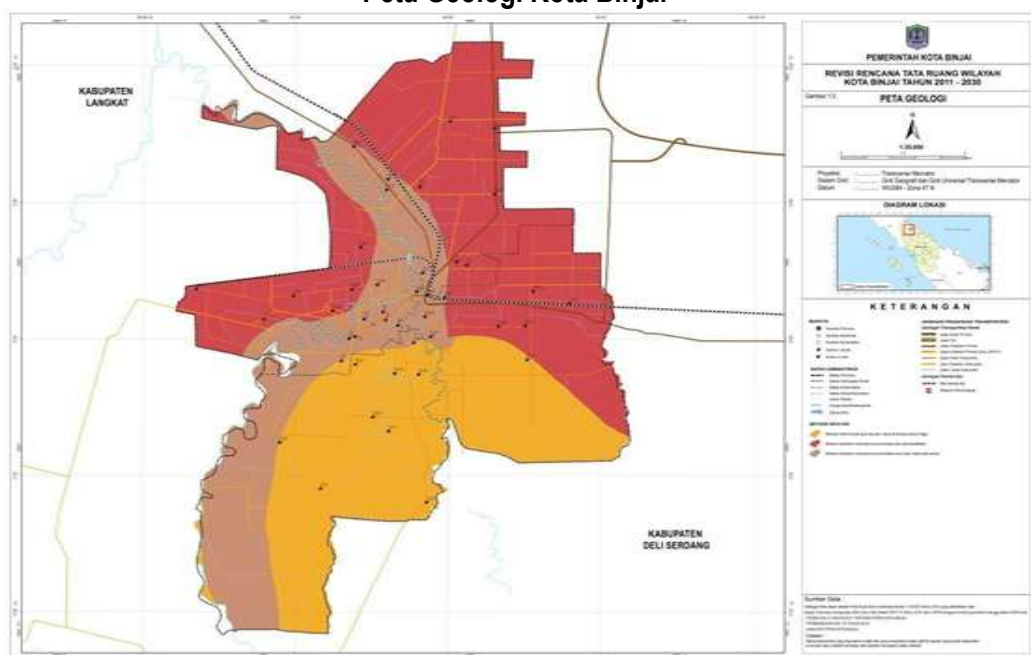
Karakteristik fisik dasar Kota Binjai pada umumnya berada pada topografi yang datar yang memanjang dari bagian utara Kota Binjai sampai bagian wilayah selatan Kota Binjai dengan bentang alam yang tidak berbukit, hanya sebagian kecil saja daerah wilayah Kota Binjai yang memiliki bentang alam yang berbukit yaitu di wilayah bagian selatan. Sehingga secara umum kawasan Kota Binjai merupakan wilayah dengan kemiringan yang relatif landai dengan tingkat kelerengan 0,8% atau datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Secara keseluruhan lahan yang ada di wilayah perencanaan termasuk dalam kategori tingkat kemudahan pemanfaatan tinggi. Kota Binjai secara keseluruhan berada di ketinggian berkisar antara 3 sampai 76,5 mdpl. Sehingga secara umum daerah Kota Binjai adalah kawasan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 28 mdpl.



E. Geologi

Secara geologis, Wilayah Kota Binjai memiliki struktur dan satuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik. Kondisi geologi di Kota Binjai terdiri dari batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi, batuan sedimen mempunyai porositas dan permeabilitas, dan batuan sedimen mempunyai porositas kecil atau tidak ada sama. Kondisi geologi di Kota Binjai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar I.4
Peta Geologi Kota Binjai



Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

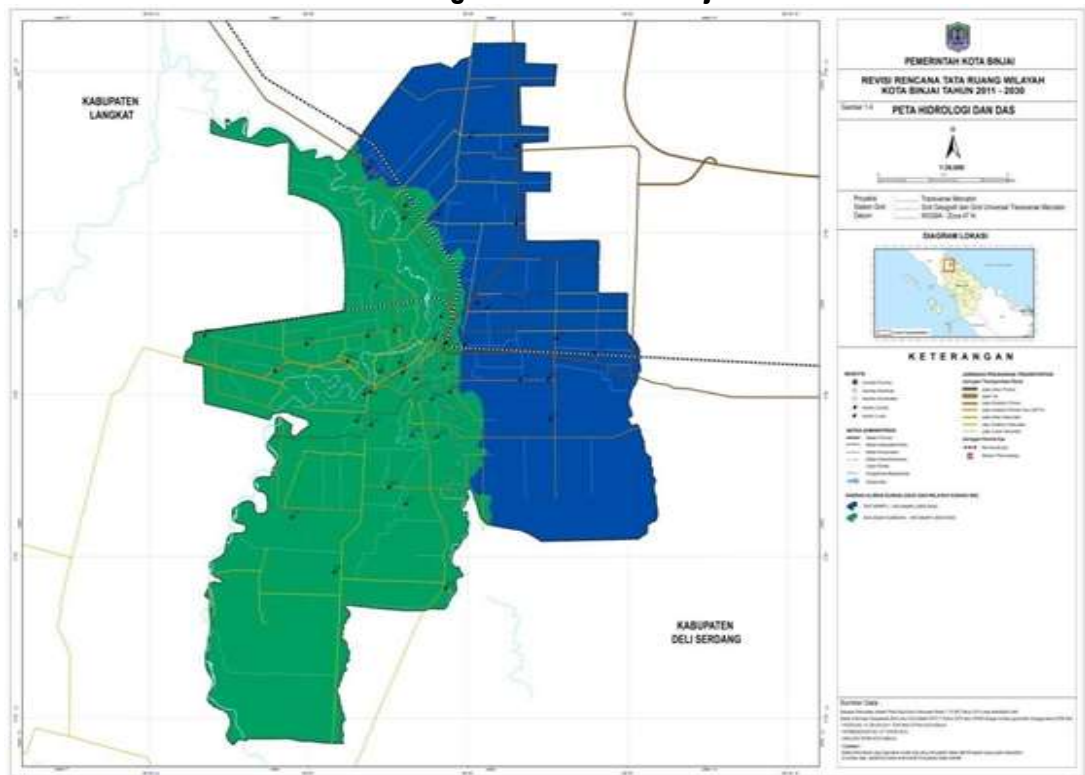
F. Hidrologi

Kota Binjai memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS wampu dan sebagian kecil wilayah daerah timur termasuk kedalam DAS belawan. Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan.

Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang keduanya bertemu di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Untuk Tahun 2021 Sungai Bingai telah dapat beroperasi sebagai sumber air minum dengan SPAM Regional Mebidang.



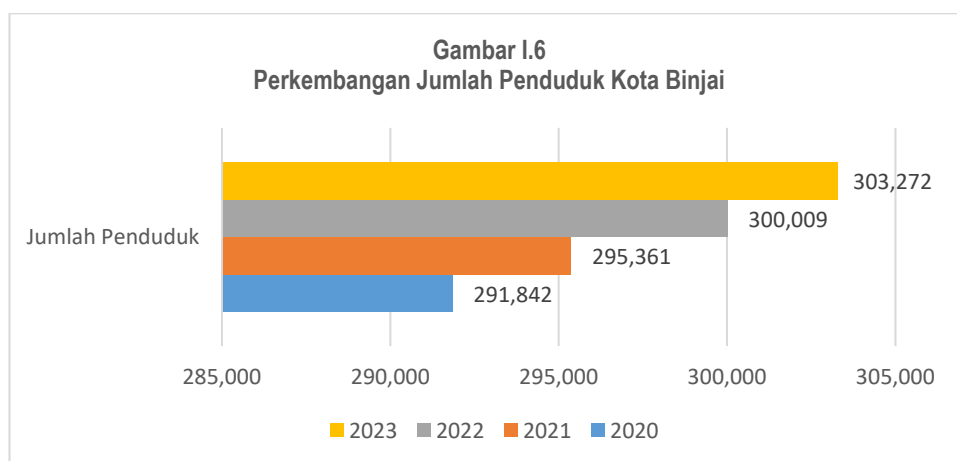
Gambar I.5
Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai



Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

1.4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai selalu mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kota Binjai berjumlah 303.272 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Binjai Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 88.364 jiwa atau 29,14 %, sedangkan kecamatan Binjai Kota memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 32.452 jiwa atau 10,70 %.

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km²
1	Binjai Selatan	60,894	20.08%	2,032.51
2	Binjai Kota	32,452	10.70%	7,876.70
3	Binjai Timur	68,376	22.55%	3,119.34
4	Binjai Utara	88,364	29.14%	3,745.82
5	Binjai Barat	53,186	17.54%	4,897.42
Kota Binjai		303,272	100.00%	3,352.92

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2022 sekitar 300.009 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 150.032 jiwa dan perempuan sebanyak 149.977 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk kota binjai mengalami peningkatan menjadi 303.272 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 151.627 jiwa dan perempuan sebanyak 151.645 jiwa.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Binjai memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.352,92 jiwa per km2.

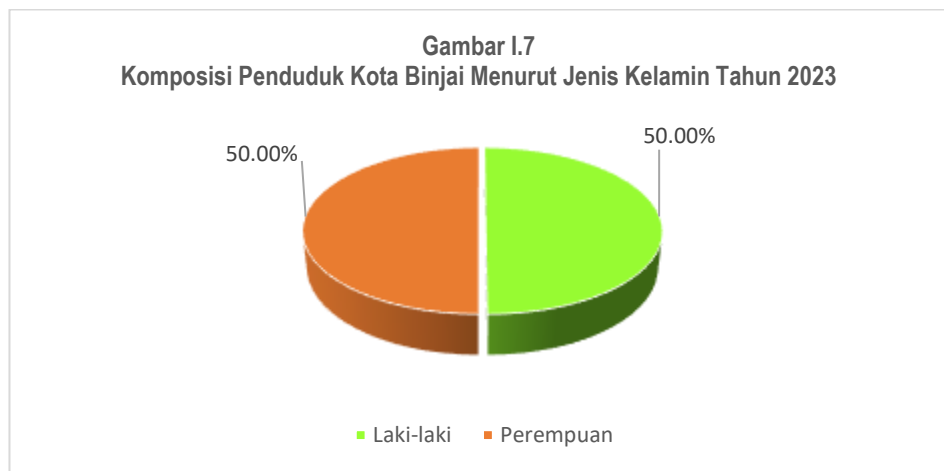
Tabel I.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Binjai Selatan	30,677	30,217	60,894
2	Binjai Kota	16,156	16,296	32,452
3	Binjai Timur	34,166	34,210	68,376
4	Binjai Utara	44,281	44,083	88,364
5	Binjai Barat	26,347	26,839	53,186
Kota Binjai		151,627	151,645	303,272

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, berada pada posisi seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 50 %.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Struktur umur penduduk dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2023 sebagian besar penduduk Kota Binjai adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun), karena mencapai 206.389 jiwa atau 68,05 persen, kemudian kelompok anak-anak (0-14 tahun) mencapai 78.609 jiwa atau 25.92 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 18.274 jiwa atau 6,02 persen.

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	13,929	13,272	27,201
2	05-09	13,856	12,929	26,785
3	10-14	12,818	11,805	24,623
4	15 - 19	11,965	11,072	23,037
5	20 - 24	11,762	11,205	22,967
6	25 - 29	12,565	12,326	24,891
7	30 - 34	12,284	12,278	24,562
8	35 - 39	11,648	11,859	23,507
9	40 - 44	11,002	11,211	22,213
10	45 - 49	9,985	10,173	20,158
11	50 - 54	8,661	9,368	18,029

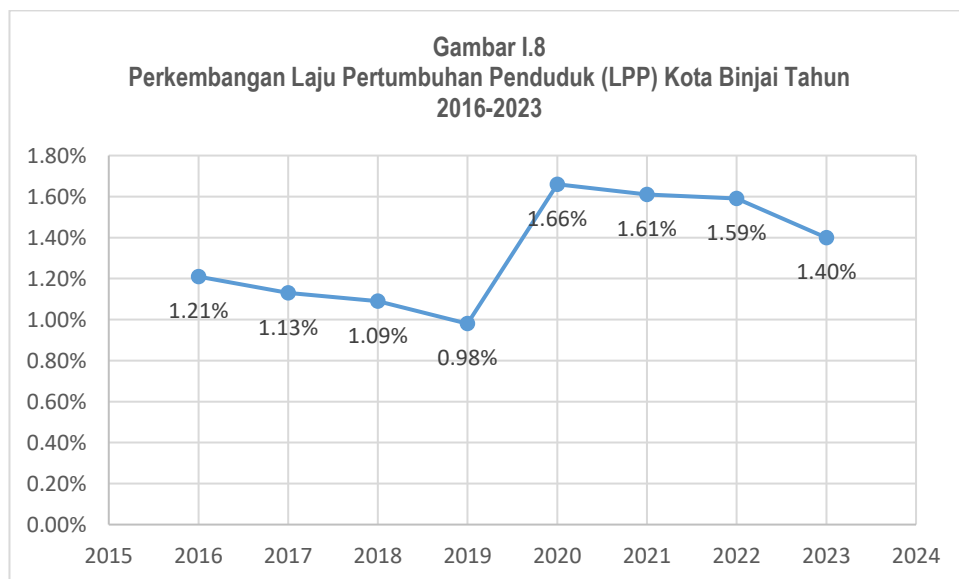


12	55 - 59	7,191	7,826	15,017
13	60 - 64	5,737	6,271	12,008
14	65 - 69	4,159	4,623	8,782
15	70 - 74	2,430	2,977	5,407
16	75+	1,635	2,450	4,085
Kota Binjai		151,627	151,645	303,272

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

1.4.3 Pertumbuhan Penduduk

Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk tercatat 1,21 persen. Namun angka laju pertumbuhan penduduk tersebut pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,66 persen dan menurun lagi menjadi 1,40 persen pada tahun 2023.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

1.4.4 Jumlah PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah seluruh pegawai pemerintahan Kota Binjai pada tahun 2023 yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan berjumlah 1.720 pegawai, dengan jumlah pegawai fungsional yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebanyak 301 pegawai.



1.4.5 Keuangan Daerah

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Tahun 2023 ini data yang digunakan adalah data APBD yang belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LP2APBD) 2023.

A. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.035.369.934.160,00,- dan terealisasi sebesar Rp 823.208.432.584,73,- atau mencapai 79,51 % sebagaimana tabel berikut. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hingga akhir tahun 2023, dari rencana sebesar Rp. 230.858.054.625,- realisasinya sebesar Rp. 85.329.428.075,51,- atau 36,96 persen. Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp. 124.123.000.778,- terealisasi sebesar Rp. 73.000.796.180,24,- atau 58,81 persen.



2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh SKPD, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 25.381.205.888,- Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 5.333.235.748,- atau sebesar 21,01 persen.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 4.212.978.767,- dan hingga akhir tahun 2023 dapat direalisasikan Rp. 3.841.838.090,- atau sebesar 91,19 persen.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 77.140.869.192,- hingga akhir tahun 2023, realisasinya sebesar Rp. 3.153.558.057,27,- atau sebesar 4,09 persen.

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, nomenklatur Dana Perimbangan diubah menjadi Pendapatan Transfer berupa penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Secara keseluruhan pendapatan dari Pendapatan Transfer pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 790.511.879.535,- dengan realisasi Rp. 737.879.004.509,22,- atau sebesar 93,34 persen.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 14.000.000.000,-. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp.0,-.



Tabel I.6
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,035,369,934,160.00	823,208,432,584.73	79.51
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	230,858,054,625.00	85,329,428,075.51	36.96
4.1.01	Pajak Daerah	124,123,000,778.00	73,000,796,180.24	58.81
4.1.02	Retribusi Daerah	25,381,205,888.00	5,333,235,748.00	21.01
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,212,978,767.00	3,841,838,090.00	91.19
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77,140,869,192.00	3,153,558,057.27	4.09
4.2	Pendapatan Transfer	790,511,879,535.00	737,879,004,509.22	93.34
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725,257,555,000.00	672,685,787,603.00	92.75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,254,324,535.00	65,193,216,906.22	99.91
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14,000,000,000.00	-	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,000,000,000.00	-	0.00

Sumber: LRA Unaudited, BPKPAD Kota Binjai

B. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kota Binjai menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp. 1.038.614.999.856,- sampai akhir Tahun Anggaran 2023 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 823.371.381.789,- atau 79,28 persen. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Operasi dari rencana sebesar Rp. 858.411.341.877,- terealisasikan Rp. 704.241.037.926,- atau 82,04 persen, Belanja Modal dari rencana sebesar Rp. 179.411.542.071,- terealisasikan Rp. 119.130.343.863,- atau 66,40 persen dan Belanja



Tidak Terduga dari rencana sebesar Rp. 792.115.908,- terealisasi Rp. 0,-. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada Tabel I.7 berikut.

Tabel I.7
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
5	BELANJA DAERAH	1,038,614,999,856.00	823,371,381,789.00	79.28
5.1	Belanja Operasi	858,411,341,877.00	704,241,037,926.00	82.04
5.1.01	Belanja Pegawai	474,099,288,318.00	444,528,624,920.00	93.76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349,002,957,059.00	243,994,919,138.00	69.91
5.1.05	Belanja Hibah	35,309,096,500.00	15,717,493,868.00	44.51
5.2	Belanja Modal	179,411,542,071.00	119,130,343,863.00	66.40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20,000,000.00	-	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,948,145,561.00	37,329,942,543.00	73.27
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,606,375,351.00	43,763,366,341.00	69.90
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,890,158,959.00	37,719,486,928.00	62.98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,723,374,200.00	95,530,051.00	1.67
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	223,488,000.00	222,018,000.00	
5.3	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	-	0.00
4.3.01	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	-	0.00

Sumber: LRA Unaudited, BPKPAD Kota Binjai

C. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Binjai adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.

Penerimaan pembiayaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.018.388.405,90,- atau mencapai 31,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.445.065.696,-. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kota Binjai tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp. 3.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.344.643.332,- atau sebesar 42,02 persen. Pos Pengeluaran Pembiayaan daerah meliputi Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penempatan kekayaan



pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Rincian pembiayaan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel I.8
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3,245,065,696.00	673,745,073.90	20.76
6.1	Penerimaan Pembiayaan	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02
6.2.02	Penyertaan Modal	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02
	PEMBIAYAAN NETTO	3,245,065,696.00	673,745,073.90	20.76

Sumber: LRA Unaudited BPKPAD Kota Binjai

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel I.9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,035,369,934,160.00	823,208,432,584.73	79.51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230,858,054,625.00	85,329,428,075.51	36.96
4.1.01	Pajak Daerah	124,123,000,778.00	73,000,796,180.24	58.81
4.1.01.06	Pajak Hotel	276,280,000.00	193,843,077.00	70.16
4.1.01.07	Pajak Restoran	21,240,000,000.00	11,781,844,421.00	55.47
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3,586,032,772.00	1,730,647,845.00	48.26
4.1.01.09	Pajak Reklame	7,000,000,000.00	3,430,313,792.00	49.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	29,020,688,006.00	28,837,705,124.00	99.37
4.1.01.11	Pajak Parkir	2,500,000,000.00	1,350,815,723.00	54.03
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500,000,000.00	237,623,052.24	47.52
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30,000,000.00	19,005,000.00	63.35
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	38,000,000,000.00	9,763,921,428.00	25.69
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21,970,000,000.00	15,655,076,718.00	71.26
4.1.02	Retribusi Daerah	25,381,205,888.00	5,333,235,748.00	21.01
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8,331,363,888.00	3,688,463,860.00	44.27
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14,649,842,000.00	546,221,285.00	3.73



4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,400,000,000.00	1,098,550,603.00	45.77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,212,978,767.00	3,841,838,090.00	91.19
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4,212,978,767.00	3,841,838,090.00	91.19
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77,140,869,192.00	3,153,558,057.27	4.09
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	727,119,952.00	0.00
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	7,744,386,373.00	0.00	0.00
4.1.04.05	Jasa Giro	985,705,919.00	146,099,578.00	14.82
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0.00	71,406,157.00	0.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	18,319,281,518.00	674,893,499.00	3.68
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	1,098,995,171.27	0.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	0.00	0.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19,000,000,000.00	0.00	0.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	262,500,000.00	4,334,000.00	1.65
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	349,557,379.00	430,709,700.00	123.22
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30,479,438,003.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	230,858,054,625.00	85,329,428,075.51	36.96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	790,511,879,535.00	737,879,004,509.22	93.34
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725,257,555,000.00	672,685,787,603.00	92.75
4.2.01.01	Dana Perimbangan	725,257,555,000.00	672,685,787,603.00	92.75
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16,028,788,000.00	26,846,669,646.00	167.49
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	551,268,977,000.00	550,725,837,079.00	99.90
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34,625,662,000.00	32,867,999,580.00	94.92
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	123,334,128,000.00	62,245,281,298.00	50.47
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	725,257,555,000.00	672,685,787,603.00	92.75
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02.01	DID	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0.00	0.00	0.00



4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,254,324,535.00	65,193,216,906.22	99.91
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59,054,324,535.00	59,054,324,535.00	100.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59,054,324,535.00	59,054,324,535.00	100.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6,200,000,000.00	6,138,892,371.22	99.01
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6,200,000,000.00	6,138,892,371.22	99.01
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	65,254,324,535.00	65,193,216,906.22	99.91
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	790,511,879,535.00	737,879,004,509.22	93.34
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,000,000,000.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,000,000,000.00	0.00	0.00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14,000,000,000.00	0.00	0.00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,000,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,000,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,035,369,934,160.00	823,208,432,584.73	79.51
5	BELANJA DAERAH	1,038,614,999,856.00	823,371,381,789.00	79.28
5.1	BELANJA OPERASI	858,411,341,877.00	704,241,037,926.00	82.04
5.1.01	Belanja Pegawai	474,099,288,318.00	444,528,624,920.00	93.76
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	305,895,846,322.00	296,968,569,316.00	97.08
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	75,454,809,981.00	66,817,677,158.00	88.55
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68,213,527,459.00	66,280,462,590.00	97.17
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15,000,274,050.00	13,241,458,329.00	88.27
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	515,392,503.00	509,577,527.00	98.87
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	740,000,000.00	710,880,000.00	96.06
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	0.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8,279,438,003.00	0.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349,002,957,059.00	243,994,919,138.00	69.91
5.1.02.01	Belanja Barang	58,370,566,210.00	44,618,535,567.00	76.44



5.1.02.02	Belanja Jasa	142,250,541,365.00	110,333,612,748.00	77.56
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43,466,187,063.00	31,896,159,408.00	73.38
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43,673,877,545.00	36,695,290,971.00	84.02
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22,149,995,376.00	20,451,320,444.00	92.33
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19,091,789,500.00	0.00	0.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20,000,000,000.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,309,096,500.00	15,717,493,868.00	44.51
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19,186,561,600.00	15,081,263,168.00	78.60
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15,486,304,200.00	0.00	0.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	636,230,700.00	636,230,700.00	100.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	858,411,341,877.00	704,241,037,926.00	82.04
5.2	BELANJA MODAL	179,411,542,071.00	119,130,343,863.00	66.40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20,000,000.00	0.00	0.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	20,000,000.00	0.00	0.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	20,000,000.00	0.00	0.00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	20,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,948,145,561.00	37,329,942,543.00	73.27
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	21,320,000.00	11,700,000.00	54.88
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,567,903,000.00	1,447,063,500.00	92.29
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	71,372,000.00	34,861,023.00	48.84
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16,331,226,713.00	15,775,958,775.00	96.60
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,368,966,668.00	1,281,575,000.00	93.62
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22,756,114,144.00	16,856,814,654.00	74.08
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	233,290,086.00	213,772,086.00	91.63
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,097,161,950.00	1,210,695,760.00	57.73
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	82,398,000.00	81,900,000.00	99.40
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	15,000,000.00	14,975,000.00	99.83
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	366,878,000.00	366,878,000.00	100.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35,000,000.00	33,748,745.00	96.42
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4,801,515,000.00	0.00	0.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,200,000,000.00	0.00	0.00



5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,606,375,351.00	43,763,366,341.00	69.90
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	61,511,836,944.00	43,668,827,934.00	70.99
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	94,538,407.00	94,538,407.00	100.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,000,000,000.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,890,158,959.00	37,719,486,928.00	62.98
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36,761,760,499.00	22,640,209,625.00	61.59
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	22,720,023,642.00	14,919,996,632.00	65.67
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	408,374,818.00	159,280,671.00	39.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,723,374,200.00	95,530,051.00	1.67
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	87,362,200.00	87,041,625.00	99.63
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8,490,000.00	8,488,426.00	99.98
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5,627,522,000.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	223,488,000.00	222,018,000.00	99.34
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	223,488,000.00	222,018,000.00	99.34
	JUMLAH BELANJA MODAL	179,411,542,071.00	119,130,343,863.00	66.40
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	792,115,908.00	0.00	0.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	0.00	0.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	0.00	0.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	0.00	0.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	792,115,908.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	792,115,908.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,038,614,999,856.00	823,371,381,789.00	79.28
	SURPLUS/DEFISIT	(3,245,065,696.00)	(162,949,204.27)	5.02
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3,245,065,696.00	673,745,073.90	20.76
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0.00	0.00	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6,445,065,696.00	2,018,388,405.90	31.32
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02



6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,200,000,000.00	1,344,643,332.00	42.02
	PEMBIAYAAN NETTO	3,245,065,696.00	673,745,073.90	20.76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	510,795,869.63	0.00

Sumber: LRA Unaudited, BPKPAD Kota Binjai



PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dihitung dengan memperhatikan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pandemic covid-19, terutama pada sektor perumahan, perhotelan, restoran, transportasi dan hiburan. Berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Binjai yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya :
 - a. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penataan dan pengelolaan asset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan;



- c. Peningkatan upaya penegakan hukum (lawenforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.
2. Pemerintah Kota Binjai juga mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dan dihitung berdasarkan rata-rata penerimaan 3 tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan pada kondisi sebelum perubahan maupun setelah perubahan yaitu sebesar Rp 1.035.369.934.160,-. Untuk lebih jelasnya mengenai ringkasan pendapatan pada Perubahan APBD Kota Binjai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1
Ringkasan Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230,858,054,625	230,858,054,625	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	124,123,000,778	124,123,000,778	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	25,381,205,888	25,381,205,888	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,212,978,767	4,212,978,767	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77,140,869,192	77,140,869,192	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	790,511,879,535	790,511,879,535	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725,257,555,000	725,257,555,000	-	-



4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,254,324,535	65,254,324,535	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,000,000,000	14,000,000,000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,000,000,000	14,000,000,000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,035,369,934,160	1,035,369,934,160	-	-

Sumber : Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, BPKPAD

2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Perubahan RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023.

Adapun kebijakan belanja daerah Kota Binjai untuk perubahan APBD Tahun 2023 tetap diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran sertamemperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Binjai akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Binjai,



termasuk investas di bidang Pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restaurant.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kota Binjai Tahun 2021-2026. Struktur Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :
 - Belanja pegawai
 - Belanja barang dan jasa
 - Belanja bunga
 - Belanja subsidi
 - Belanja hibah
 - Belanja bantuan sosial
 - b. Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - Belanja modal tanah
 - Belanja modal peralatan dan mesin
 - Belanja modal gedung dan bangunan
 - Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - Belanja modal aset tetap lainnya
 - Belanja modal aset lainnya
 - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;



- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Belanja transfer digunakan untuk :
- Belanja bagi hasil, dan
 - Belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp 1.038.614.999.856,- dan tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum dan sesudah APBD Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya mengenai ringkasan belanja pada Perubahan APBD Kota Binjai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2
Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	858,130,001,877	858,411,341,877	281,340,000	0.03
5.1.01	Belanja Pegawai	474,099,288,318	474,099,288,318	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348,721,617,059	349,002,957,059	281,340,000	0.08
5.1.05	Belanja Hibah	35,309,096,500	35,309,096,500	-	-
5.2	BELANJA MODAL	179,411,542,071	179,411,542,071	-	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20,000,000	20,000,000	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,948,145,561	50,948,145,561	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,606,375,351	62,606,375,351	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,890,158,959	59,890,158,959	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,723,374,200	5,723,374,200	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	223,488,000	223,488,000	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,073,455,908	792,115,908	(281,340,000)	(26.21)



4.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,073,455,908	792,115,908	(281,340,000)	(26.21)
	Jumlah Belanja	1,038,614,999,856	1,038,614,999,856	-	-

Sumber : Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, BPKPAD

2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kebijakan umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran pada komponen pembiayaan daerah sesuai dengan kebijakan APBD tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Rencana penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Binjai tahun 2023 digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel II.3
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230,858,054,625	230,858,054,625	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	124,123,000,778	124,123,000,778	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	25,381,205,888	25,381,205,888	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,212,978,767	4,212,978,767	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77,140,869,192	77,140,869,192	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	790,511,879,535	790,511,879,535	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725,257,555,000	725,257,555,000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,254,324,535	65,254,324,535	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,000,000,000	14,000,000,000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,000,000,000	14,000,000,000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,035,369,934,160	1,035,369,934,160	-	-
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	858,130,001,877	858,411,341,877	281,340,000	0.03
5.1.01	Belanja Pegawai	474,099,288,318	474,099,288,318	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348,721,617,059	349,002,957,059	281,340,000	0.08
5.1.05	Belanja Hibah	35,309,096,500	35,309,096,500	-	-
5.2	BELANJA MODAL	179,411,542,071	179,411,542,071	-	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20,000,000	20,000,000	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,948,145,561	50,948,145,561	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,606,375,351	62,606,375,351	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,890,158,959	59,890,158,959	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,723,374,200	5,723,374,200	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	223,488,000	223,488,000		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,073,455,908	792,115,908	(281,340,000)	(26.21)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,073,455,908	792,115,908	(281,340,000)	(26.21)
	Jumlah Belanja	1,038,614,999,856	1,038,614,999,856	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	(3,245,065,696)	(3,245,065,696)	-	-



				-	
6	PEMBIAYAAN			-	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6,445,065,696	6,445,065,696	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,445,065,696	6,445,065,696	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6,445,065,696	6,445,065,696	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3,200,000,000	3,200,000,000	-	-
	Pembiayaan Netto	3,245,065,696	3,245,065,696	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

Sumber : Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, BPKPAD



HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengukuran kinerja pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan

3.1.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Binjai

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama (IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

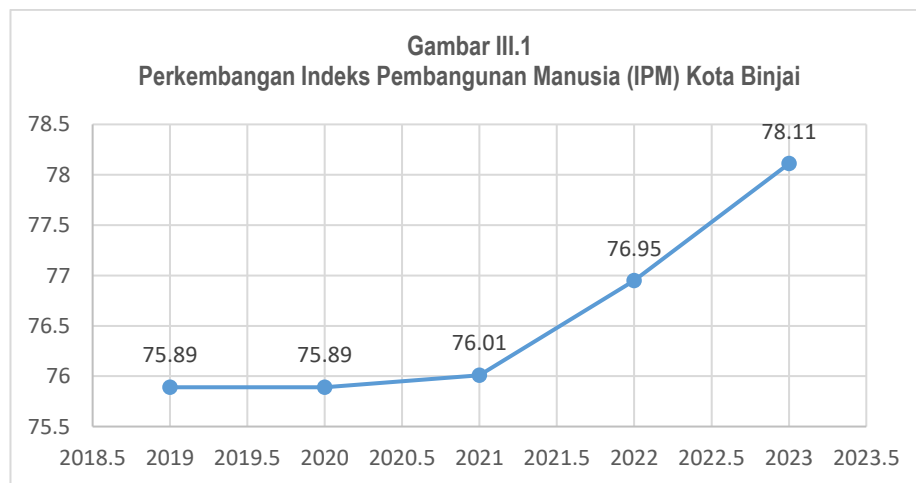
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Persentase penduduk miskin, Tingkat pengangguran terbuka, Inflasi, Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hasil pengukuran IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut:



- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara.
- Menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Khusus di Indonesia, digunakan sebagai salah satu indikator untuk penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Dari Gambar III.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 IPM Kota Binjai telah berhasil mencapai angka 78,11, meningkat 1,16 dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Kota Binjai pada status pembangunan manusia “tinggi”. Peningkatan nilai IPM Kota Binjai menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Binjai dalam membangun kualitas hidup masyarakat.

B. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah



minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indikator Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah sejak Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Namun demikian angka kemiskinan tetap diperhitungkan dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Binjai. Berdasarkan data BPS Kota Binjai, garis kemiskinan Kota Binjai tahun 2022 sebesar Rp 499.451 perkapita perbulan. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 14.610 jiwa, sehingga Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2022 adalah 5,10%. Batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Binjai di tahun 2023 meningkat menjadi Rp 538,638 perkapita perbulan, bertambah sebesar Rp 39.187 perkapita perbulan atau meningkat sebesar 7,85 % bila dibandingkan tahun 2022.

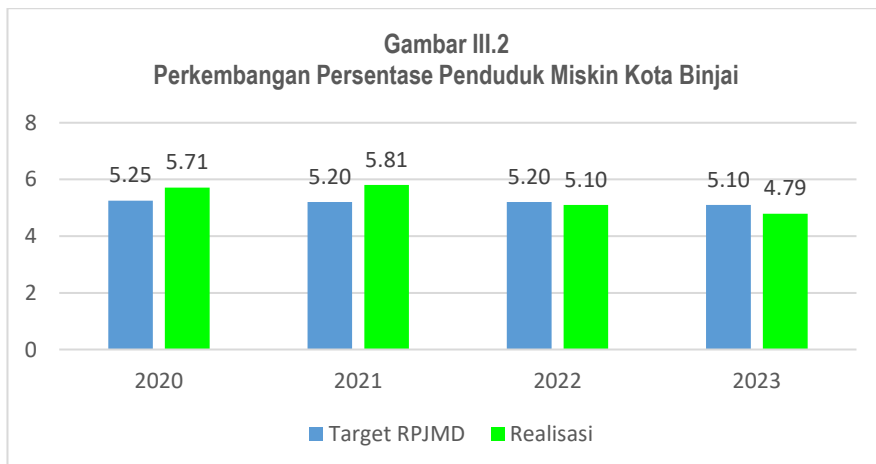
Tabel III.1

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai Tahun 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2020	433,746	15,910	5.71
2021	466,554	16,460	5.81
2022	499,451	14,610	5.10
2023	538,638	13,850	4.79

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2023, BPS

Jumlah penduduk miskin Kota Binjai mengalami penurunan sebesar 760 jiwa dari 14.610 jiwa pada tahun 2022 menjadi 13.850 jiwa pada tahun 2023. Sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,79 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang mulai pulih akibat dampak pandemi Covid-19.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS

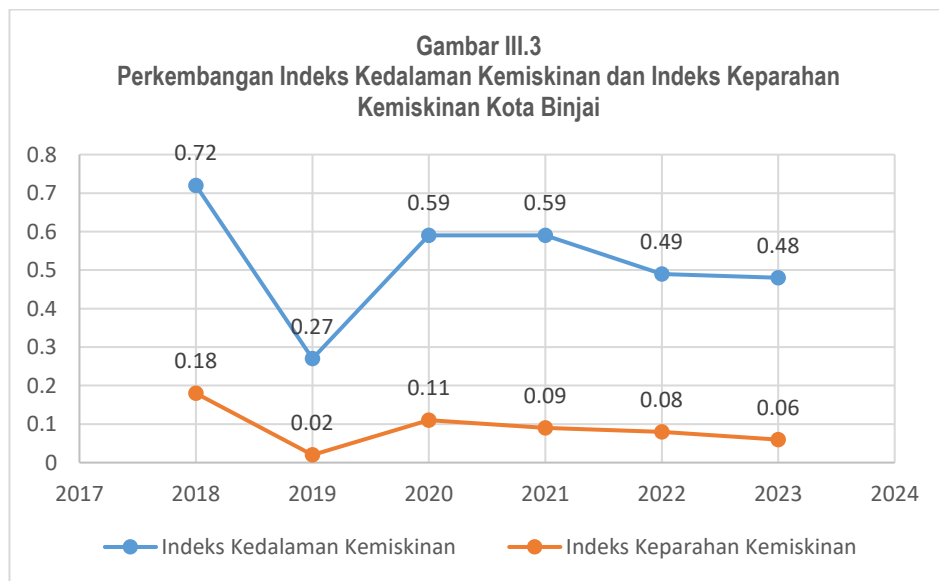
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Agar tujuan pembangunan lebih tepat sasaran maka informasi kemiskinan tidak cukup hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi dibutuhkan informasi lain, salah satunya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Intervensi program pengentasan kemiskinan relatif lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahahan Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran



di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Tingkat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Binjai menunjukkan tren yang positif dan cenderung mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Binjai pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.02 poin jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 3 tahun terakhir TPT Kota Binjai menunjukkan tren yang menurun, sehingga menunjukkan keberhasilan Kota Binjai dalam mengentaskan pengangguran di Kota Binjai. Realisasi TPT pada tahun 2021 tercatat sebesar 7,86 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6,10 persen. Hal ini dikarenakan mulai membaiknya perekonomian dimasyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.



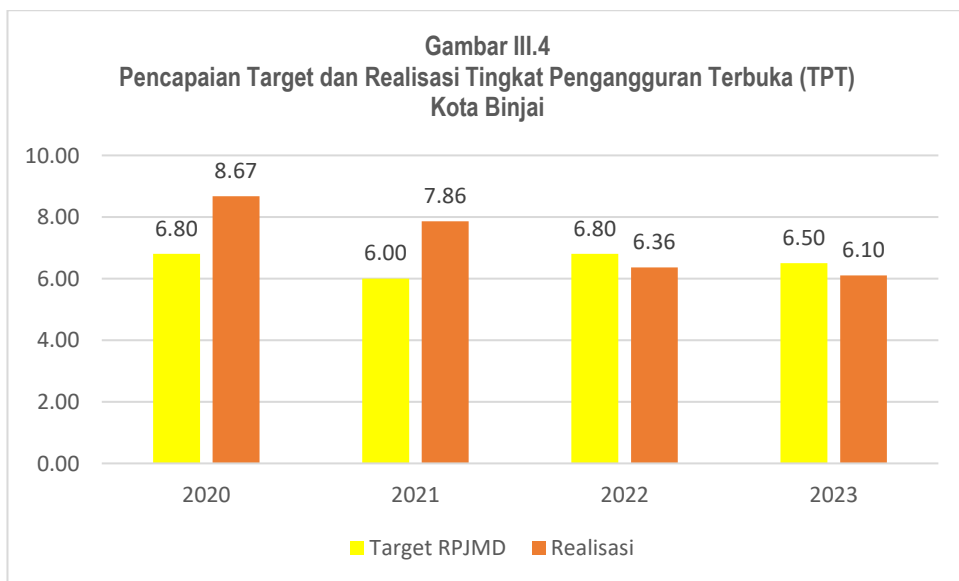
Tabel III.2

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai Tahun 2020-2023

Tahun /Years	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
2020	65.14	8.67
2021	62.77	7.86
2022	54.89	6.36
2023	62.79	6.10

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS

Pada tahun 2023 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai tercatat sebesar 6,10 persen atau mengalami penurunan 4,09 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Terkait dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam mengurangi angka pengangguran, maka angka TPT Kota Binjai masih dibawah target RPJMD yaitu sebesar 6,50 persen.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS

D. Inflasi

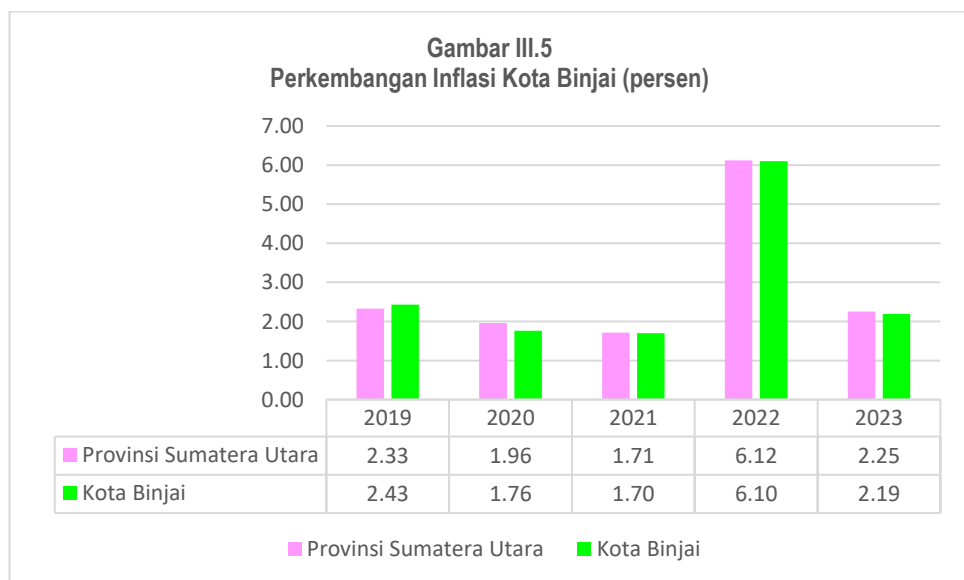
Dalam cakupan ekonomi makro salah satu acuan yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi yang menunjukkan tren positif ditandai oleh meningkatnya aktivitas perekonomian. Salah satu indikator meningkatnya aktivitas perekonomian yakni meningkatnya inflasi. Hal itu



ditunjukkan oleh inflasi Kota Binjai yang mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni 2,19 persen atau menurun sebesar 64,10 persen dibanding tahun 2022 sebesar 6,10 persen.

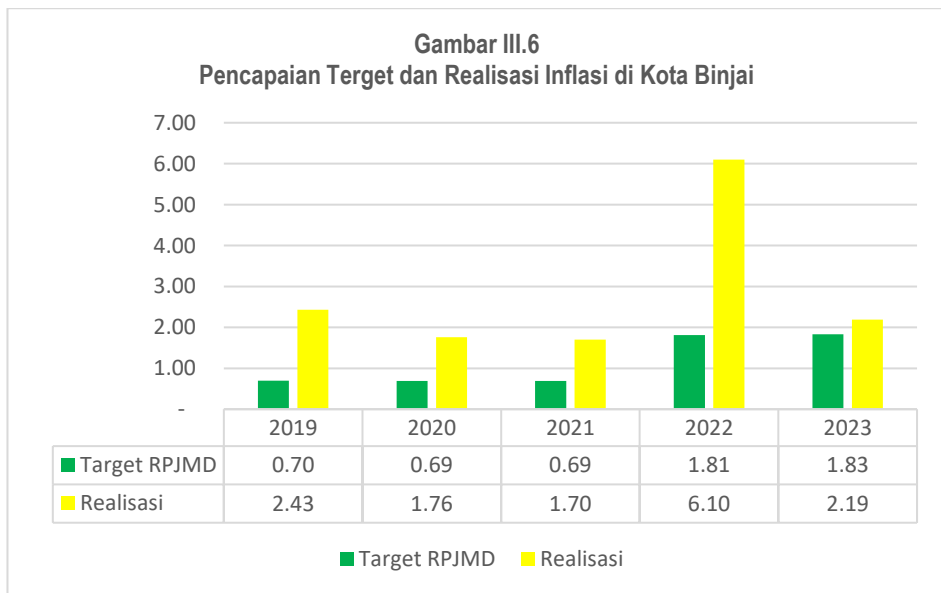
Realisasi inflasi Kota Binjai pada tahun 2023 masih lebih baik dibanding realisasi inflasi Sumatera Utara sebesar 2,25 persen. Meskipun demikian, inflasi Kota Binjai tahun 2023 masih selaras dengan arah inflasi Sumatera Utara. Inflasi yang lebih tinggi juga merefleksikan peningkatan daya beli masyarakat sehingga peningkatan inflasi yang lebih tinggi di Kota Binjai mengindikasikan mulai kembali pulihnya perekonomian Kota Binjai yang ditunjukkan dari sisi permintaan masyarakat.

Dalam penentuan angka inflasi Kota Binjai mengacu pada angka inflasi Kota Medan berdasarkan penentuan jumlah, jenis dan kualitas dalam paket komoditi barang dan jasa serta bobot timbangan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) didasarkan pada survey biaya hidup (SBH). Selama tahun 2023, inflasi tahun ke tahun di Kota Binjai menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda dengan angka inflasi di Sumatera Utara. Inflasi Kota Binjai tertinggi tercatat pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2021 sebesar sebesar 1,70 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, BPS

Perkembangan inflasi Kota Binjai selama lima tahun terakhir sangat berfluktuatif, pada tahun 2023 inflasi Kota Binjai berada pada posisi tertinggi sebesar 2,19 persen sementara target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1,83 persen. Untuk perkembangan inflasi Kota Binjai dapat dilihat pada gambar III.6

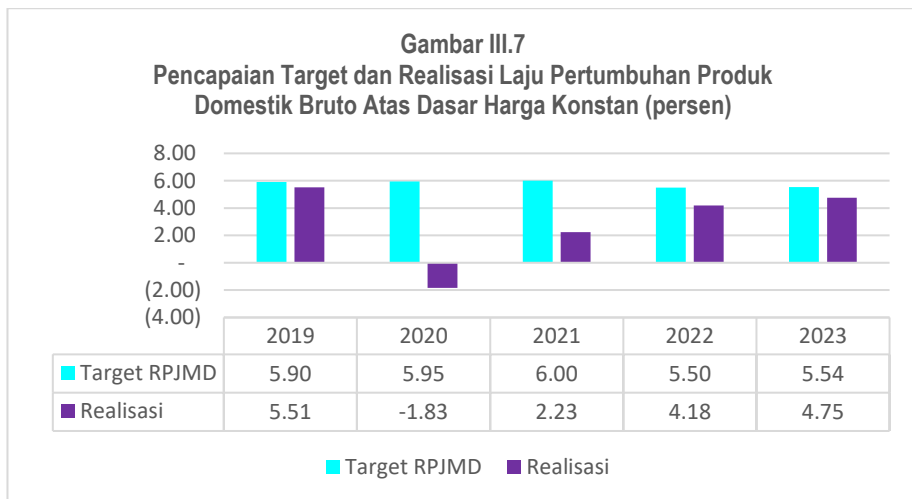


Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, BPS

E. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan atau produksi dalam satu daerah dari tahun ke tahun. Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap nilai Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hanya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Binjai mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar minus 1.83 %. Namun pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi mulai beranjak naik menjadi 4,18 persen hingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mulai membaik dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 persen. Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Binjai, maka pertumbuhan ekonomi Kota Binjai belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dapat di lihat pada gambar III.7.

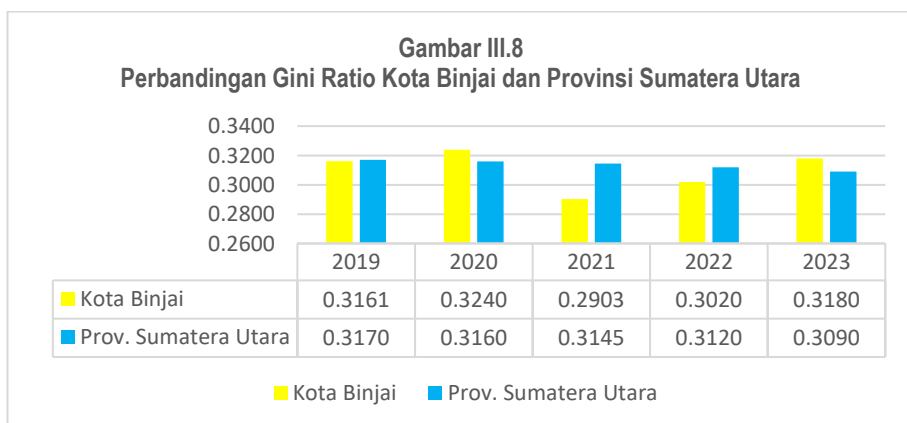


Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS

F. Indeks Gini

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

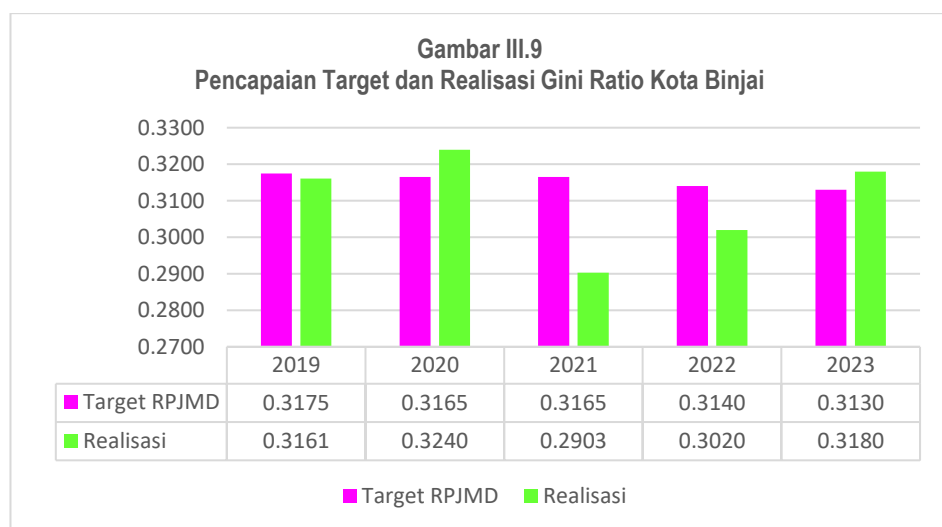
Tahun 2023 nilai Gini Rasio Kota Binjai sebesar 0,3180 poin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dimana nilai Gini Rasio sebesar 0,3020 poin. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, selama empat tahun terakhir gini rasio Kota Binjai ini berada di dibawah, pada tahun 2023 nilai indeks gini rasio Kota Binjai lebih tinggi dibandingkan dengan indeks gini rasio provinsi Sumatera Utara.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS



Pada tahun 2022 Indeks Gini tercatat 0,3020 poin, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 0.3180 poin. Berdasarkan data tersebut Kota Binjai masih berada pada kondisi ketimpangan yang sedang, yaitu masih berada pada nilai 0,30- 0,49. Selain itu, nilai gini ratio Kota Binjai sudah melebihi dari target RPJMD yang dicapai sebesar 0,3130 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Binjai harus lebih fokus dalam melakukan perbaikan pola distribusi pengeluaran/pendapatan diantara kelompok penduduk Kota Binjai. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio, dengan strategi berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka tahun 2024, BPS

G. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

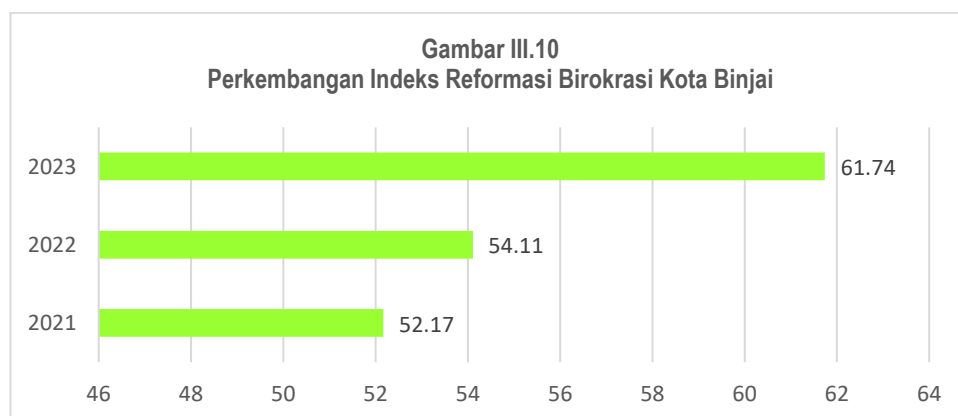
1. Komponen Pengungkit (Enablers), yaitu penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan



unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Komponen Hasil (Results), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2021, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi menjadi komponen pengukur ketercapaian tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator baru, yang ditargetkan mencapai nilai BB. Meskipun indikator tersebut bukan menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun-tahun sebelumnya, namun Indeks Reformasi Birokrasi tetap diperhatikan, untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Binjai.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memperoleh nilai 61,74 atau predikat B, sedangkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai pada tahun 2022 memperoleh nilai 54,11 atau predikat CC. Pemerintah Kota Binjai berkomitmen akan terus melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil capaian kinerja.



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Binjai Tahun 2024

H. Opini BPK

WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Tingkatan opini lebih rendah adalah wajar



dengan pengecualian (WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Pemko Binjai pernah meraih WDP atas laporan keuangan tahun 2015. Kemudian kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Pemerintah Kota Binjai menerima kembali penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan katagori WDP pada tahun 2022 terhadap lapaoran keuangan tahun 2022. Kondisi pelaporan keuangan pemerintah Kota Binjai wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja kewajaran informasi atas laporan keuangan pemerintah dan dapat meraih WTP pada tahun 2023.

I. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran ini dimaksudkan sebagai acuan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

1. Dimensi Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai

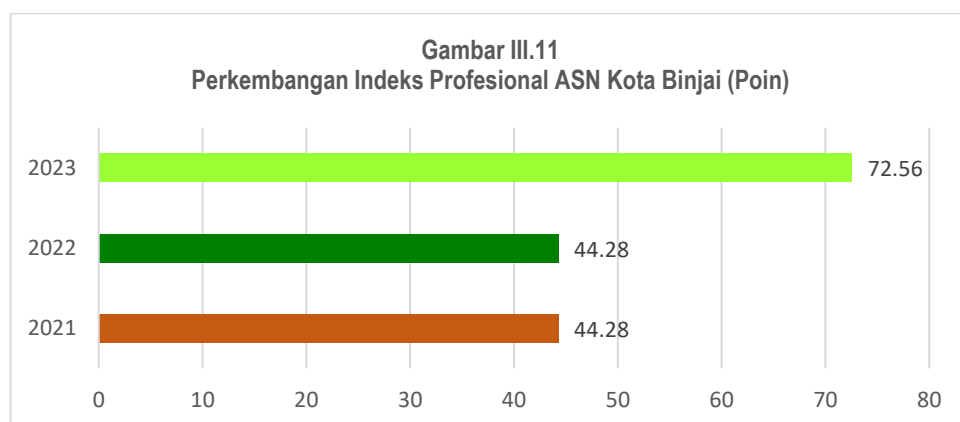


serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

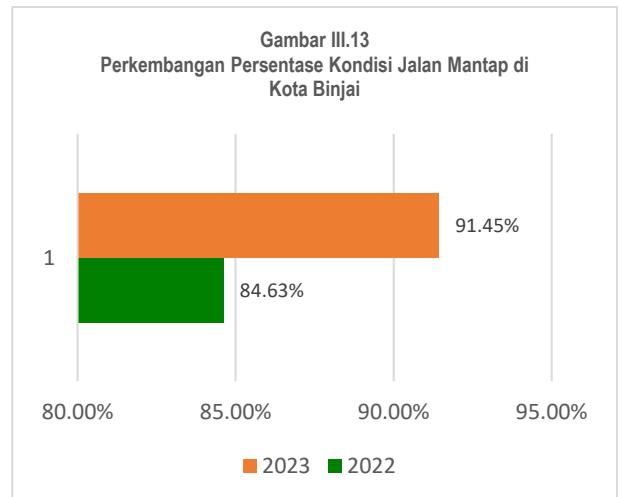
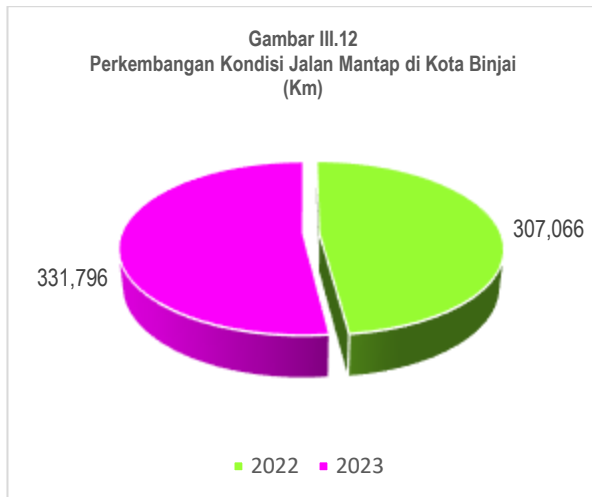
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kota Binjai pada tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Negara memperoleh nilai 44,28 atau predikat Sangat Rendah, sedangkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Binjai pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 72,56 atau predikat Sedang. Pemerintah Kota Binjai berkomitmen akan terus meningkatkan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN yang selalu bertindak professional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai Tahun 2024

J. Persentase Kondisi Jalan Baik

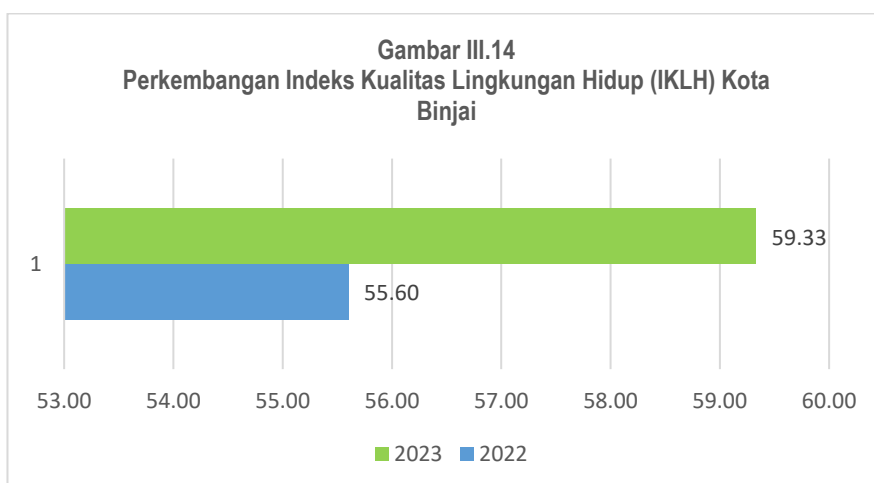
Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Binjai berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Kondisi panjang jalan di Kota Binjai sepanjang 362.831 km dengan kondisi jalan mantap sepanjang 331.796 km, dimana proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 91,44 persen pada tahun 2023.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

K. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 59,33 poin dan sudah mencapai target yang dicapai sebesar 59 poin.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024



L. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)

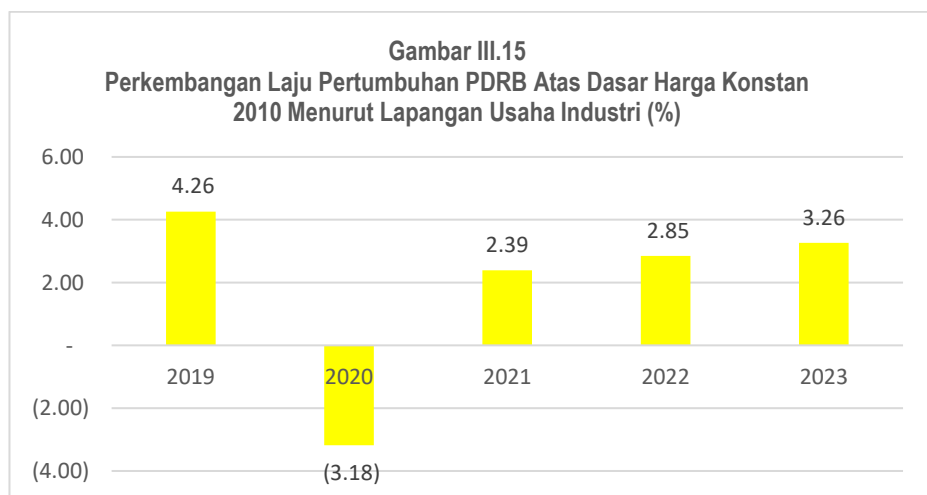
Lapangan usaha Industri pengolahan menempati porsi terbesar ketiga setelah Konstruksi dalam pembentukan PDRB Kota Binjai. Tahun 2023 peranannya mencapai 11,47 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan tahun 2023 mencapai 1.659,02 miliar rupiah, sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 922,88 miliar rupiah.

Tabel III.3
PDRB, Peranan dan Laju pertumbuhan Lapangan Usaha Industri

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	1,296.32	1,308.75	1,410.69	1,546.55	1,659.02
ADHK	876.57	848.67	868.99	893.79	922.88
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	11.08	11.12	11.45	11.61	11.47
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	4.26	(3.18)	2.39	2.85	3.26

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

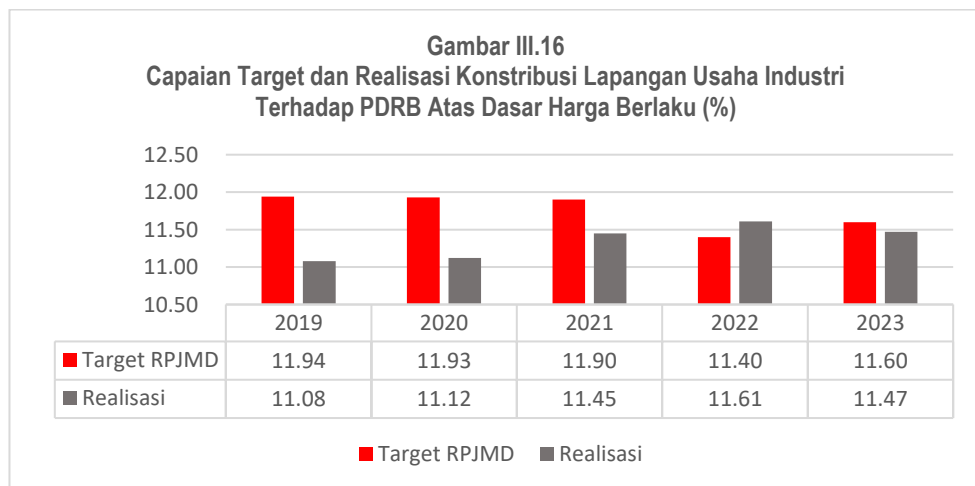
Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai menurut lapangan usaha industri pengolahan mengalami deselerasi, hingga pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan 3,26 persen.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai maka kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB masih dibawah target yang ditetapkan RPJMD sebesar 11,60 persen.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan antara lain:

1. Jumlah Penduduk; Kenaikan jumlah penduduk meningkatkan daya beli dan konsumsi produk makanan sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri makanan
2. Daya Beli; Peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan produksi yang dapat mendorong industri makanan dan minuman
3. Pesta Demokrasi; Adanya pemilu, pilkada dan lain-lain akan meningkatkan permintaan produksi sehingga mendorong pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan logistic
4. Kemudahan Regulasi; Kemudahan regulasi dapat meningkatkan investasi yang mendorong pertumbuhan industri
5. Jumlah Tenaga Kerja; Semakin banyak jumlah tenaga kerja maka output yang dihasilkan akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan industri
6. Hari Raya; Perayaan hari besar keagamaan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk sehingga mendorong pertumbuhan industri.

M. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)

Lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memegang andil dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai. Selama 5 tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;



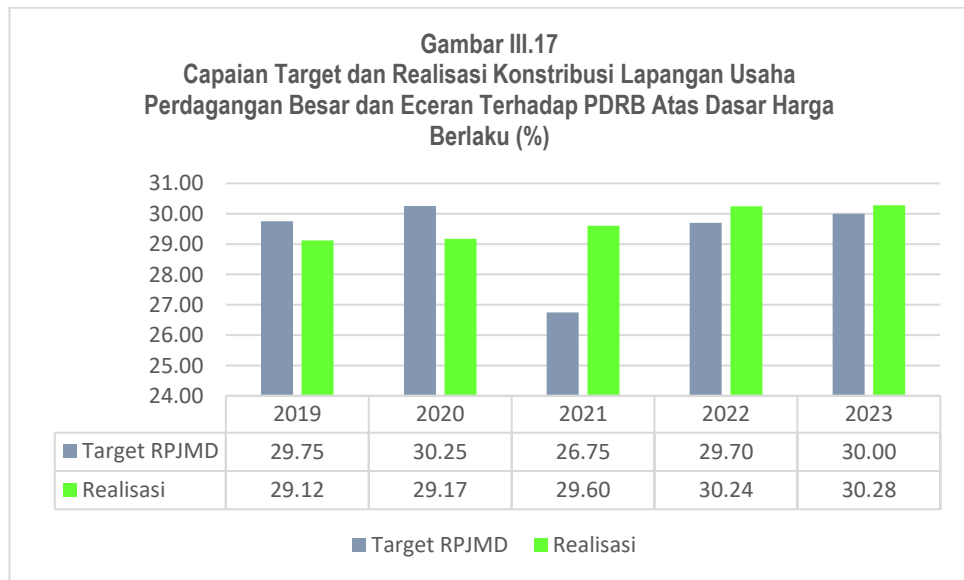
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 30 persen dalam pembentukan PDRB Kota Binjai. Tahun 2023, peranannya mencapai 30.28 persen. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Binjai tahun 2022 mencapai 4.378,22 miliar rupiah, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 2.799,23 miliar rupiah.

Tabel III.4
Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	3,407.06	3,433.33	3,645.83	4,026.28	4,378.22
ADHK	2,451.87	2,426.81	2,515.01	2,652.55	2,799.23
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	29.12	29.17	29.60	30.24	30.28
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	6.44	-1.02	3.63	5.47	5.53

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai maka kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB sudah melebihi target yang ditetapkan RPJMD sebesar 30 persen.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2023, BPS



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha perdagangan:

1. Pertumbuhan sektor perdagangan yang positif seiring dengan meningkatnya penjualan produk barang dan suku cadang.
2. Adanya aktivitas kampanye pemilihan umum juga meningkatkan permintaan barang untuk kebutuhan logistik. Secara keseluruhan, penjualan barang-barang di dalam daerah mengalami kenaikan.
3. Naiknya pertumbuhan sektor perdagangan terjadi seiring dengan bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk kelas menengah ke atas sehingga kebutuhan barang-barang eceran seperti pakaian dan sebagainya meningkat karena kebutuhan terhadap barang tersebut makin tinggi.
4. Pandemi covid 19 juga mempengaruhi pola perdagangan, supply-demand menjadi terganggu

N. Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)

Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB (ADHB) Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 10,36 persen yang terdiri dari :

1. Jasa keuangan dan asuransi
2. Jasa perusahaan
3. Jasa pendidikan
4. Jasa kesehatan dan kegiatan social
5. Jasa lainnya

Peran Bank dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Binjai sangat penting artinya untuk mendukung program pemerintah dan memperlancar modal usaha. Perekonomian modern menempatkan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai mitra penting bagi kegiatan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai angka 1,68 persen. Sedangkan pada tahun 2023, laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 4,05 persen.



Tabel III.5

Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	383.67	388.30	423.60	477.32	502.11
ADHK	255.69	259.98	273.24	288.27	299.95
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	3.28	3.30	3.44	3.58	3.47
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	1.35	1.68	5.10	5.50	4.05

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Upaya pembiayaan UMKM dan perluasan akses keuangan ke daerah-daerah di antaranya dilakukan melalui KUR Klaster, program pembiayaan mikro dan revitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang diperkirakan akan terus membaik dan terjaga sesuai tren tahun sebelumnya.

Kategori Jasa Perusahaan mencakup kegiatan jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, jasa keamanan dan penyelidikan, dan jasa penunjang usaha lainnya. Tahun 2023 peranan kategori Jasa Perusahaan dalam mengembangkan perekonomian Kota Binjai hanya sebesar 0,89 persen. Nilai tambah nominal Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kota Binjai tahun 2023 sebesar 128,30 miliar rupiah. Peranan lapangan usaha ini relatif kecil, dari tahun 2019 -2023 peranannya hanya berkisar kurang dari 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami deselerasi dari 3,37 persen pada tahun 2019 menjadi 6,20 persen pada tahun 2023.

Tabel III.6

Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	101.46	101.96	103.79	115.99	128.30
ADHK	61.01	58.14	58.06	62.02	65.87
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	0.87	0.87	0.84	0.87	0.89
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	3.37	(4.71)	-0.14	6.82	6.20

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



Jasa pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olah raga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pada tahun 2023 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,41 persen terhadap total perekonomian Kota Binjai, dengan nilai tambah nominal sebesar 637,87 milyar rupiah. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Binjai mengalami fluktuasi dari 1,52 persen pada tahun 2020 menjadi 4,77 persen pada tahun 2023.

Tabel III.7
Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	534.80	558.55	577.58	592.00	637.87
ADHK	378.16	383.92	395.64	404.55	423.83
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	4.57	4.75	4.69	4.45	4.41
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	4.34	1.52	3.05	2.25	4.77

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2023, BPS

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kontribusi kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kota Binjai sebesar 1,05 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Selama tahun 2019-2023 peranannya relatif mengalami penurunan yaitu sebesar 1,09 persen tahun 2019 menjadi 1,05 persen tahun 2023. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan deselerasi sejak tahun 2019-2023 yaitu sebesar 4,62 persen dan deselerasi menjadi minus 1,20 persen pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,62 persen.



Tabel III.8

Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	127.80	132.10	134.25	139.17	151.88
ADHK	79.64	78.68	79.42	82.79	86.62
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	1.09	1.12	1.09	1.05	1.05
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	4.62	(1.20)	0.94	4.25	4.62

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Kegiatan perekonomian Kota Binjai pada sektor Jasa Lainnya mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi dan berbagai kegiatan jasa perorangan. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Binjai relatif kecil dan namun dari tahun ke tahun stabil dikisaran 0,54 persen sampai dengan 0,52 persen. Tahun 2023, peranannya sebesar 0,53 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 77,14 miliar rupiah. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu mengalami fluktuasi. Tahun 2023, laju pertumbuhannya mencapai 3,57 persen, mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus 2,68 persen.

Tabel III.9

Perkembangan PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (miliar Rp.)					
ADHB	63.06	64.07	65.38	69.60	77.14
ADHK	41.18	40.64	41.22	42.33	43.84
Proporsi Terhadap Total PDRB (%-ADHB)	0.54	0.54	0.53	0.52	0.53
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	3.32	(1.31)	1.43	2.68	3.57

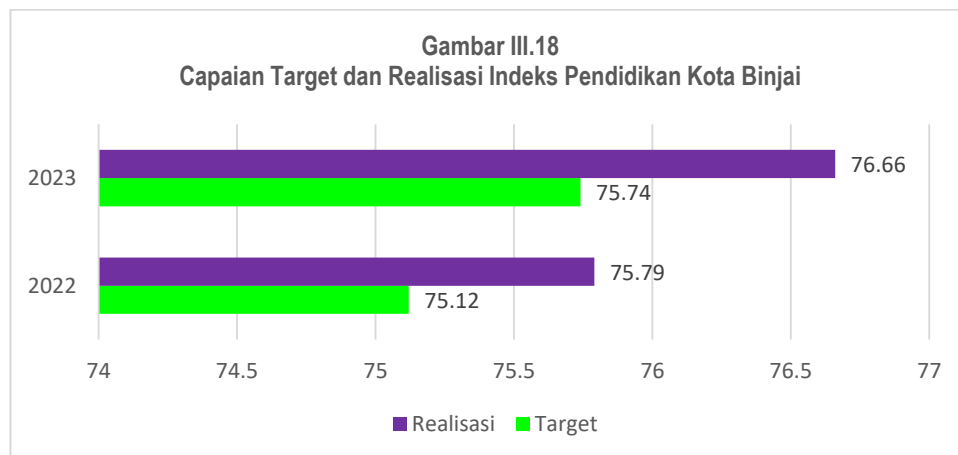
Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

O. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks



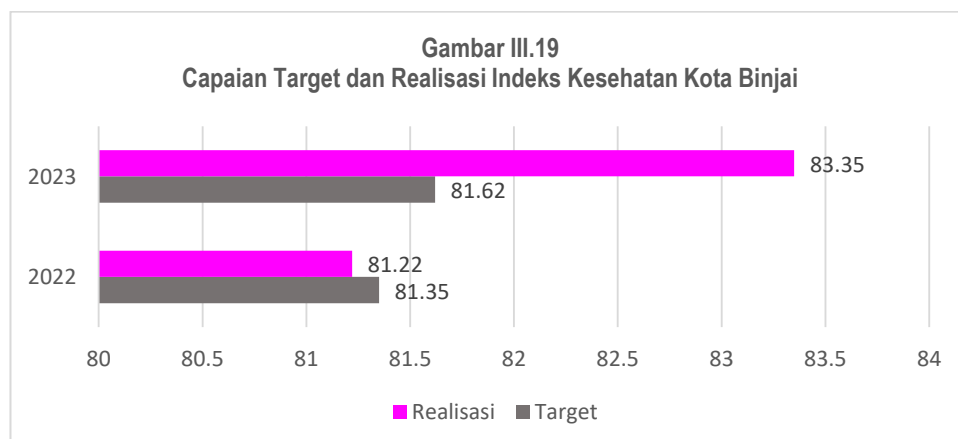
Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Mengenai nilai indeks pendidikan Kota Binjai tahun 2022 sebesar 75,79 poin, meningkat menjadi 76,66 poin pada tahun 2023 . Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 75,74 poin untuk indeks pendidikan.



Sumber : Bappeda Kota Binjai Tahun 2024

P. Indeks Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat menjelaskan hasil pembangunan pada dimensi kesehatan dan dimensi kesejahteraan, antara lain angka harapan hidup dan pendapatan per kapita. Indikator tersebut juga digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan dan kesejahteraan dalam menilai capaian pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengenai nilai indeks kesehatan Kota Binjai tahun 2022 sebesar 81,22 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 83,35 poin. Angka sudah melebihi dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 81,62 poin untuk indeks kesehatan



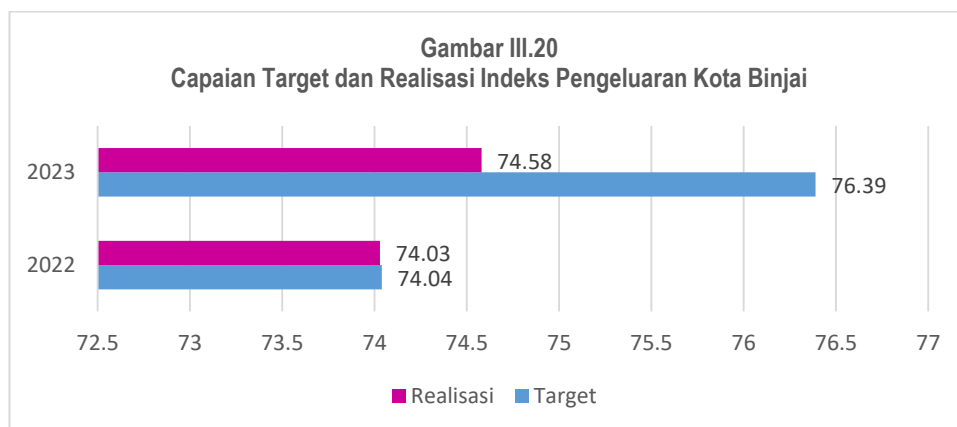
Sumber : Bappeda Kota Binjai Tahun 2024



Q. Indeks Pengeluaran

Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang membentuk kehidupan dan masyarakat dengan memperbaiki kehidupan mereka. Indeks Pembangunan Manusia gabungan (IPM) mengintegrasikan tiga dimensi dasar pembangunan manusia Harapan hidup saat lahir mencerminkan kemampuan untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat. Tahun bersekolah dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan mencerminkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Dan pendapatan nasional bruto per kapita mencerminkan kemampuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak.

Indikator pengeluaran perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Mengenai nilai indeks pengeluaran Kota Binjai tahun 2022 sebesar 74,03 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 74,58 poin. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 76,39 poin untuk indeks pengeluaran.



Sumber : Bappeda Kota Binjai Tahun 2024

3.1.2 Hasil Yang Dicapai Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

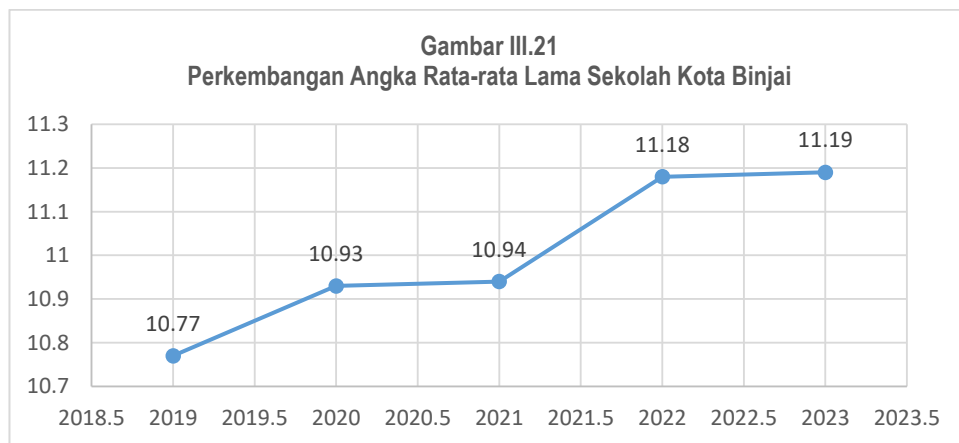
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan intelektual seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan penduduk dan keterampilan penduduk untuk mendukung pembangunan bangsa.



Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal.



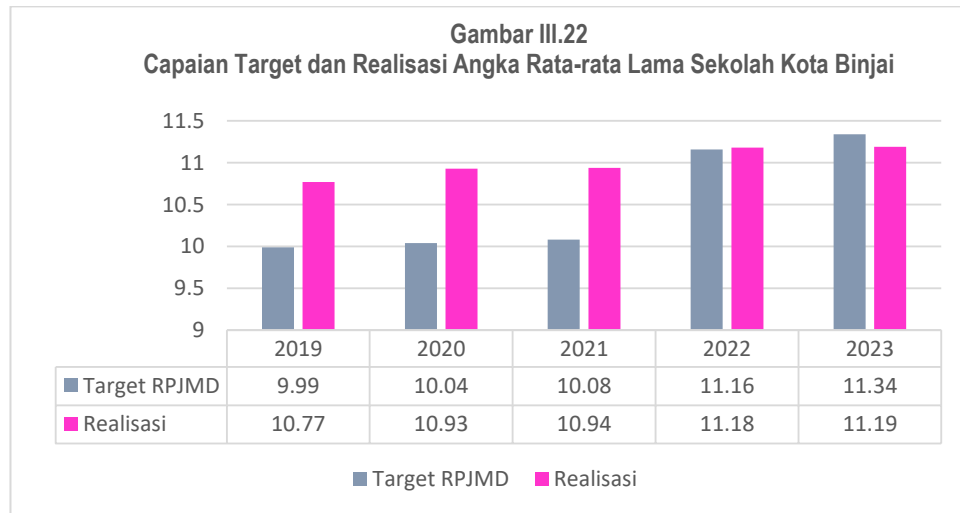
Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan grafik di atas, Angka Rata-rata Lama Sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Binjai menunjukkan peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Kota Binjai masih jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah Kota Binjai sebesar 11,19 tahun sedang Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,82 tahun. Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai rata-rata lama sekolah Kota Binjai meningkat cukup signifikan dan pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah di Kota Binjai belum mencapai target kinerja yang ditetapkan didalam dokumen RPJMD. Angka rata-rata lama sekolah ini menjadikan bahan evaluasi kinerja pemerintah untuk



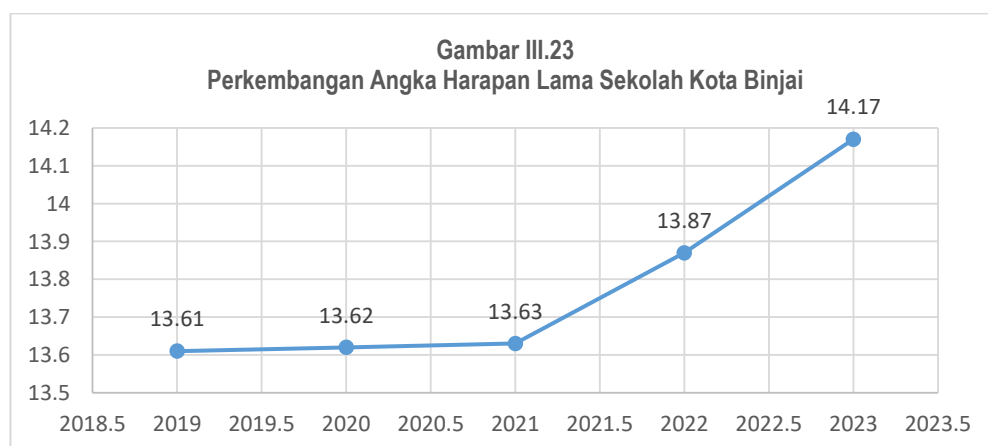
lebih meningkatkan kinerja bidang pendidikan melalui program-program peningkatan kualitas pendidikan.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Angka Harapan Lama Sekolah

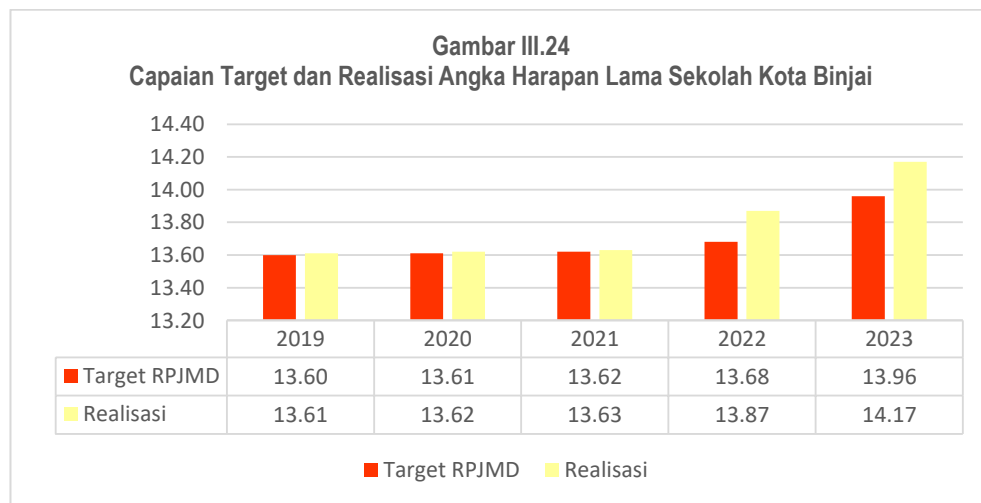
Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS



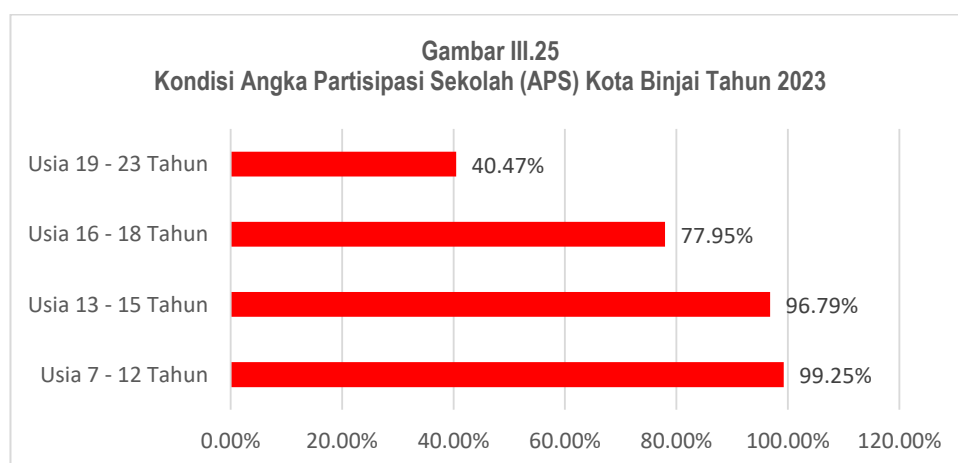
Harapan Lama Sekolah Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebesar 14,17 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester II). Perkembangan nilai HLS selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dengan nilai realisasi diatas target RPJMD yang ditetapkan.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu dikali 1.000 atau bisa juga dinyatakan dalam persen.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

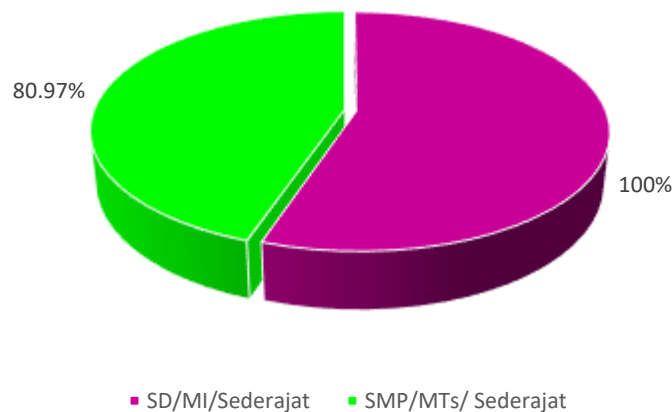


Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa dari dari keempat kelompok usia, APS usia 7-12 tahun menunjukkan peningkatan yang paling tertinggi, yaitu 99,25 persen pada tahun 2023, dan diikuti oleh APS usia 13-15 tahun sebesar 96,79 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu. Nilai ideal APM adalah 100%, bila lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, dan adanya siswa yang mengulang atau tidak naik kelas. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang yang sesuai.

Gambar III.26
Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Binjai Tahun 2023



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2024

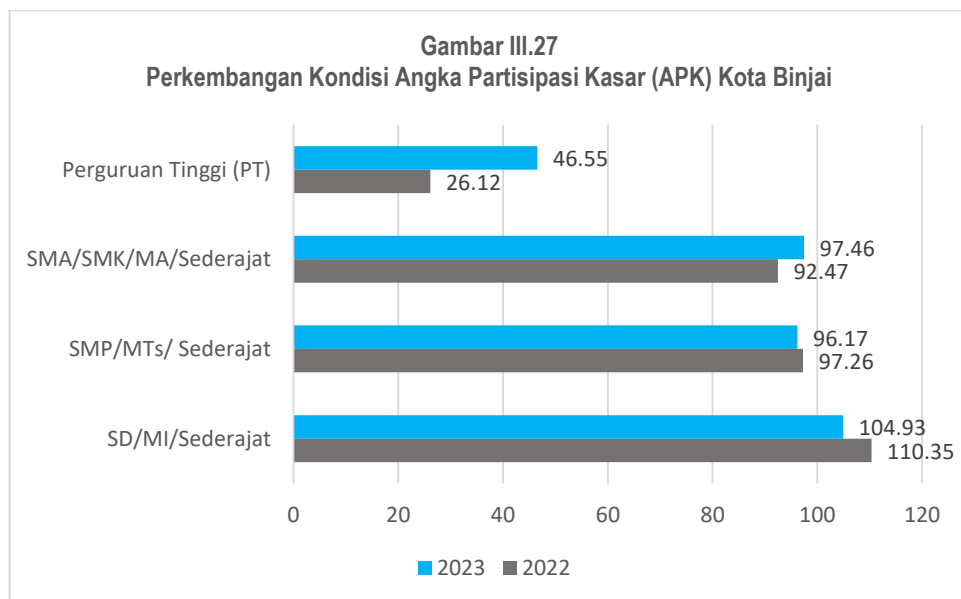
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan APM murid di Kota Binjai, tertinggi adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat yakni 100 persen, diikuti jenjang pendidikan SMP/Sederajat yakni 80,97 persen. Informasi APM ini menggambarkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah (usia SD/Sederajat dan SMP/Sederajat) yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah tingkat APM nya. Dengan demikian, proporsi murid yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi juga semakin mengecil. Jika diperhatikan lebih lanjut ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diduga



karena ketidakmampuan ekonomi dan atau karena ada murid yang sudah terjun ke pasar kerja, sehingga minat untuk melanjutkan sekolah menjadi rendah.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria: makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, wilayah kota atau wilayah perbatasan. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa angka partisipasi kasar murid (APK) di Kota Binjai tertinggi pada jenjang pendidikan SD/Sederajat pada tahun 2023 yaitu sebesar 104,93 persen diikuti SMP/Sederajat sebesar 96,17 persen. Angka partisipasi kasar yang melebihi 100 persen ini menunjukkan bahwa Kota Binjai mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel III.10** dan **Lampiran I**



Tabel III.10
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Indeks Pendidikan	Poin	76.66
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.19
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.17
4	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	21.73
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80.97
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	
9	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99.84
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99.68
13	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97.7
14	Jumlah Muatan Lokal dalam Kurikulum (Seni Budaya)	Angka	3
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Orang	3203
16	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	50
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI)	%	1:20
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	%	1:20
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	%	1:28
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)	%	1:32
21	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	%	99.1
22	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	%	99.5
23	Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	%	99.6
PAUD			
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	sekolah	79
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	108
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	sekolah	272
5	Jumlah pendidik pada PAUD	orang	682
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidik anak usia dini	orang	405



7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	orang	92
	SD dan SMP		
8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		109
	SD	sekolah	95
	SMP	sekolah	14
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	orang	
10	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	9390
12	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Jenjang sekolah dasar	sekolah	2453
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sekolah	1499
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	2499
15	Jumlah pncidilk pada Jenjang sekolah menengah pertama	orang	1453
16	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	336
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	108
18	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	398
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	286
20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik	orang	3053
21	Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat. (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik	orang	1150
22	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	148
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	46
24	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	122
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	122
	PENDIDIKAN KESETARAAN		



26	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	sekolah	8
27	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	orang	1190

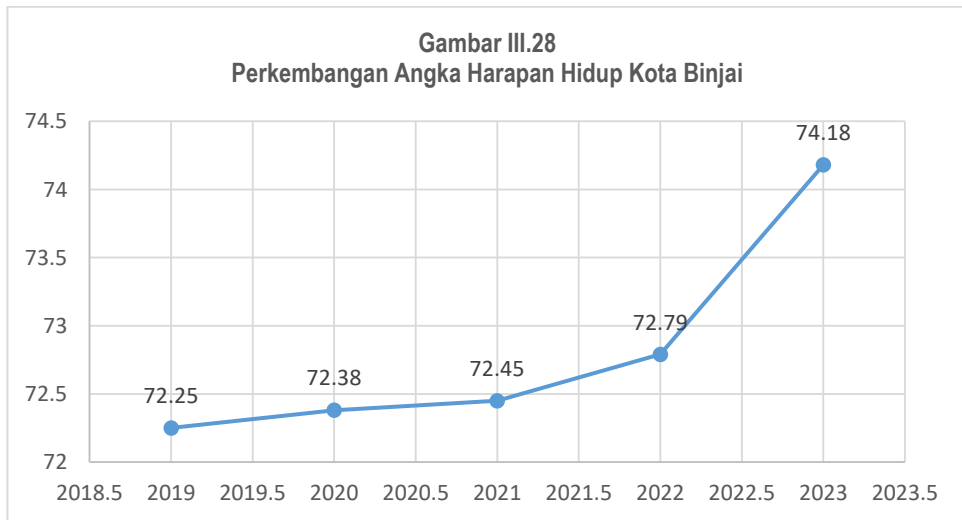
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan perlu memperhatikan fasilitas, sebab fasilitas tersebut akan menjadi tolok ukur untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah.

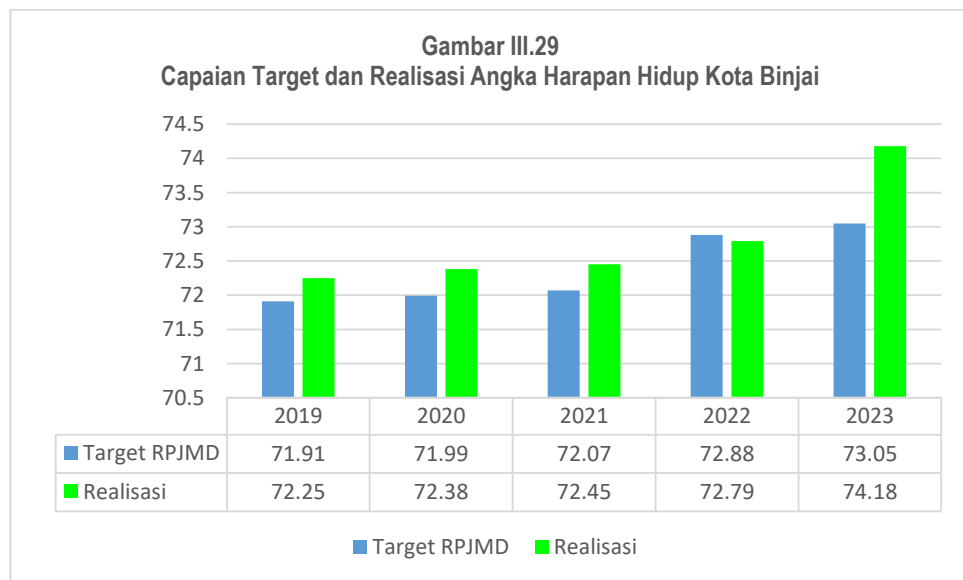


Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 AHH di Kota Binjai telah mencapai 74,18 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi



peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Terlihat perkembangan angka harapan hidup penduduk di Kota Binjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan dapat dikatakan bahwa angka harapan hidup di Kota Binjai tergolong cukup baik. Berdasarkan tren tersebut, terlihat bahwa rata-rata lamanya hidup penduduk di Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebesar 74,18 tahun atau sekitar 73 - 74 tahun. Peningkatan angka harapan hidup selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat kenaikan taraf hidup masyarakat di Kota Binjai walaupun angka harapan hidup bukan satu - satunya indikator penentu tingkat kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan daerah. Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Untuk fasilitas Puskesmas di Kota Binjai pada tahun 2023 berjumlah 8 unit, dimana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka untuk kebutuhan 1 puskesmas melayani sebanyak 37.909 jiwa. Untuk fasilitas



kesehatan Rumah sakit dan puskesmas pembantu di Kota Binjai pada tahun 2023 sebanyak 12 unit dan 17 unit.

Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan indikator utama peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia. Selain itu, kualitas dan kuantitas tenaga medis baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya juga harus memenuhi kriteria standar minimal sehingga pencapaian kehidupan yang layak bagi masyarakat bisa terpenuhi. Fasilitas rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Binjai sampai tahun 2023 hanya berjumlah 2 unit yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Daerah yaitu RSUD Dr. RM Djoelham dan 1 unit lagi merupakan Rumah Sakit TNI. Jika dilihat dari rasio jumlah rumah sakit yang dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka 1 unit rumah sakit melayani sebanyak 25.273 jiwa.

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Binjai pada tahun 2023, jumlah daya tampung tempat tidur sebanyak 1.075 tempat tidur

Tabel III. 11

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Binjai

No	Uraian	Tahun 2023	Jumlah Penduduk	Rasio Ketersediaan Fasilitas
1	Jumlah Rumah Sakit	12	303,272	1 : 25.273
2	Jumlah Puskesmas	8	303,272	1 : 37.909
3	Jumlah Pustu	17	303,272	1 : 17.840

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS dan hasil analisa

Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Binjai, pada tahun 2023 terdapat 10 unit Rumah sakit rujukan yang terakreditasi dari 12



unit rumah sakit yang terdapat di Kota Binjai. Sehingga persentase rumah sakit rujukan yng terakreditasi sebesar 83,33 persen.

Tabel III.12

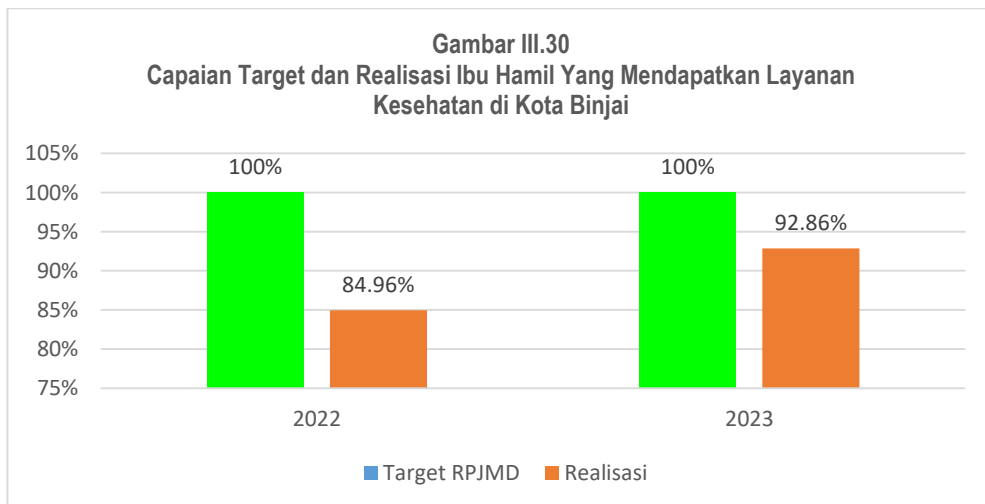
Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi tahun 2023

No	Nama Rumah Sakit	Satus Akreditasi
1	RS Bidadari	Sudah
2	RS Arta Medika	Sudah
3	RS Tentara Binjai	Sudah
4	RS Bangkatan	Sudah
5	RS Sylvani	Sudah
6	RS Latersia	Sudah
7	RS DR RM Djoelham Binjai	Sudah
8	RS OG Hospital	Sudah
9	RS Ratu Mas	Sudah
10	RS Al Fuadi	Sudah
11	RS Raskita	Belum
12	RS Gren Fatimah	Belum

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

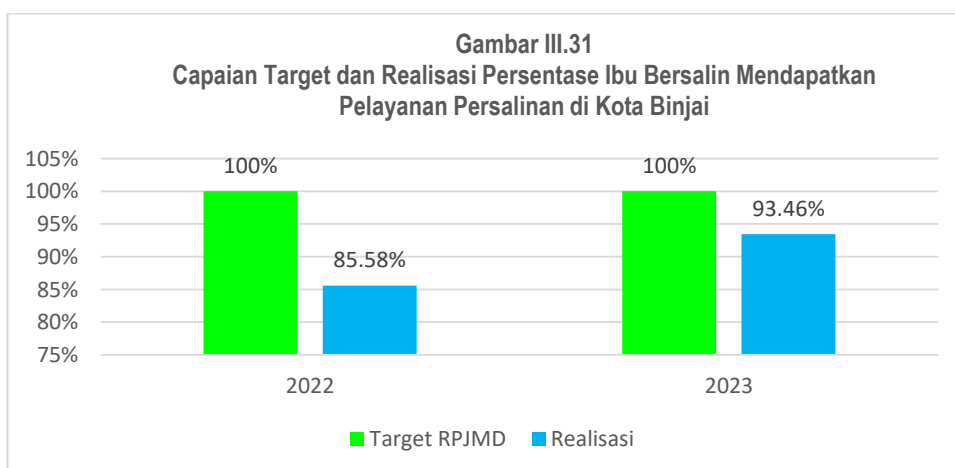
Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Pemeriksaan ini bertujuan memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, dengan frekuensi kunjungan 4 kali selama kehamilannya, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga. Pada tahun 2023, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Binjai sebesar 92,86 persen, dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.685 orang dari jumlah ibu hamil di Kota Binjai sebanyak 5.045 orang. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 84,96 persen mengalami kenaikan sebesar 7,90 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk pelayanan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang kedua adalah Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Ini menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan dan jajarannya) memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Cakupan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 93,46 persen dengan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sebanyak 4.500 orang dan jumlah ibu bersalin sebanyak 4.815 orang. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2022 sebesar 85,58 persen mengalami kenaikan sebesar 7,88 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk pelayanan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

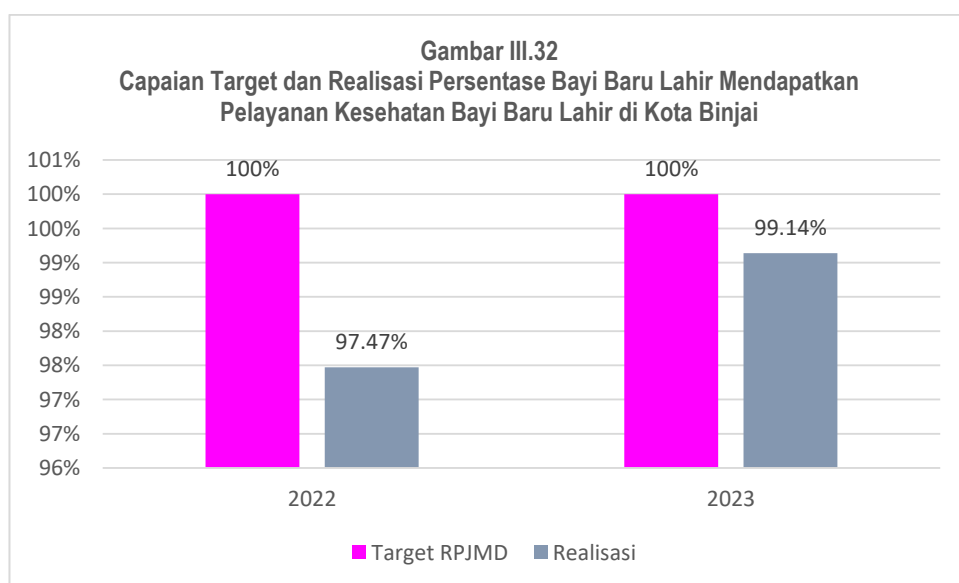


Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir antara lain:

1. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
2. Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

Persentase cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 99,14 persen dari jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 4.499 bayi dari jumlah bayi baru lahir sebanyak 4.586 bayi. Persentase cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada 2022 sebesar 97,47 mengalami kenaikan sebesar 1,67 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

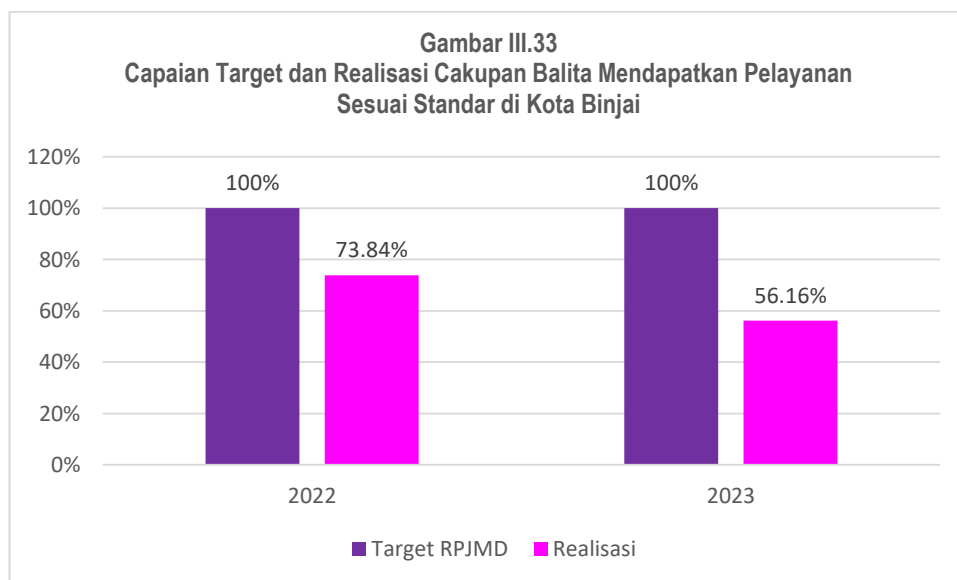


Cakupan Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi :

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun;
2. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun; dan
3. Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase Cakupan Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 56,16 persen dengan jumlah balita mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 12.406 balita dari jumlah balita di Kota Binjai sebanyak 22.089 balita. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

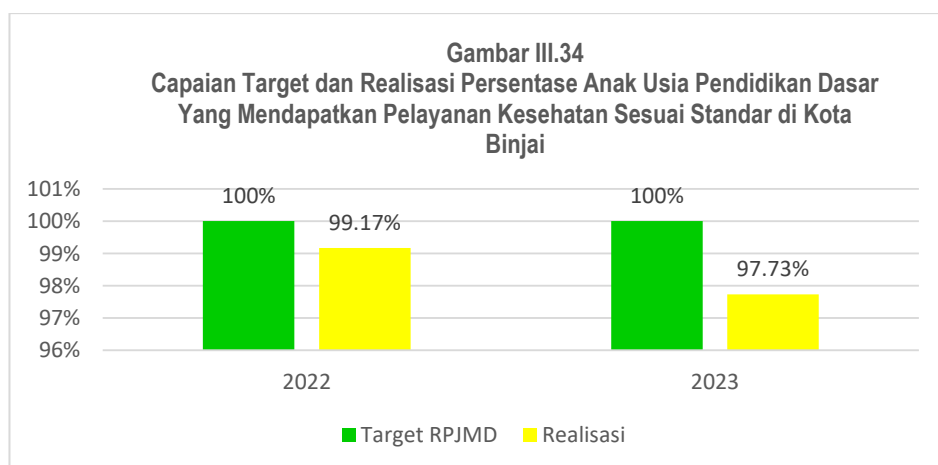


Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

1. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
2. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
 - b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
 - c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
 - e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;
3. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Persentase Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 97,73 persen dengan jumlah anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.675 anak dari jumlah anak di Kota Binjai sebanyak 5.807 anak. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

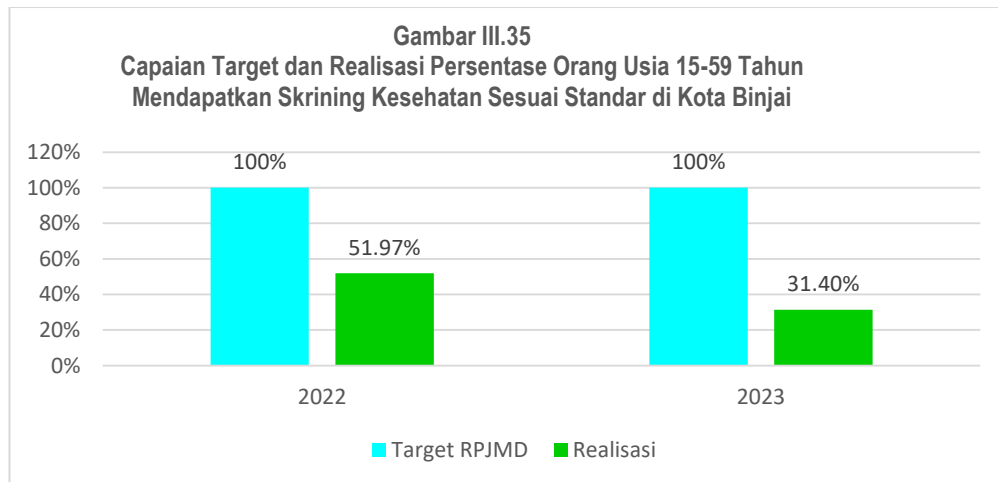


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024



Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 31,40 persen dengan jumlah orang usia produktif 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 60.961 orang dari jumlah orang usia produktif 15-59 tahun di Kota Binjai sebanyak 194.118 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan Anak Usia usia produktif 15-59 tahun sesuai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

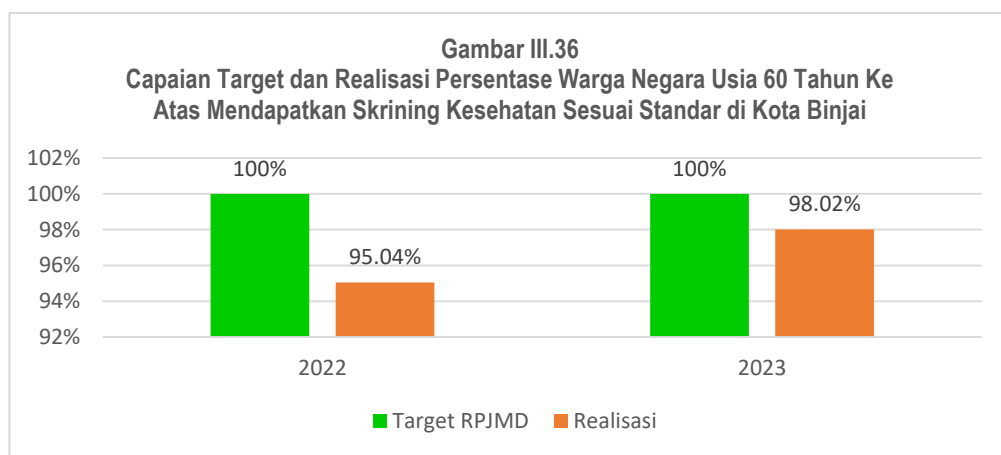
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diperingati setiap tanggal 29 Mei. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Masalah kesehatan pada lanjut usia berawal dari kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakit pun meningkat. Masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak, dll. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dsb.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara



sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif.

Persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 98,02 persen dengan jumlah orang usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 28.283 orang dari jumlah orang usia 60 tahun di Kota Binjai sebanyak 28.854 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar sesuai standar.



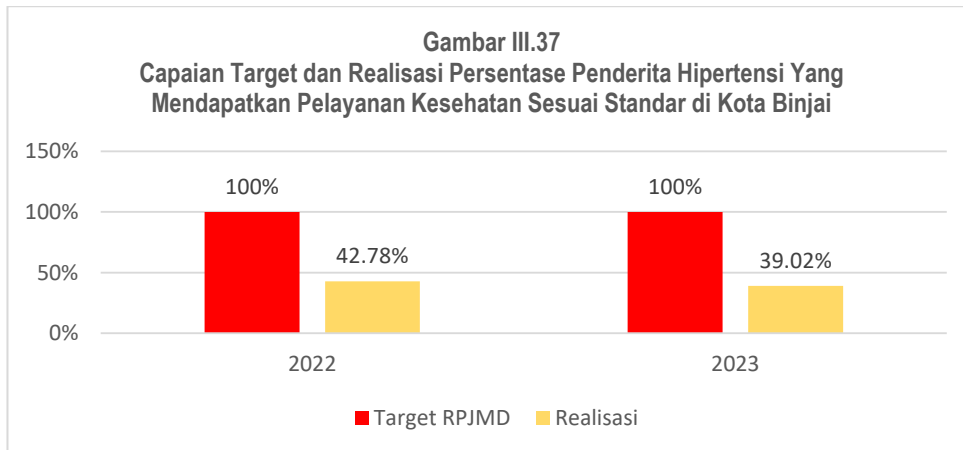
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun meliputi :

1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 39,02 persen dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 26.012 orang dari jumlah penderita hipertensi di Kota Binjai sebanyak 66.669 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar.



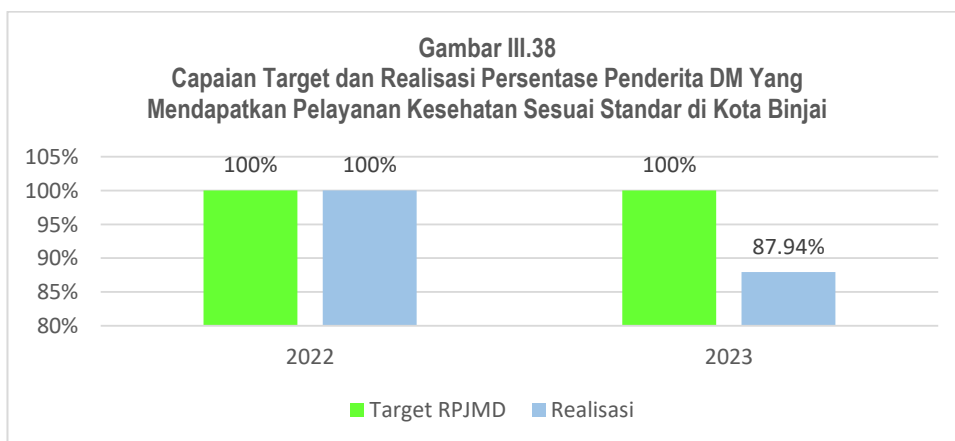
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase penderita DM Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi :

1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi;
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 87,94 persen dengan jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.883 orang dari jumlah penderita Diabetes Melitus di Kota Binjai sebanyak 6.690 orang. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus sesuai standar.



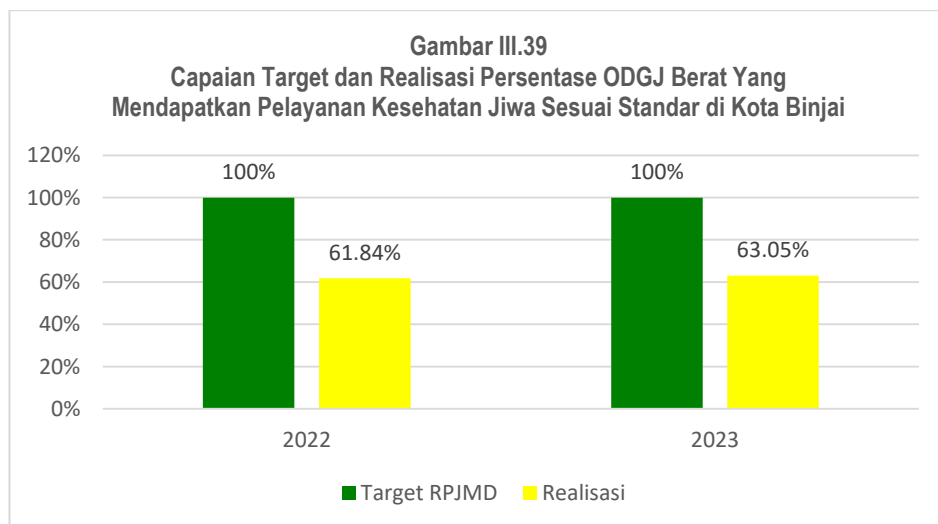
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024



Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik akut dan skizofrenia) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 63,05 persen dengan jumlah gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 256 orang dari jumlah gangguan jiwa berat di Kota Binjai sebanyak 406 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

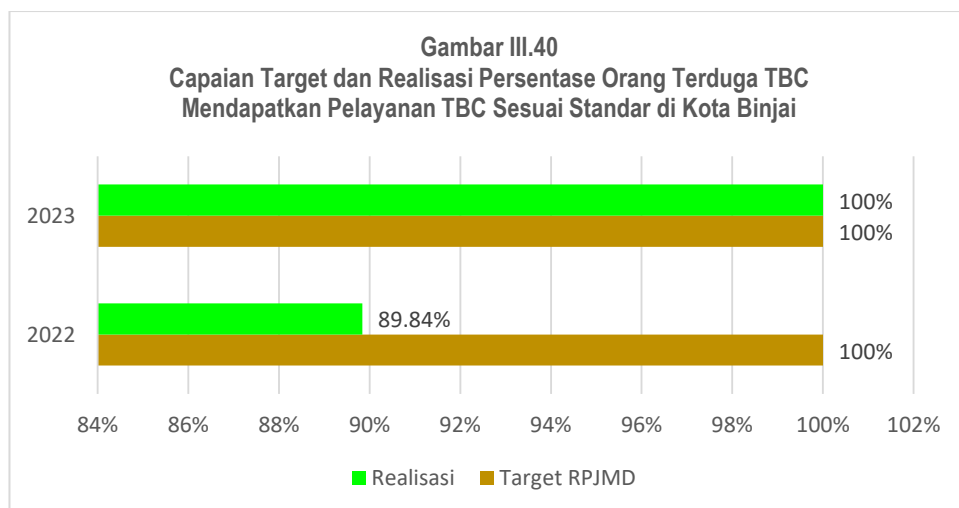
Terduga tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan panas badan. Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberculosi. Kasus tuberkulosis :



- Pasien tuberkulosis yang terkonfirmasi Bakteriologis, yaitu pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan.
- Pasien tuberkulosis terdiagnosis secara Klinis yaitu pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien tuberkulosis aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan pengobatan tuberkulosis.

Kasus tuberkulosis anak adalah Kasus tuberkulosis pada anak usia 0-14 tahun. Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (Case Notification Rate/CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Cakupan pengobatan semua kasus tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR) yang diobati adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden). Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis dihitung dengan menggunakan pemodelan mathematic. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak adalah Jumlah seluruh kasus tuberkulosis anak yang ditemukan di antara perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak yang ada disuatu wilayah dalam periode tertentu. Perkiraan jumlah kasus tuberkulosis anak adalah 12% dari perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga TB sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 100 persen dengan jumlah terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8.061 orang dari jumlah penderita TB di Kota Binjai sebanyak 5.350 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga TB sesuai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024

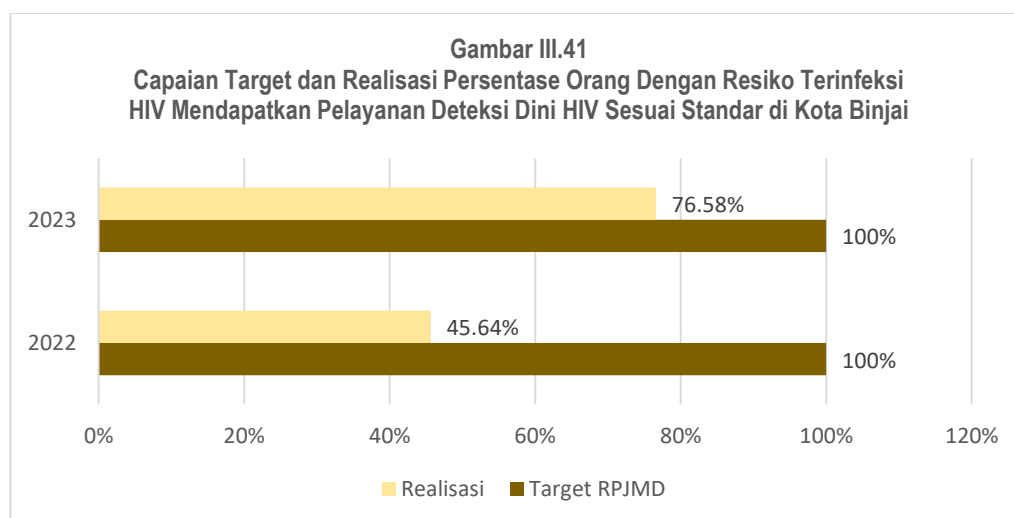


Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah SPM ke 12 yaitu pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh. Tidak seperti virus lainnya, tubuh manusia (sampai saat ini) tidak bisa menyingkirkan HIV sepenuhnya. Jika sudah terinfeksi HIV, maka virus tersebut akan bersarang pada tubuh seseorang sepanjang hidup.

Meskipun seseorang tidak menunjukkan gejala apapun, seseorang masih dapat menularkan virus ke orang lain. Biasanya gejala karena HIV dapat terdeteksi sekitar 2 sampai 15 tahun dalam setelah terpapar virus HIV. Seseorang yang terjangkit HIV masih terlihat sehat dan berfungsi secara normal. Biasanya orang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah sudah terjangkit HIV atau tidak sampai ada hasil pemeriksaan. HIV tidak langsung merusak organ tubuh, tetapi akan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan terjadi berbagai penyakit lainnya, terutama penyakit infeksi.

Persentase Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 76,58 persen dengan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 7.387 orang dari jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Binjai sebanyak 9.646 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 100 persen untuk cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2024



Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Tabel III.13 dan Lampiran I

Tabel III.13

Pencapaian Standar Minimal Bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	5,184	4,685
2	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	85.00	92.86
3	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	5,485	4,500
4	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	86	93.46
5	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	5,470	4,499
6	Perentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	97.00	99.14
7	Jumlah Balita yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	13,025	12,406
8	Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	74.00	56.16
9	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	7,627	5,675
10	Persentase Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Persen	99.00	97.73
11	Jumlah Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	114,274	60,961
12	Persentase Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	51.00	31.40
13	Jumlah Warga Negara usia lanjut (60 tahun keatas) yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	44,344	28,283
14	Persentase Warga Negara usia lanjut (60 tahun keatas) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	95.00	98.02
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	28,130	26,012
16	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	persen	42.00	39.02
17	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	6,975	5,883
18	Persentase Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100.00	87.94
19	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa yang berat yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	235	256
20	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa yang berat yang mendapat layanan kesehatan	Persen	61.00	63.05
21	Jumlah Warga Negara terduga tubercolosis yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	4,226	8,061



22	Persentase Warga Negara terduga tubercolosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	90.00	100.00
23	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	4,104	7,387
24	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	45.00	76.58

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai

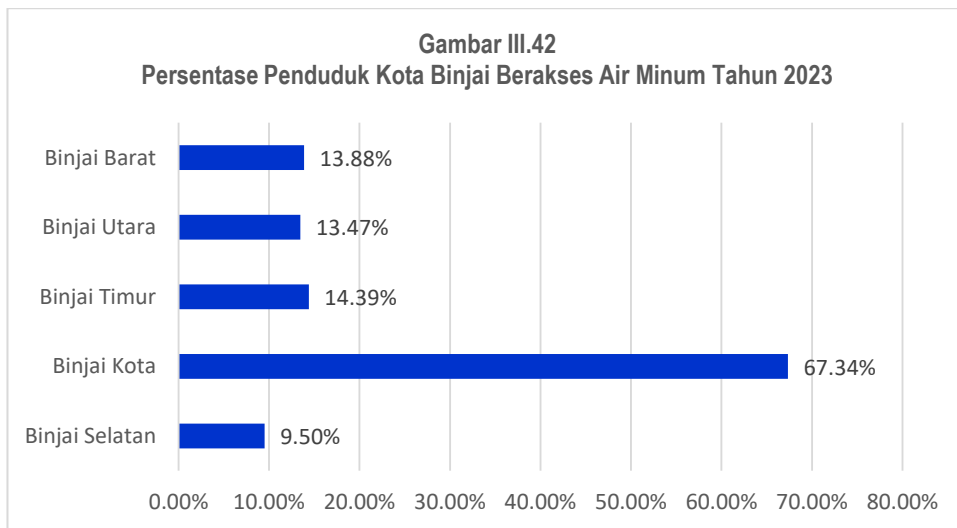
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Hadirnya pembangunan infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat sehingga keberadaannya berhubungan dan berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Persentase penduduk berakses air minum

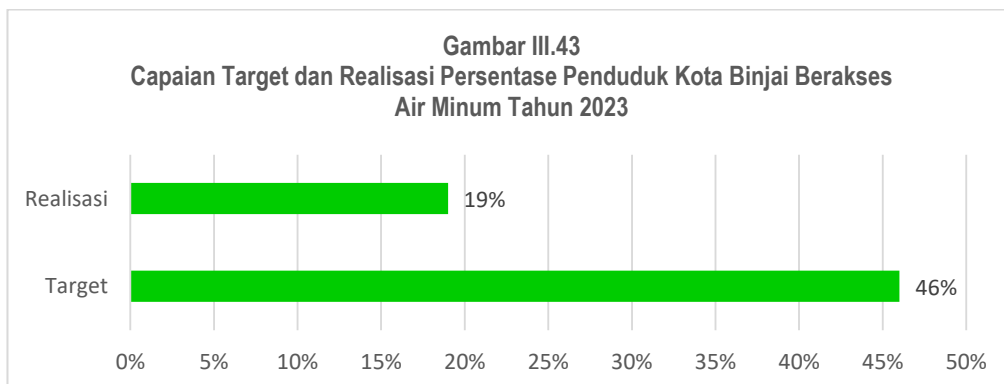
Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air merupakan sumber daya alam yang paling utama digunakan manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa mengetahui syarat air minum yang layak dikonsumsi oleh tubuh. Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan peraturan Menkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Syarat Air Minum Layak Konsumsi. Adapun kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi, harus memenuhi dua parameter standar, yakni wajib dan tambahan.

Wilayah Kota Binjai yang paling banyak mendapatkan pelayanan air minum adalah Kecamatan Binjai Kota dengan persentase penduduk terlayani air minum sebesar 67,34 persen, sedangkan wilayah yang paling sedikit mendapat pelayanan air minum terdapat pada Kecamatan Binjai Selatan sebesar 9,50 persen.



Sumber : PDAM Tirta Sari Kota Binjai Tahun 2024

Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2023 sebesar 12.952 sambungan rumah dari jumlah penduduk Kota Binjai sebesar 303.272 jiwa sehingga penduduk berakses air minum sebesar 19 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 46 persen untuk persentase penduduk berakses air minum.



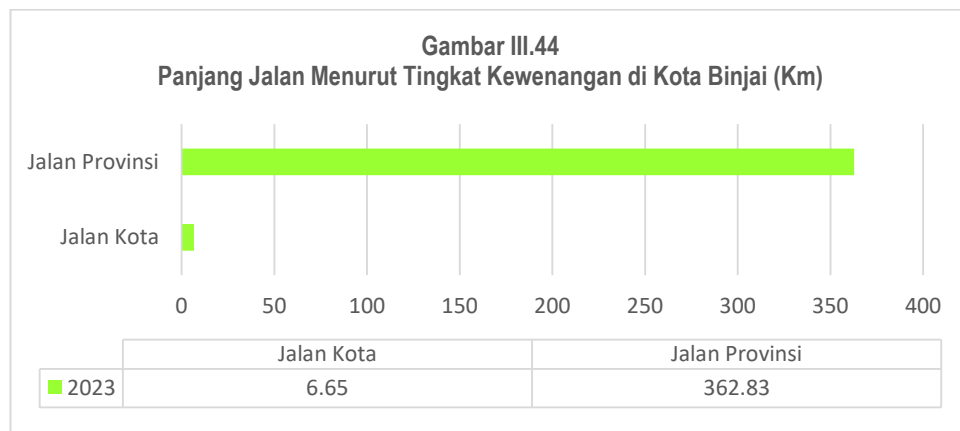
Sumber : PDAM Tirta Sari Kota Binjai Tahun 2024

Status Jalan di Kota Binjai

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.



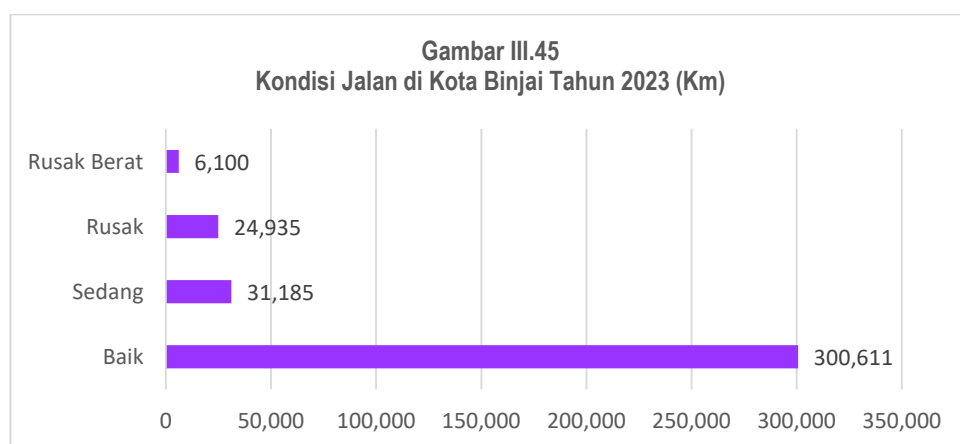
Sarana perhubungan merupakan salah satu prasyarat vital bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, guna menunjang mobilisasi, aktivitas ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kota Binjai dengan status perkotaan sangat dominan dipengaruhi oleh transportasi dan komunikasi sebagai penunjang dalam aktivitas ekonominya. Pada tahun 2023, panjang provinsi di Kota Binjai mencapai 6.65 km, dengan panjang jalan kota mencapai 362.83 km.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Kondisi Jalan

Panjang jalan kota dengan kondisi mantap (baik dan sedang) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan kota serta adanya dukungan program dari provinsi maupun pusat. Total panjang jalan kota adalah 362,831 km. Jalan kota dengan kondisi mantap ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

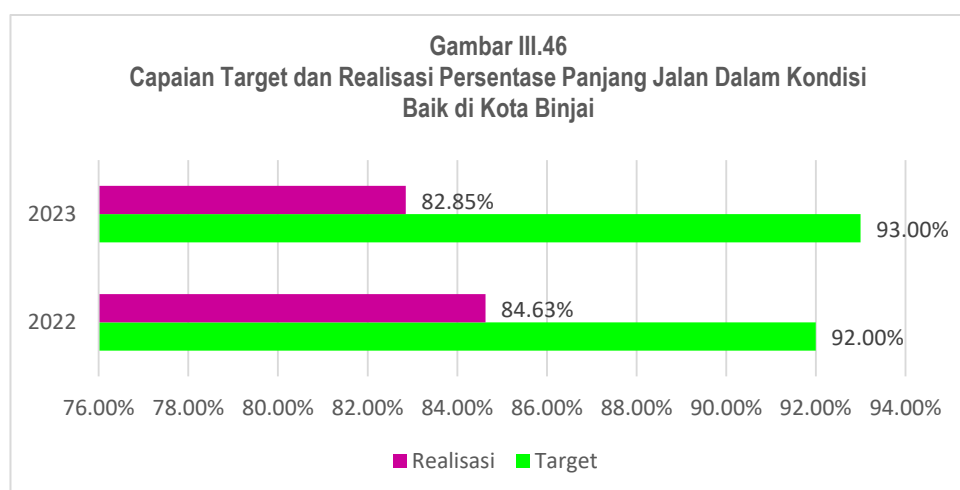
1. Jalan Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$),



sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

2. Jalan Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-1%). Kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu lintas.
3. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10-20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, terkadang harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
4. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Secara umum kondisi jalan di Kota Binjai sudah dalam kondisi baik. Selama 4 tahun terakhir proporsi kondisi jalan baik mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 proporsi jalan dengan kondisi baik sebesar 82,85 persen. Meskipun menunjukan trend yang meningkat tetapi belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 93 persen pada tahun 2023.

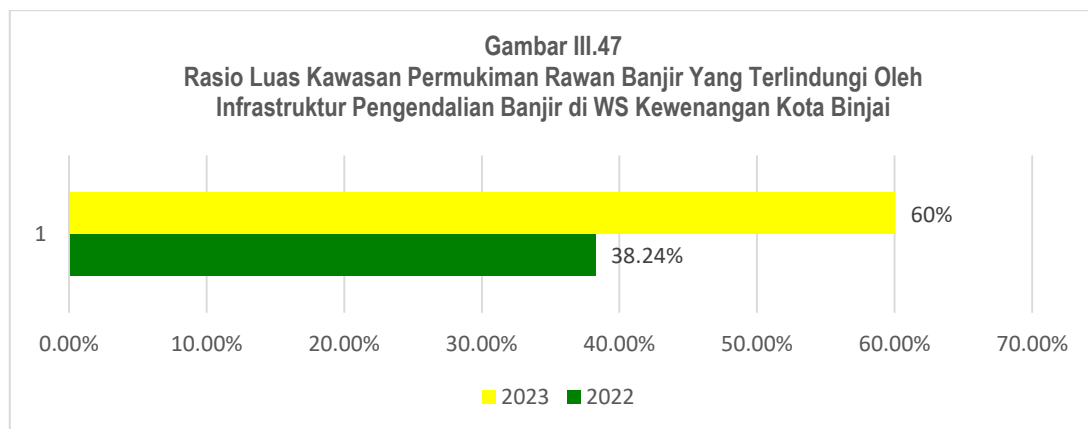


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai tahun 2024



Wilayah Rawan Banjir

Kota Binjai memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS wampu dan sebagian kecil wilayah daerah timur termasuk ke dalam DAS belawan. Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan. Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang keduanya Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Kondisi Kota Binjai yang oleh tiga sungai diidentifikasi sebagai wilayah rawan banjir yang diakibatkan oleh limpahan debit air sungai. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 60 persen.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada **Lampiran I**.

Tabel III.14

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
WILAYAH SUNGAI			
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten/Kota	Ha	6,000
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	m	15,000



3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota	Ha	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota	m	
5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber Daya air WS kewenangan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada
6	Rencana Teknis tata pengaturan dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada
7	Data sarana dan prasarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada/Tidak	
JALAN			
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Km	362,831
2	Panjang Jalan yang dibangun		
3	Panjang Jembatan yang dibangun		
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	8.75
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Km	0.54
7	panjang jembatan yang direhabilitasi		
8	Panjang jalan yang dipelihara	Km	7.2
9	Panjang jembatan yang dipelihara		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota	%	60
	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota		
	----- x 100 %		
	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota		
7	Tingkat Kemantapan jalan kab/kota	Persen	91.44
	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap		331,796
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah total panjang jalan kab/kota		362,831

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Tahun 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan



rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Ketersediaan Rusunawa

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Binjai juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kota Binjai telah memiliki 1 bangunan Rusunawa.

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran I.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintahan memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat (protective function). Perlindungan kepada masyarakat berfungsi sebagai usaha dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban, rasa tenteram, dan rasa aman kepada masyarakat.

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Jumlah satgas yang terlatih dan dikukuhkan di Kota Binjai pada tahun 2022 sebanyak 50 orang, mengalami peningkatan jumlah satgas pada tahun 2023 sebanyak 247 orang dengan jumlah satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 1 orang.

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana



pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satgas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

Tabel III.15
Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan yang Terjadi di Kota Binjai Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran/Pengaduan	Jumlah Pelanggaran/Pengaduan yang Diterima	Jumlah Pelanggaran/Pengaduan yang Terselasaikan
1	Izin Ternak	5	5
2	Izin Mendirikan Bangunan	25	25
3	Penertiban PKL	11	11
4	Penertiban Spanduk/APK	17	17
5	Rajiah Kasih Sayang	12	12
6	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	13	13
7	Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	35	35
8	Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	2
	Jumlah	120	120

Sumber : Satpol PP Kota Binjai Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, jumlah pelanggaran/pengaduan yang terjadi di Kota Binjai pada tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) jenis pelanggaran/pengaduan dengan jumlah pelanggaran/pengaduan yang dapat terselesaikan sebanyak 120 kasus dengan persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100 persen.

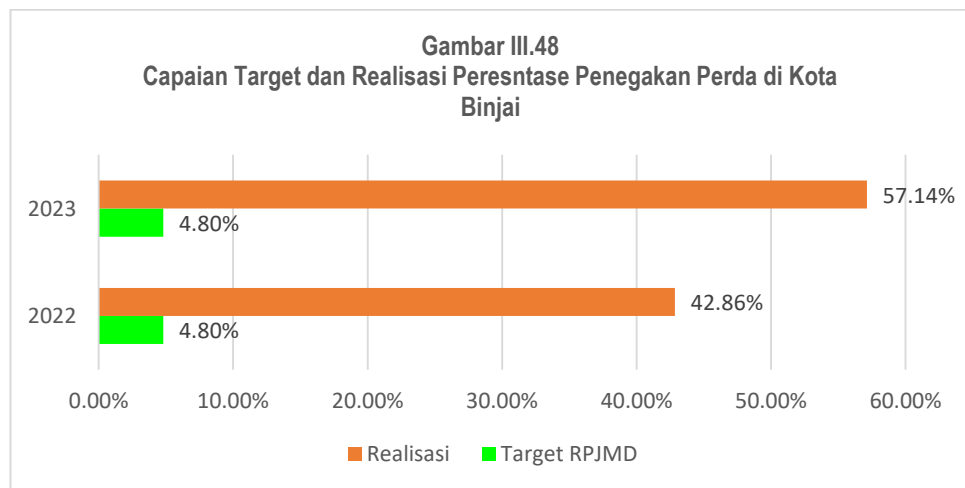
Persentase penegakan Perda

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di



Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 42,86 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 57,14 persen. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 4 (empat) perda, dengan, jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 7 (tujuh) perda pada tahun 2023. Angka ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 4,8 persen untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, 2024

Pelayanan yang dilakukan Satpol PP terhadap masyarakat atau warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda merupakan bentuk pelayanan dasar yang diberikan. Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kapasitas sumberdaya manusia yang baik, sehingga tidak ada masyarakat atau warga negara yang akan terkena dampak terhadap penegakan Perda.

Tabel III.16
Perda/Perkada yang Ditegakkan dan Memuat Sanksi

No	Jenis Perda/Perkada
	PERDA/PERKADA YANG DIPAKAI
1	Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2	Perda Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3	Perda Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



4	Perda Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
6	Perwal Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
7	Perwal Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai
PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI	
1	Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2	Perda Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3	Perda Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4	Perwal Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai

Sumber : Satpol PP Kota Binjai Tahun 2024

Mengenai capaian kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Satpol PP Kota Binjai dapat dilihat pada tabel III.17 dan **Lampiran I**.

Tabel III.17

Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100
	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	$\frac{120}{120} \times 100 \%$	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	57.14
	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$	$\frac{4}{7} \times 100 \%$	
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Kasus	120
2	Jumlah Satgas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	247
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	7
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	1
5	Tersedianya SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	20
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Unit	23

Sumber : Satpol PP Kota Binjai Tahun 2024



Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)/Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Komponen waktu yang dihitung dalam Response time ini adalah: waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan. Berhubungan dengan Response time ada beberapa hal yang menentukan, antara lain:

1. Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran;
2. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
3. Kesadaran dan persepsi terhadap response time termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai menetapkan response time pelayanan pemadaman adalah 15 menit, dengan rincian:

1. Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit;
2. Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran selama 5 menit;
3. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman (penyemprotan) 5 menit.

Perlu dipahami sehubungan dengan penentuan Response time 15 menit ini adalah bahwa berawal dari response time ini maka direncanakan penentuan lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan response time 15 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti response time ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sara/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai. Karena semakin cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam melayani masyarakat.



Tabel III.18
Kejadian Bencana Kota Binjai Tahun 2023

Tanggal	Kecamatan		Jenis Bencana	KK/Jiwa
Sabtu, 11 Maret 2023	1	Binjai Selatan		
	a.	Kel. Rambung Barat		
		Lingkungan III	Banjir	45/180
		Lingkungan V	Banjir	60/240
		Lingkungan VI	Banjir	15/60
	b.	Kel. Rambung Timur	Banjir	
		Lingkungan III	Banjir	67/268
		Lingkungan IV	Banjir	50/200
	c.	Kel. Binjai Estate	Banjir	
		Lingkungan X	Banjir	30/120
	2	Binjai Kota		
	a.	Kel. Kartini	Banjir	
		Lingkungan VI	Banjir	7/28
	b.	Kel. Setia	Banjir	
		Lingkungan I	Banjir	10/40
		Lingkungan II	Banjir	9/36
		Lingkungan III	Banjir	80/320
		Lingkungan IV	Banjir	116/464
		Lingkungan V	Banjir	138/552
		Lingkungan VI	Banjir	80/320
	3	Binjai Timur		
	a.	Kel. Mencirim	Banjir	
		Lingkungan I	Banjir	76/304
		Lingkungan II	Banjir	15/60
		Lingkungan VI	Banjir	14/56
		Lingkungan VII	Banjir	3/12
		Lingkungan IX	Banjir	2/8
Senin, 20 Maret 2023	1	Binjai Selatan		
	a.	Rambung Barat	Putting Beliung	2/8
	b.	Binjai Estate	Putting Beliung	20/80
	2	Binjai Kota		
	a.	Tangsi	Putting Beliung	23/92
	b.	Satria	Putting Beliung	2/8
	c.	Setia	Putting Beliung	7/28
	d.	Berngam	Putting Beliung	24/96
	3	Binjai Barat		
	a.	Limau Mungkur	Putting Beliung	7/28



		Binjai Timur		
	a.	Tanah Tinggi	Putting Beliung	2/28
	4	Binjai Utara		
	a.	Nangka	Putting Beliung	5/20
	b.	Pahlawan	Putting Beliung	14/56
Jumat, Oktober 2023	1	Binjai Selatan		
	a.	Rambung Timur		
		Lingkungan I	Bencana Banjir	77/195
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	67/158
	b.	Rambung Dalam		
		Lingkungan II	Bencana Banjir	22/76
		Lingkungan VI	Bencana Banjir	6/20
		Lingkungan VII	Bencana Banjir	9/34
	2	Binjai Kota		
	a.	Setia		
		Lingkungan II	Bencana Banjir	7/28
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	200/800
		Lingkungan V	Bencana Banjir	138/552
		Lingkungan VI	Bencana Banjir	98/392
	b.	Tangsi		
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	19/66
	c.	Bergam		
		Lingkungan XII	Bencana Banjir	11/44
	3	Binjai Timur		
	a.	Mencirim		
		Lingkungan I	Bencana Banjir	153/612
		Lingkungan II	Bencana Banjir	118/472
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	23/92
		Lingkungan V	Bencana Banjir	3/12
		Lingkungan VI	Bencana Banjir	17/68
		Lingkungan VII	Bencana Banjir	10/40
		Lingkungan IX	Bencana Banjir	5/20
	4	Binjai Utara		
	a.	Kebun Lada		
		Lingkungan V	Bencana Banjir	22/86
Senin, 27 November 2023	1	Binjai Selatan		
	a.	Rambung Timur		
		Lingkungan I	Bencana Banjir	77
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	67
	b.	Rambung Dalam		



		Lingkungan II	Bencana Banjir	22
		Lingkungan V	Bencana Banjir	6
		Lingkungan VII	Bencana Banjir	9
	2	Binjai Kota		
	a.	Tangsi		
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	19
	b.	Bergam		
		Lingkungan X	Bencana Banjir	12
		Lingkungan XII	Bencana Banjir	8
		Lingkungan XIII	Bencana Banjir	4
	3	Binjai Timur		
	a.	Mencirim		
		Lingkungan I	Bencana Banjir	151
		Lingkungan II	Bencana Banjir	118
		Lingkungan IV	Bencana Banjir	23
		Lingkungan V	Bencana Banjir	3
		Lingkungan VI	Bencana Banjir	17
		Lingkungan VII	Bencana Banjir	10
		Lingkungan IX	Bencana Banjir	5
	4	Binjai Utara		
	a.	Kebun Lada		
		Lingkungan V	Bencana Banjir	45
	5	Binjai Barat		
	a.	Bandar Sinembah		
		Lingkungan I	Bencana Banjir	3
		Lingkungan II	Bencana Banjir	6
		Lingkungan III	Bencana Banjir	3
	b.	Payaroba		
		Lingkungan VI	Bencana Banjir	24
TOTAL				9.743 Jiwa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2024

Pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability)



yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 100 persen. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kota Binjai sebanyak 295.361 jiwa. Sedangkan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2023 sebesar 15,11 persen. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 11.680 jiwa dengan jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak 77.306 jiwa.

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2023 sebesar 100 persen dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 3.767 jiwa.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kebijakan sosial dibutuhkan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Kebijakan sosial sesungguhnya merupakan instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan berbagai tunjangan sosial lainnya. Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Program urusan sosial yang dilaksanakan oleh OPD terurai sebagai berikut:



1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Taman Makan Pahlawan

Jumlah PMKS yang tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2023 sebanyak 231 orang.

Tabel III.19

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani di Kota Binjai Tahun 2023

No	Katagori	Jumlah
1	Gepeng	7 Orang
2	Penyandang Disabilitas	171 Orang
3	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3 Orang
4	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	33 Orang
5	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	17 Orang
Jumlah		231 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2023

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Meninjau ketersediaan sarana sosial di Kota Binjai terdapat 9 unit panti asuhan dan 1 unit rumah rehabilitasi pada tahun 2023. Kedepan perlu dipertimbangkan untuk peningkatan sarana sosial di Kota Binjai.



Tabel III.20

Banyaknya Panti Asuhan dan Penghuninya di Kota Binjai Tahun 2023

No	Panti Asuhan	Kapasitas (orang)	Penghuni (Orang)
1	Al-Washliyah		
	Putra	60	55
	Putri	60	60
3	UPTD Gepeng		
4	Nahdatul Islam		
	Putra	50	17
	Putri	30	23
5	An Nursali		
	Putra	125	118
	Putri		
6	Gnade		
	Putra	30	11
	Putri	30	4
7	Darul Furqon		
	Putra	40	25
	Putri	20	5
8	Dar Fatimah		
	Putra	50	29
	Putri	12	9
9	Sumber Pengharapan Mulia		
	Putra	30	8
	Putri	30	7
10	Rehabilitasi Rumah Sehat Harapan		
	Putra		
	Putri		

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Penerima Bantuan Sosial

Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan sosial pangan sebanyak 116 orang, dimana kecamatan yang paling banyak menerima bantuan yaitu kecamatan Binjai Kota dengan jumlah penerima bantuan sebesar 54 orang.



Tabel III.21

Jumlah Penerima Bantuan dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Anggaran Bantuan Sosial
1	Binjai Selatan	27	9,166,500
2	Binjai Kota	54	18,333,000
3	Binjai Timur	15	5,092,500
4	Binjai Utara	13	4,413,500
5	Binjai Barat	7	2,376,500
	Kota Binjai	116	39,382,000

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Sosial dapat dilihat pada Tabel III.22 dan Lampiran I

Tabel III.22

Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial (Dinas Sosial Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
	Sosial		
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		
2	Jumlah Data Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu Fakir Miskin (FM) dan Orang Tidak Mampu (OTM)		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	171
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	7
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi		



a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
7	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	1
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	3
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	



16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	3
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	33
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	17
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		
a	Penyandang disabilitas terlantar	orang	
b	anak terlantar	orang	
c	lanjut usia terlantar	orang	
d	gepeng	orang	
22	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	116
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		
26	Jumlah Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		



27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	orang	31 (Tagana)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		231
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		231
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	persen	100
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran		116
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		116

Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai, 2024

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

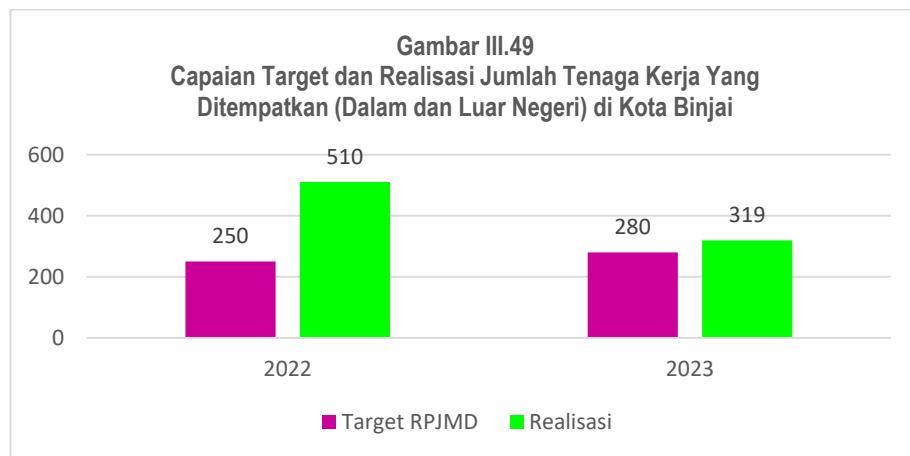
Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Dalam melaksanakan penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah, harus ada perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI di Negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk pelaksana penempatan TKI swasta harus mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

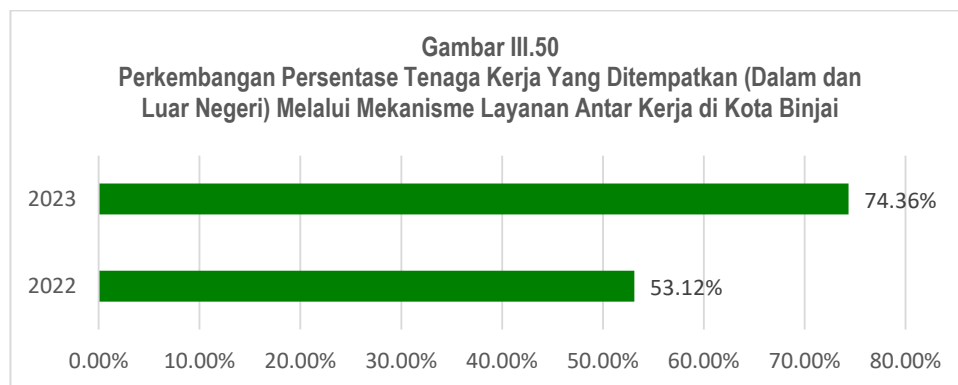


(dalam dan luar negeri) di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 319 orang. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 280 orang untuk jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri).



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Binjai tahun 2022 sebesar 53,12 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 74,36 persen. Angka ini masih sangat rendah hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Persentasenya juga relatif kecil, karena pencari kerja terdaftar tidak dapat maksimal termonitoring, hanya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan difasilitasi oleh Disnaker saja yang dapat termonitoring, baik bekerja di luar negeri maupun dalam negeri.



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, 2024

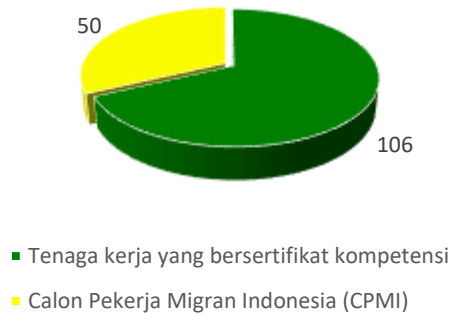
Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan



sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pelatihan tenaga kerja berdasarkan basis kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan/off the job training, penilaian/assesment di lembaga pelatihan, on the job training, penilaian/asesment di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi. Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja.

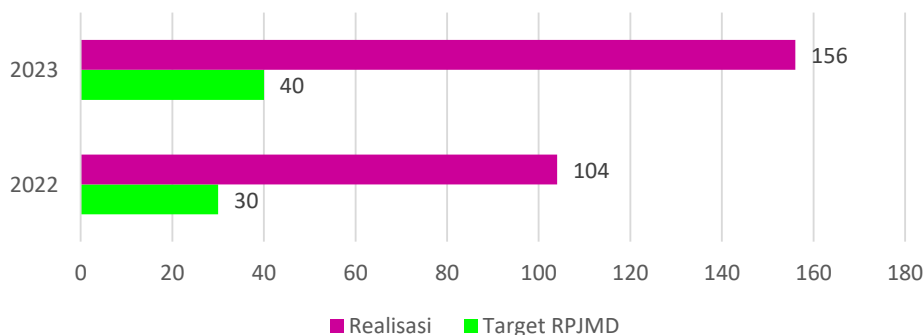
Gambar III.51
Jumlah Tenaga Kerja Kota Binjai Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2023 (Orang)



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, terdapat 156 orang yang memiliki sertifikat kompetensi di Kota Binjai pada tahun 2023 dengan jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi sebanyak 106 orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bersertifikat kompetensi sebanyak 50 orang.

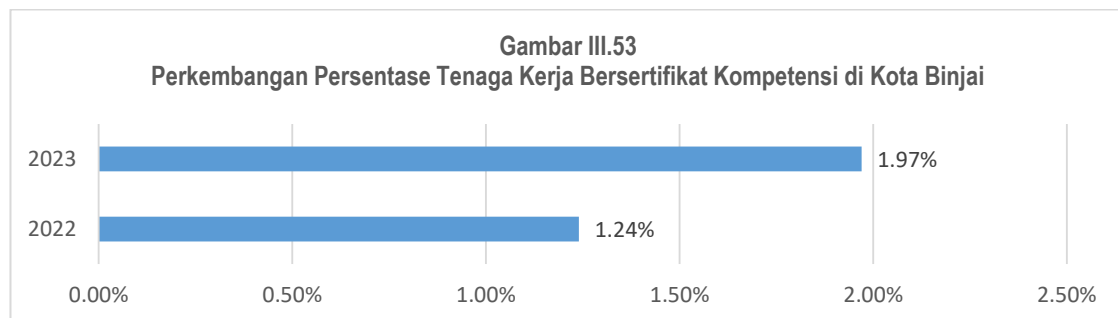
Gambar III.52
Capaian Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja di Kota Binjai yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024



Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 156 orang. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 40 untuk jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

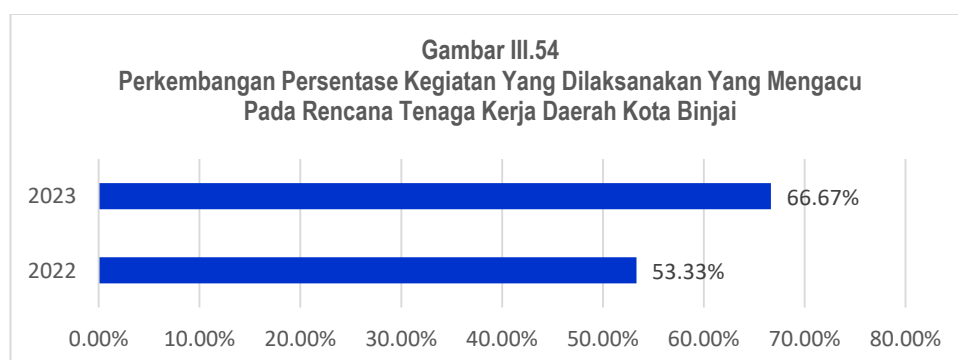


Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 1,24 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 1,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Binjai sangat mendukung dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan tenaga kerja guna menciptakan tenaga kerja yang handal dan kompeten.

Ketersediaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK, adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan. Kota Binjai sudah memiliki dokumen RTK.



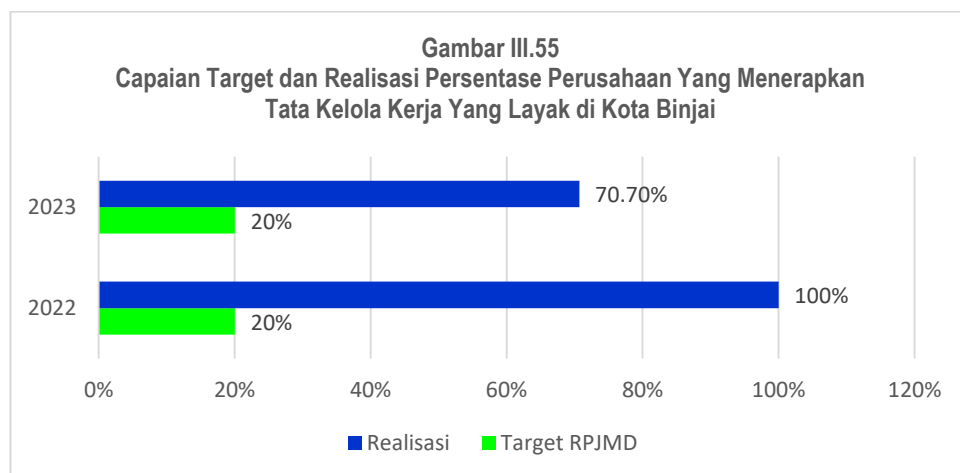
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024



Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 53,33 persen. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota sebanyak 15 kegiatan. Pada tahun 2023 persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kota Binjai mengalami peningkatan sebesar 66,67 persen, dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan dan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Binjai sebanyak 12 kegiatan.

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 70,7 persen. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2023 sebanyak 176 perusahaan dengan, jumlah Perusahaan sebanyak 249 perusahaan. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 20 persen untuk persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada table III.23



Tabel III.23

Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	66,67
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	8	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kab/kota	12	
2	Persentase tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	1,97
	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi	156	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	7,913	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	persen	70,7
	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	176	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah perusahaan	249	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/kota	persen	74,36
	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	319	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	543	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2023

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

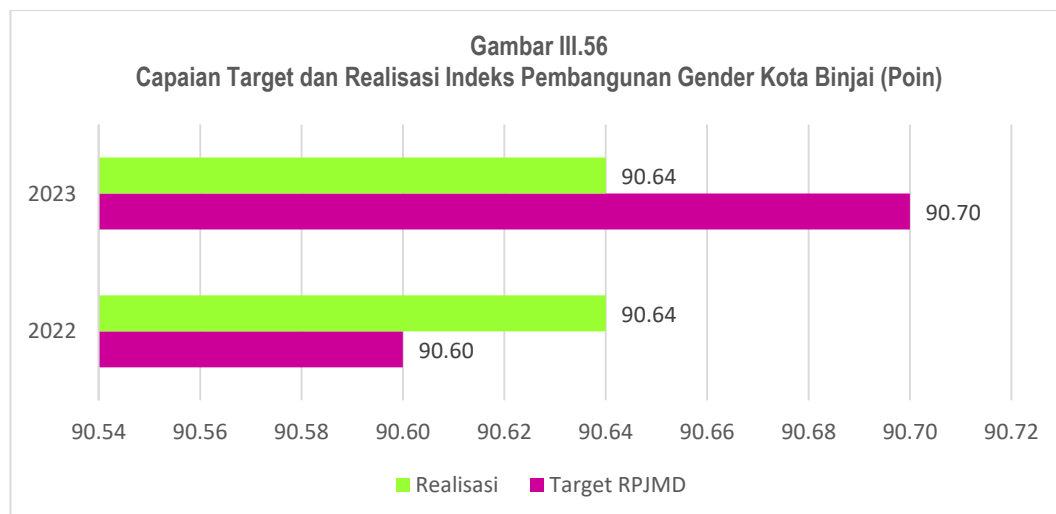
Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.



Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan dalam segala bidang hendaknya meminimalisir kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Indikator untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan melalui IPG dan IDG. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang memperhatikan ketimpangan gender.

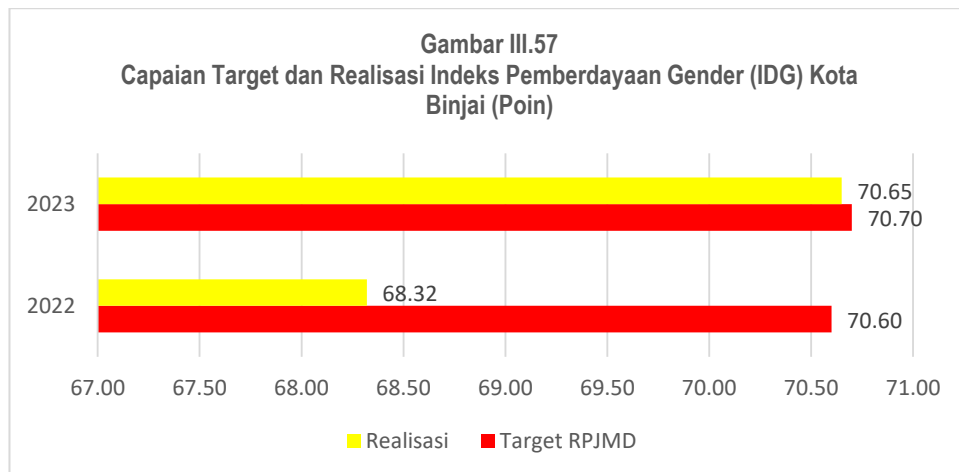
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 90,64 poin. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 90,7 poin untuk Indeks Pembangunan Gender.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

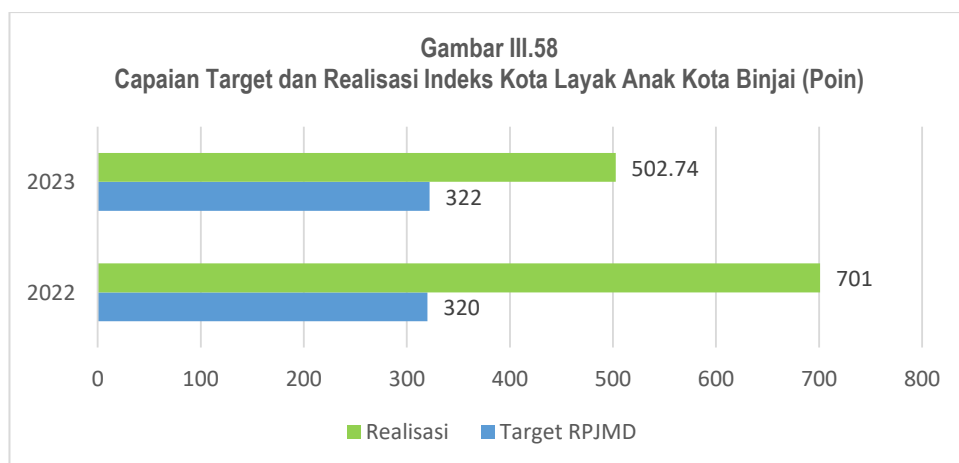
IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 70,65 poin. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 70,7 poin untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Indeks Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Indeks Kota Layak Anak di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 502.74 poin. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 323 poin untuk Indeks Kota Layak Anak.



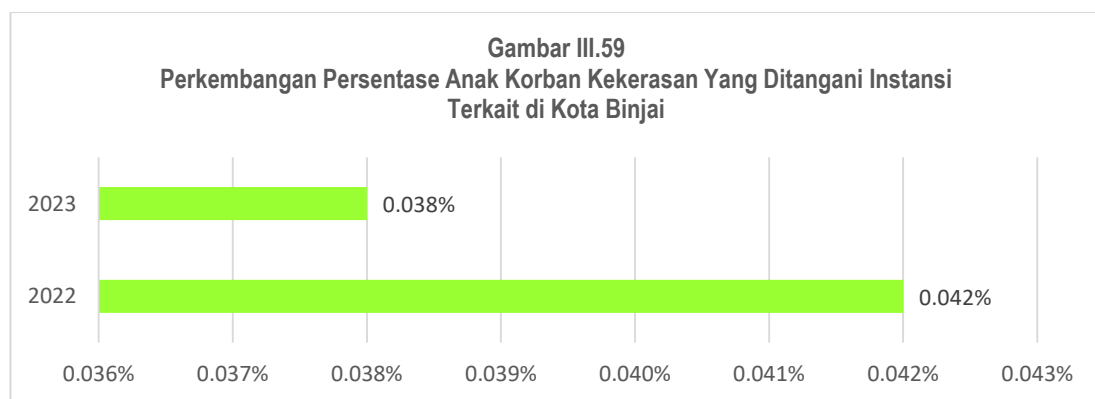
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Persentase Anak Korban kekerasan yang Ditangani

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang



sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Persentase anak korban kekerasan di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 0,038 persen dengan jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi sebanyak 39 korban dan jumlah anak di Kota Binjai sebanyak 100.088 jiwa.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada table III. 24 dan **Lampiran I**

Tabel III.24

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,64
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,65
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	17
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif		2 Organisasi
5	Rasio KDRT	%	-
6	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	50 Persen (8 kasus, 4 kasus yang selesai)



7	Jumlah lembaga layanan anak yang terfasilitasi	Angka	1 UPTD PPA
8	Up dating data terpilah gender dan anak (SIGA)	%	-
9	Indeks Kota Layak Anak	Poin	502,74
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100 persen (39 kasus)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG		41 OPD
2	Jumlah Program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota		41 OPD
3	Jumlah media masa (cetak elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/pemko (Dinas PPPA) untuk melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap anak		5 (Pos metro, Analisa, Utama News, Kata Kabar, e News)
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1 UPTD PPA
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100 persen (39 kasus)
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		1 UPTD PPA
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan / fasilitas oleh pemkab / kota (APBD kab/kota)		1 UPTD PPA
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan		LPPLU
9	Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih		35 Kader Perempuan PT P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di Kel. Bnadar Sinembah; LPPLU (Lembaga Pemberdayaan Perempuan lanjut Usia) 100 orang
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		20.852 UMKM
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		1 UPTD PPA
14	persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		



1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,03 %
	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	36,025,169,624
	----- x 100 %	----- x 100 %
	Jumlah keseluruhan belanja langsung APBD	1,010,597,766,613
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	0,038 %
	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	39
	----- x 100 %	----- x 100 %
	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	100,088
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan	0,008%
	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	8
	----- x 100 %	----- x 100 %
	Jumlah penduduk perempuan	101,612

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Konsep ketahanan pangan (food security) berorientasi pada konsep ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan dimaksud, bilamana salah satu dari unsur di atas bila tidak terpenuhi, maka suatu daerah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.

Persentase ketersediaan Pangan

Beras merupakan salah satu jenis padi-padian yang paling banyak dikonsumsi manusia di dunia. Sampai saat ini, beras merupakan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Rendahnya konsumsi kalori yang berasal dari beras, diikuti dengan meningkatnya konsumsi kalori secara keseluruhan dapat mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk Kota Binjai mengalami



peningkatan. Kota Binjai sampai saat ini adalah daerah pengimpor beras dimana produksi padi yang dihasilkan masih di bawah kebutuhan domestik. Kota Binjai memiliki potensi pertanian tanaman bahan makanan yang cukup potensial. Potensi yang terbesar terdapat pada produksi tanaman padi sawah dan ladang, tanaman jagung serta tanaman ubi kayu.

Tabel III.25
Produksi Padi Di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Tanam	Panen	Produktivitas	Produksi (Ton)
1	Binjai Utara	1,545	1,488	6,198	9,228
2	Binjai Selatan	1,218	1,173	6,123	7,195
3	Binjai Timur	333	321	6,098	1,968
4	Binjai Barat	55	53	5,564	322
5	Binjai Kota	0	0	0	0
Jumlah		3,151	3,092	6,164	18,703

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2024

Jumlah produksi padi di Kota Binjai tahun 2023 sebanyak 18.703 ton. Persentase ketersediaan pangan di Kota Binjai sebesar 37,36 persen, dengan jumlah ketersediaan pangan sebanyak 9.386 Ton dan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 25.120 Ton. Target ketersediaan pangan utama di Kota Binjai sebesar 41,5 persen, sehingga capaian ketersediaan pangan utama di Kota Binjai mencapai 90,02 persen. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada **Lampiran I**

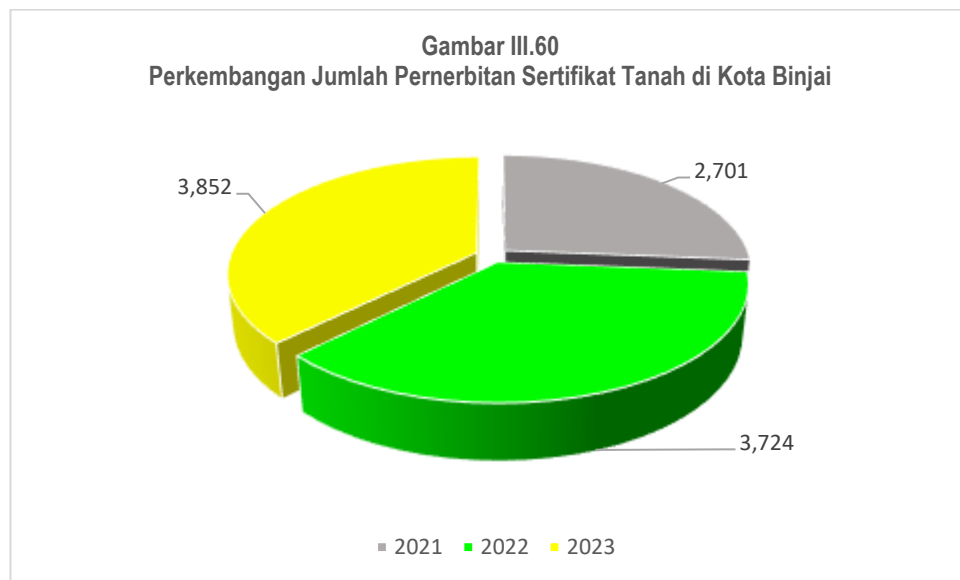
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Binjai, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Binjai yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.



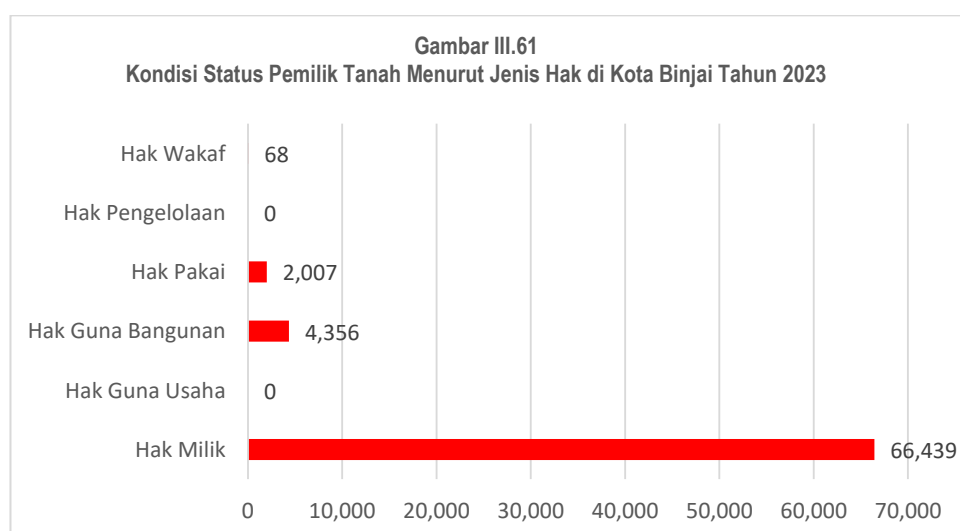
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah penerbitan sertifikat tanah di Kota Binjai selama tiga tahun mengalami peningkatan hingga 3,44 persen.



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024



5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan kegiatan yang penting dan harus dilakukan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab semua pihak. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan wujud upaya untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Tujuan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu setiap orang harus melakukan upaya untuk melestarikan dan menyelamatkan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing. Upaya untuk mengetahui tingkat capaian pengurangan laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan digunakan alat ukur sederhana berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. IKLH dihitung dari rata-rata nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL), dengan rumus:

$$IKLH = (30 \% \times IKA) + (30 \% \times IKU) + (40 \% \times IKTL)$$

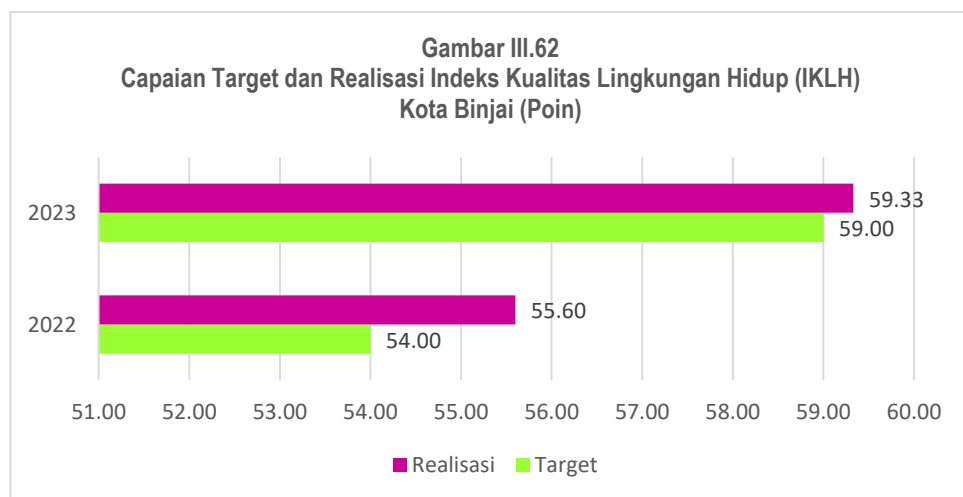
Klasifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$



Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Berdasarkan gambar di bawah, IKLH Kota Binjai tahun 2023 termasuk kategori kurang. Jika dilihat komponen pembentuknya, indeks kualitas tutupan lahan termasuk kategori waspada, namun indeks kualitas air termasuk kategori cukup dan dan indeks kualitas udara termasuk katagori sangat baik Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Binjai mengalami peningkatan sebesar 6,71 persen dan sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 59 poin.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024

Persentase Sampah yang Tertangani

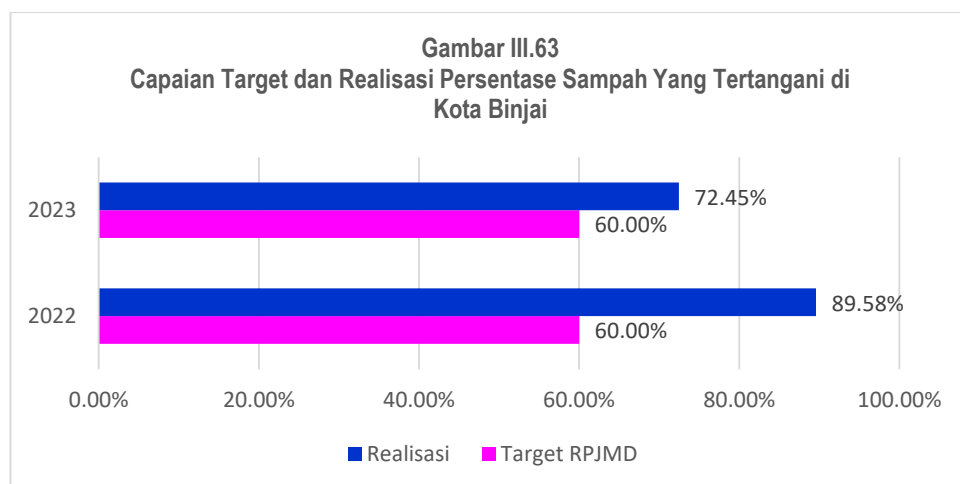
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya.

Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pada sumber sampah, sampah terpilah menjadi organik dan non organik. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos,



sampah non organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada transfer depo atau kontainer sampah untuk diangkut atau dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kota Binjai memiliki 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Mencirim yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur. Persentase penanganan sampah yang tertangani di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 72,45 persen. Jumlah sampah yang tertangani sebanyak 58.419.810 Kg dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 80.630.835 Kg. Kondisi ini sudah melebihi dari target yang ingin dicapai dalam penanganan sampah di Kota Binjai sebesar 60 persen.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Lampiran I

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik.



Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Tidak semua penduduk Kota Binjai pada tahun 2023, yang telah berusia lebih dari 17 tahun atau telah menikah (Wajib KTP) sudah memiliki KTP, hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2023 jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP di Kota Binjai sebanyak 217.026 jiwa, dengan persentase perekaman KTP elektronik sebesar 95,89 persen.

Tabel III.26

Perekaman KTP Elektronik di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP Elektronik	Jumlah Penduduk Telah Rekam
1	Binjai Utara	90,614	64,849
2	Binjai Kota	34,519	26,261
3	Binjai Barat	53,353	38,460
4	Binjai Timur	68,447	49,075
5	Binjai Selatan	61,656	44,416
Kota Binjai		308,589	223,061

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan



upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Banyak manfaat jika seorang memiliki KIA, di antaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus: jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun).

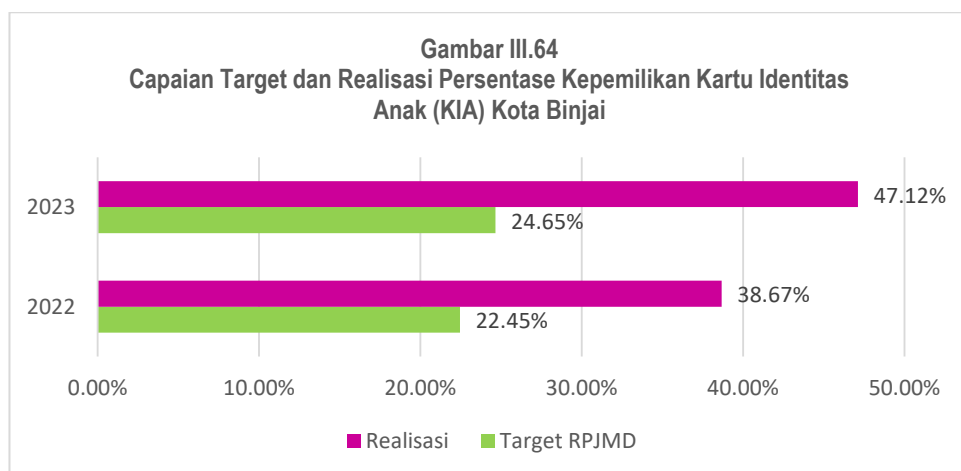
Tabel III.27

Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 tahun	Memiliki KIA	Belum Memiliki KIA
1	Binjai Utara	25,829	13,286	12,543
2	Binjai Kota	8,285	4,054	4,231
3	Binjai Barat	14,911	6,045	8,866
4	Binjai Timur	19,426	8,612	10,814
5	Binjai Selatan	17,326	8,423	8,903
Kota Binjai		85,777	40,420	45,357

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024

Pada tahun 2023 jumlah anak di Kota Binjai yang sudah memiliki KIA sebanyak 40.420 jiwa dengan persentase Kepemilikan KIA sebesar 47,12 persen. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Binjai sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 24,65 persen.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024



Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akta kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akta kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk. Rasio Bayi berakta kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akta kelahiran.

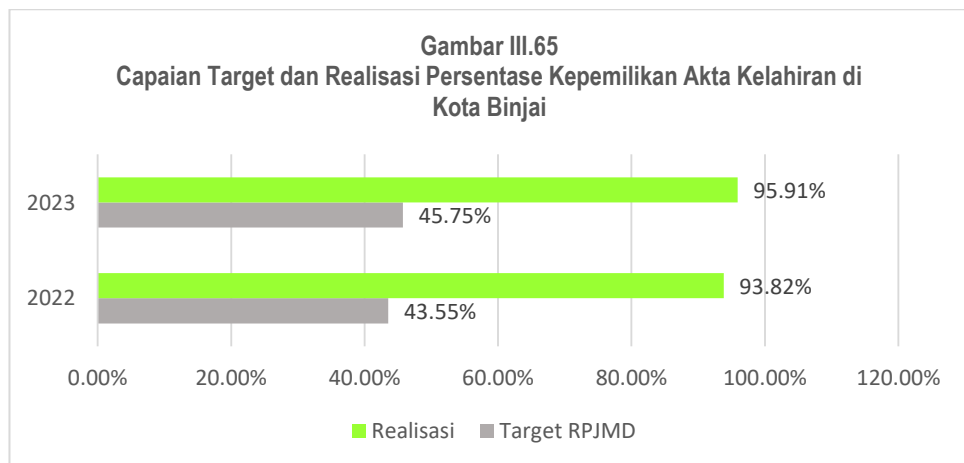
Tabel III.28

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Binjai Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran
1	Binjai Utara	26,875	25,796	1,079
2	Binjai Kota	8,754	8,364	390
3	Binjai Barat	15,594	14,852	742
4	Binjai Timur	20,195	19,366	829
5	Binjai Selatan	18,093	17,470	623
Kota Binjai		89,511	85,848	3,663

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024

Persentase kepemilikan akta kelahiran pda tahun 2023 di Kota Binjai sebesar 95,91 persen dengan jumlah anak yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 85.848 anak. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Binjai sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 45,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Binjai akan pentingnya tertib administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus tertib administrasi untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024



Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel III.29 dan Lampiran I

Tabel III.29

Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Penerbitan Akta Perkawinan	Akta perkawinan	110,242
2	Penerbitan Akta Perceraian	Akta Cerai	4,416
3	Penerbitan Akta Kematian	Akta Kematian	9,865
4	Penyajian data kependudukan		12 Laporan
A	Perekaman KTP elektronik	persen	95.89
	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	217,026	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah penduduk 17 tahun keatas	226,335	
	Penerbitan Akta Perkawinan	persen	100
	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	110,242	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan	110,242	
	Penerbitan Akta Perceraian	persen	100
	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	4,416	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Peristiwa Perceraian yang dilaporkan	4,416	
	Penerbitan Akta Kematian	persen	100
	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	9,865	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Peristiwa Kematian yang dilaporkan	9,865	
B	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	47.12
	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	40,420	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah anak usia 0-17 tahun	85,777	
C	Kepemilikan akta kelahiran	persen	95.91
	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran	85,848	
	----- x 100 %	----- x 100 %	



	Jumlah anak usia 0-18 tahun	89,511	
D	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	2.4
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	1	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah OPD	41	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada **Lampiran I**

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 meliputi:

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

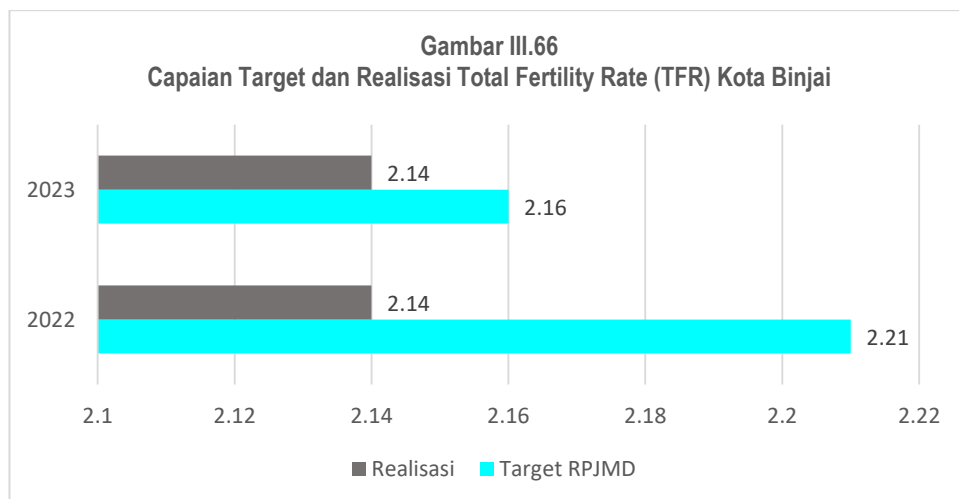
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga (TFR)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur



15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Dalam jangka panjang penduduk di suatu negara dengan TFR 2,1 akan mengalami pertumbuhan nol (zero population growth).

Kondisi rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 2,14 anak per keluarga. Dengan melihat target yang akan dicapai dalam RPJMD sebesar 2.16 anak per keluarga, maka angka TFR Kota Binjai menunjukkan capaian kinerja yang baik dalam melaksanakan program keluarga berencana.



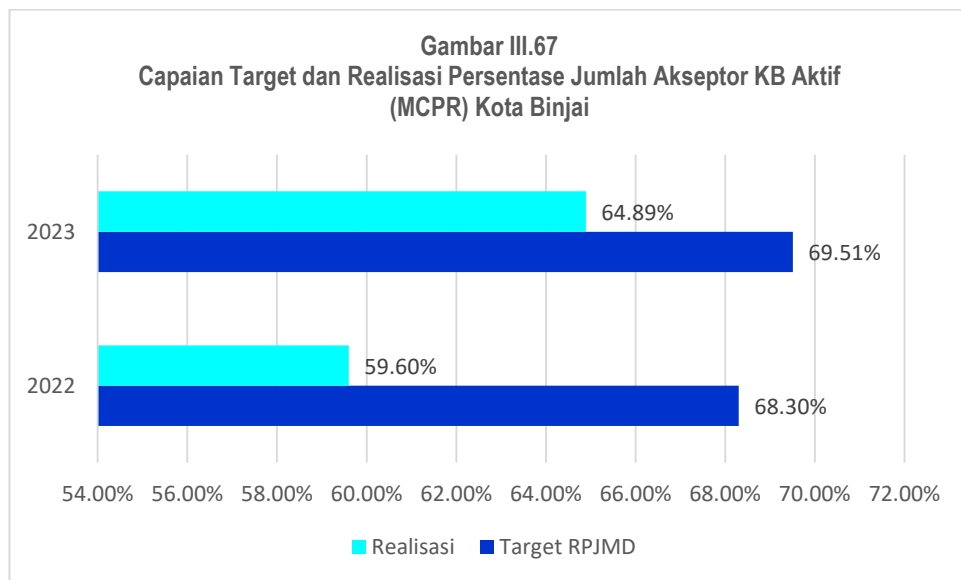
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2023

Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau Tingkat Prevalensi Kontrasepsi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar pemakaian kontrasepsi di suatu wilayah, sedangkan CPR modern merupakan indikator yang dikhususkan pada pemakaian kontrasepsi dengan cara modern. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 64,89 persen dengan jumlah peserta KB aktif modern sebanyak 24.475 peserta KB aktif dan jumlah pasangan usia subur sebanyak 37.715 pasangan usia subur. Dengan melihat target RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 69,51 persen, maka persentase pemakaian kontrasepsi modern di Kota Binjai masih belum mencapai



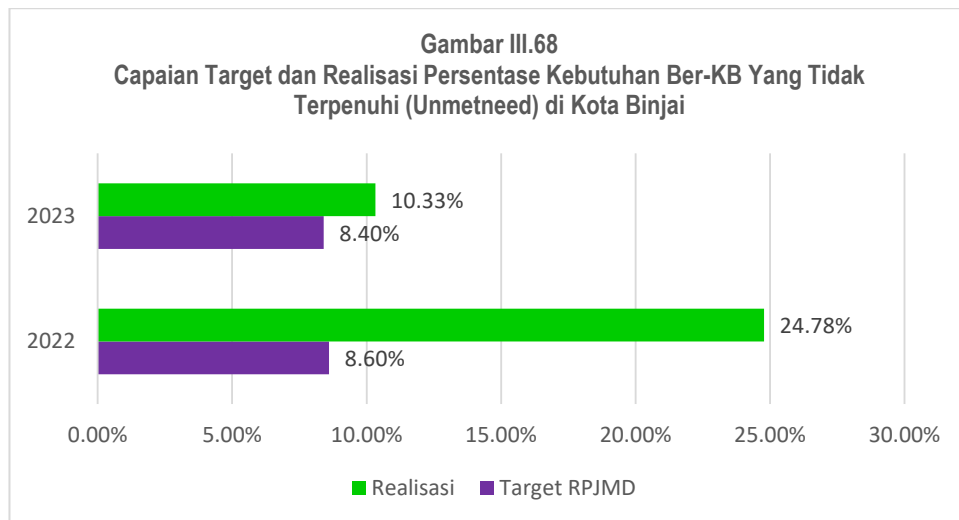
target sehingga program pembinaan keluarga berencana di Kota Binjai masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan tentang kontrasepsi tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pria.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2024

Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)

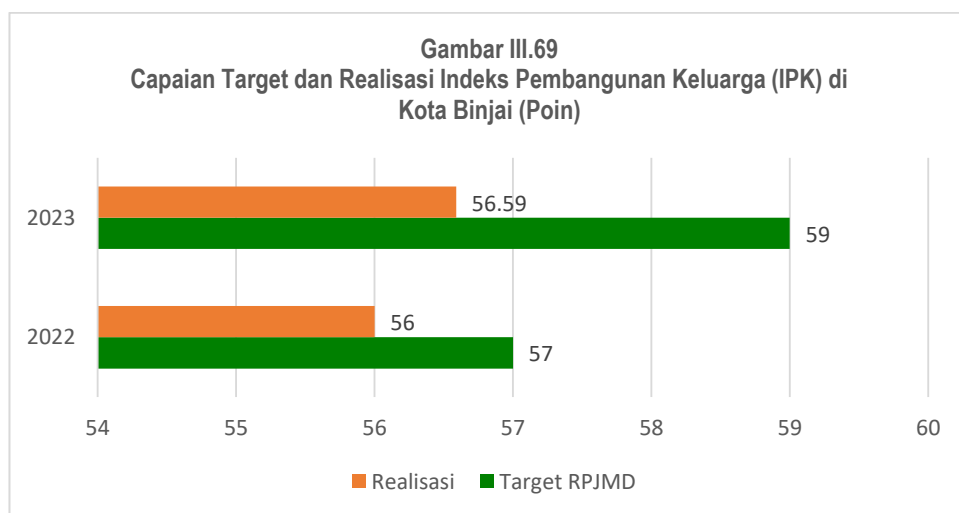
Tingginya angka unmet need berpengaruh pada angka kelahiran (TFR) dan jarak kelahiran serta terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu. Unmet need merupakan suatu kebutuhan akan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Wanita usia subur dikatakan unmet need jika ingin menunda kehamilan atau mengakhiri kehamilan untuk masa dua tahun berikutnya tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 10,33 persen dengan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi sebanyak 3.897 pasangan usia subur dan jumlah PUS sebanyak 37.715 pasangan usia subur. Dengan melihat target RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 8,40 persen, maka persentase kebutuhan ber-KB yng tidak terpenuhi masih lebih besar dari target sehingga disarankan kepada kader dan instansi terkait untuk lebih aktif lagi mensosialisasikan tentang jenis KB dan efek sampingnya agar tidak ada kesalah pahaman pengetahuan pada Wanita Usia Subur (WUS) maupun pasangan atau suami. Selain untuk meluruskan informasi terkait KB, diharapkan suami istri bisa berdiskusi dan membuat keputusan terbaik tentang ber KB dalam keluarga mereka.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

IPK merupakan instrumen untuk mengukur ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia yang menjadi indikator pembangunan pemerintah. Indikator pembangunan keluarga dikembangkan dalam delapan dimensi, yakni dimensi legalitas, dimensi agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dimensi sosial/budaya dan dimensi psikologi. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) di Kota Binjai tahun 2023 sebesar 56,59 poin. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 59 poin untuk Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dapat dilihat pada Tabel III.30 dan **Lampiran I**



Tabel III.30

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana			
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1.66
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.14
3	Rasio ketergantungan penduduk	%	46.04
4	Persentase jumlah akseptor KB aktif (MCPR)	%	64.89
5	Persentase kebutuhan ber- KB yng tidak terpenuhi	%	10.33
6	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	Tahun	10.25
7	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22.89
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Tahun	56.59
Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana			
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Dokumen	Perwal
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 thun	Tahun	22.89
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Tahun	10.25
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) (advokasi dan KIE)	%	85.11
	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	60,756	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (Advokasi dan KIE)	71,380	
5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	OPD	25
6	Pesentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB Metode Kontrsepsi Jngk Panjang (MKJP)	%	100
	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP		
	----- x 100 %		
	Jumlah faskes		
7	Pesentase Peserta KB aktif MKJP	%	19.06
	Jumlah PA (Jlh Impan + Jlh IUD + Jlh MOW + Jlh MOP)	7,189	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah PUS	37,715	
8	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	OPD	1



9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	100
	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern		3,417
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		3,417
10	Persentase kesertaan KB di kecamatan dengan kesertaan rendah	%	61.23
11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	20
	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI		7,546
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah keluarga PBI		37,715
1	TFR (Angka kelahiran Total)		
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		64.89
	Jumlah peserta KB aktif Modern		24,475
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah pasangan usia subur		37,715
3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		10.33
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani		24,475
	----- x 100 %	-----x 100 %	
	Jumlah Pasangan Usia Subur		37,715

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2024

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Kebijakan pembangunan sistem transportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pembangunan sistem transportasi berkelanjutan membatasi emisi/limbah, dan meminimasi konsumsi sumberdaya yang tak terbarukan. Program



pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Rasio Konektivitas

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi (terutama transportasi multi-moda). Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi. Konektivitas mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan, dan menciptakan sistem yang dapat diakses dan resilien. Rasio konektivitas Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 0,79 poin. Secara umum kinerja pelayanan angkutan di Kota Binjai masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut disebabkan karena kurang optimalnya angkutan umum dan kapasitas jalan yang masih rendah.

V/C Rasio di Jalan Kota

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Nili V/C rasio jalan Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 0,65 sehingga tidak perlu melakukan tindakan manajemen rekayasa lalu lintas.

Tabel III.31

Kinerja Lalu Lintas Kota Binjai Tahun 2023

No	Ruas>Nama Jalan	Fungsi Jalan	Volume Lalu Lintas (Kendaraan/jam)	Kapasitas Kendaraan (Kendaraan/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (Km/Jam)
1	Jl.Soekarno Hatta	Arteri	2,947.98	5,456.32	0.54	49.75
2	Jl.T.A Hamzah	Arteri	1,645.45	2,607.65	0.63	46.90
3	Jl. Jend. Sudirman	Kolektor	1,915.72	2,334.09	0.82	38.62
4	Jl. Sutomo	Kolektor	2,611.77	2,728.16	0.96	41.02
5	Jl. Letjen Jamin Ginting	Lokal	1,759.80	2,419.47	0.73	37.17
6	Jl. Sultan Hasanuddin	Lokal	1,824.48	2,419.47	0.75	39.56
7	Jl. Veteran	Lokal	598.55	2,334.09	0.26	35.64
8	Jl. T. Imam Bonjol	Lokal	1,192.17	2,334.09	0.50	30.44



9	Jl. Jend. Ahmad Yani	Lokal	1,720.37	2,419.47	0.71	26.18
10	Jl. P. Diponegoro	Lokal	1,149.09	1,901.58	0.60	35.92
11	Jl. Ir. H. Juanda	Lokal	1,079.71	2,419.47	0.45	38.32
12	Jl. Perintis Kemerdekaan	Lokal	1,821.58	2,334.09	0.78	33.47
	Rata-rata		1688.89	2,642.33	0.65	37.75

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Perhubungan dapat dilihat pada **Lampiran I**

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Lampiran I**

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Binjai adalah peningkatan daya saing, peningkatan skala usaha, standarisasi produk dan peningkatan kelembagaan. Sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah penumbuhan, penguatan dan pengembangan pelaku usaha. Pengembangan koperasi berkaitan erat dengan:

- a. Menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil di masyarakat;



- b. Penguatan dan pengembangan pelaku usaha kecil menengah;
- c. Memperluas kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menumbuhkan wirausaha yang inovatif;
- d. Memperkuat permodalan koperasi dalam melayani pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro melalui dana bergulir;
- e. Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta berkurangnya kesenjangan pendapatan; dan
- f. Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan merupakan peran koperasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 meliputi:

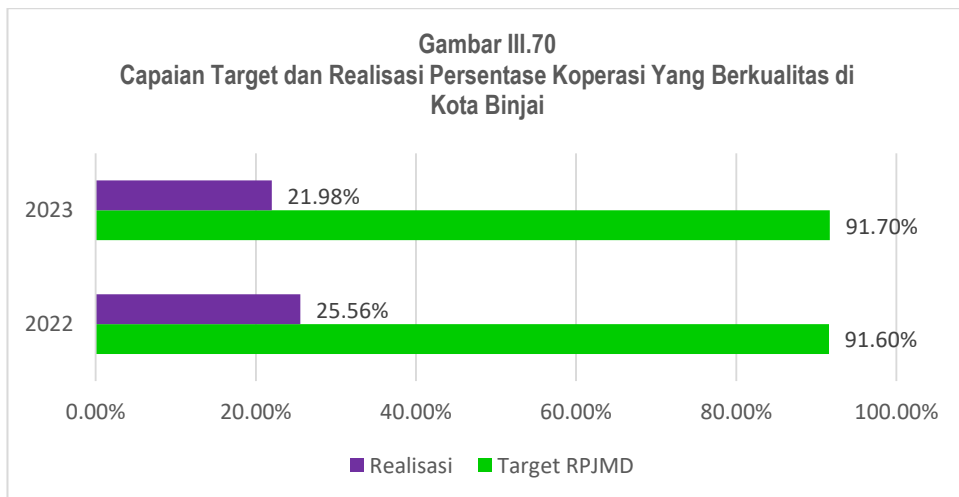
1. Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
2. Progrm Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
3. Program Pengembangan UMKM

Koperasi yang berkualitas

Koperasi telah tumbuh sebagai wadah usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat dan UMKM menjadi sendi yang menguasai perekonomian negara. Koperasi tumbuh dan berhasil mengambil bagian dalam sistem ekonomi yang demikian kompleks dan modern. Koperasi tidak lagi menjadi alat politik dan hidup dalam buaian bantuan, tapi koperasi diarahkan sebagai sebuah usaha yang harus hidup dan berkembang secara mandiri dan berkualitas.

Peningkatan kualitas koperasi berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 21,98 persen dengan jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), volume usaha dan asset sebanyak 51 koperasi dari 232 koperasi yang terdapat di Kota Binjai. Berdasarkan target RPJMD yng kan dicapai pada tahun 2023 untuk persentase koperasi yang berkualitas sebesar 91,70 persen, angka ini menunjukkan bahwa persentase koperasi yang berkualitas di Kota Binjai belum mencapai target.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas harus lebih ditingkatkan melalui pelatihan perkoperasian yang berorientasi pada kinerja, dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya sehingga SDM pengelola koperasi memiliki kualitas yang baik, memiliki kemampuan manajemen yang baik serta berwawasan luas.

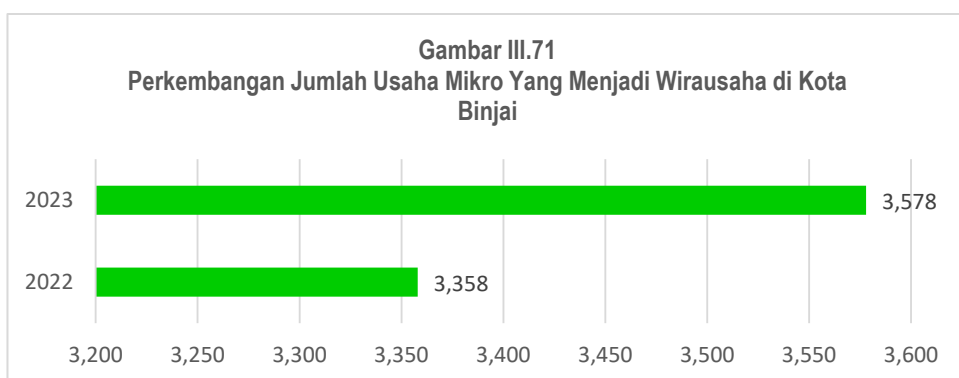


Sumber : Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2024

Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha

UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM. Usaha kecil berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, tidak hanya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Produk yang dihasilkan usaha kecil umumnya juga berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan yang komparatif.

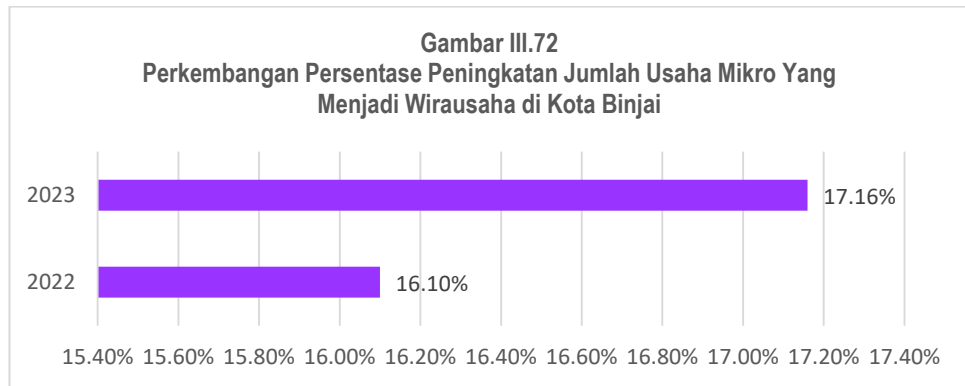


Sumber : Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2024

Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kota Binjai pada tahun 2022 sebanyak 3.358 wirausaha, meningkat menjadi 3.578 wirausaha pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan



pemerintah Kota Binjai telah berhasil dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menumbuhkan daya kreativitas dan berwirausaha dengan menghasilkan produk-produk usaha mikro yang berkualitas dan unggul dalam bersaing di pasar global.



Sumber : Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2024

Persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 16,10 persen meningkat menjadi 17,16 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Binjai dalam membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro dalam memberikan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel III.32 dan Lampiran I

Tabel III.32

Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Jumlah usaha mikro dan kecil (IKK OPD)	Unit	20,825
2	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat	Jiwa	5
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	21.98
4	Jumlah KSP/USP baru	Unit	5
5	Persentase KSP/USP aktif	%	37.70
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	21.98
	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), volume usaha dan aset	51	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah seluruh koperasi	232	



2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	17.16
	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,578	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah usaha mikro keseluruhan	20,852	

Sumber : Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2024

12. Urusan Pemerinatahan Penanaman Modal

Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya antara lain: penegakan peraturan di bidang investasi dan pelayanan publik yang baik; adanya stabilitas keamanan yang terjamin; kondisi tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung adanya investasi; ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai; dan ketersediaan bahan baku kegiatan investasi. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di Kota Binjai

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang di timbulkannya. Multiplier effect atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Persentase peningkatan investasi di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 0.23 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi minus 38,28 persen. Hal ini disebabkan nilai realisasi investasi tahun 2023 mengalami penurunan karena target investasi tahun 2023 dari provinsi sumatera utara untuk Kota Binjai turun menjadi Rp. 166.343.560.000,-.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Tahun 2024



13. Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Olah Raga

Adapun grand strategi pembangunan nasional kepemudaan antara lain: melaksanakan pengarusutamaan pemuda sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tidak terpisahkan dalam setiap program dan hasil pembangunan; menjangkau keseluruhan pemuda, baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah; menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan; dan menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 meliputi:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Salah satu komponen yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan adalah partisipasi pemuda. Partisipasi pemuda sangatlah penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam pembangunan bangsa. Para pemuda memiliki modal yang besar yaitu mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif yang kemudian dapat direalisasikan dalam perindustrian. Para pemuda di era digital ini juga memiliki kelebihan yaitu dapat menguasai teknologi dan hal tersebut dapat dikolaborasikan dengan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Disamping kekuatan yang dimiliki oleh para pemuda sebagai pelaku ekonomi kreatif, disisi lain pemuda dapat menjadi modal yang luar biasa besar guna mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan pada tahun 2023 sebanyak 15 orang.

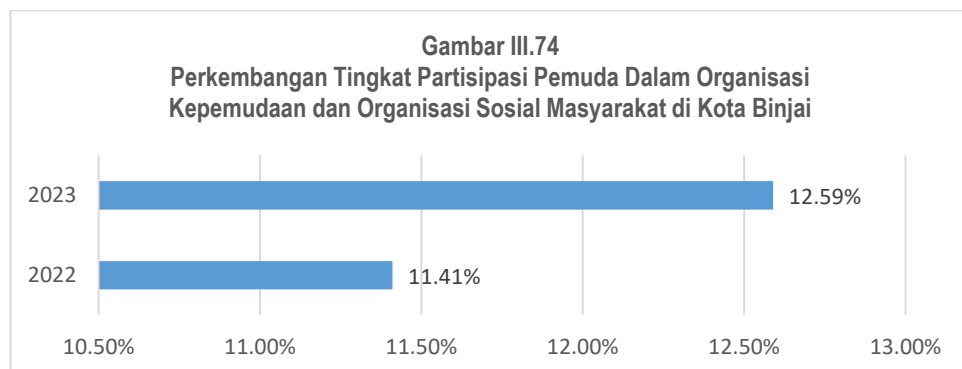
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat

Generasi Muda adalah merupakan potensi dan asset pembangunan manusia yang sangat besar dan tentu saja memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan pembangunan suatu bangsa. Pemuda harus senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda.



Peranan generasi muda dalam era pembangunan ini terbuka lebar bagi generasi muda, bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus selaku subjek pembangunan itu sendiri. Generasi muda yang punya kepedulian seperti lembaga-lembaga kepemudaan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan atau semua yang berkiprah didalam kepemudaan sangat berpeluang untuk melakukan sesuatu, bagi bangsa dan negara. Hal tersebut ditunjang dengan kebijakan pembangunan daerah yang selalu membuka ruang bagi pemuda untuk ikut berperan secara nyata, baik melalui organisasi maupun secara individu.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 11,41 persen dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 12,59 persen dengan jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kota Binjai sebanyak 8.879 orang dan jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kota Binjai sebanyak 70.514 orang.



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai, 2024

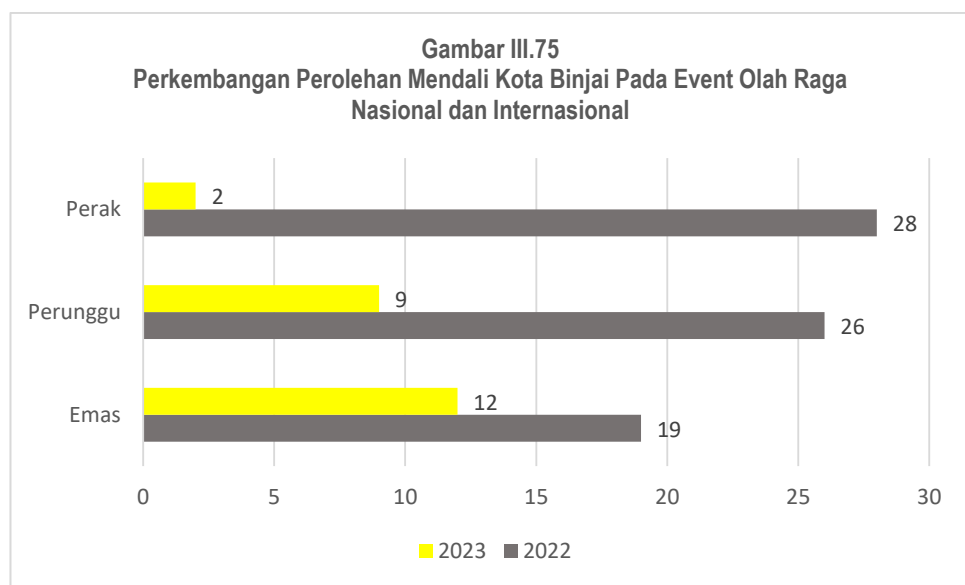
Peningkatan prestasi olah raga

Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi beregu maupun individu. Usaha latihan yang maksimal dan terstruktur dapat memberikan hasil yang maksimal dalam prestasi olahraga.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Untuk pelaksanaan pengembangan prestasi pengorganisasian adalah salah satu cara untuk dapat melakukan pembinaan yang sistematis dan terstruktur.



Peningkatan prestasi olah raga di Kota Binjai pada tahun 2022 dengan melihat dari keikutsertaan Kota Binjai dalam pertandingan cabang olah raga baik Tingkat Nasional maupun Internasional dan memperoleh medali pada cabang olah raga. Jumlah perolehan medali untuk Kota Binjai pada tahun 2022 untuk event olah raga Nasional dan Internasional sebanyak 73 medali dengan rincian jumlah medali emas sebanyak 19 medali emas, 26 medali perak dan 28 medali perunggu. Pada tahun 2023 perolehan medali untuk event olah raga internasional mendapat 2 medali emas, sedangkan pada event olah raga nasional mendapat 10 medali emas, 9 medali perunggu dan 2 medali perak.



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai, 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada **Tabel III.33** dan **Lampiran I**

Tabel III.33

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	15
2	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	68



3	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		
4	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	32
5	Jumlah penyelenggaraan event olah raga prestasi tingkat daerah		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-
	Jumlah pemuda (16-30 Tahun) yang berwirausaha di provinsi		
	----- x 100 %		
	Jumlah pemuda (16-30 Tahun) yang berwirausaha di kab/kota		
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	%	12.59
	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kab/kota		8,879
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kab/kota		70,514
3	Peningkatan prestasi olah raga	Mendali	23
	Jumlah perolehan mendali pada event olah raga nasional dan internasional		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai, 2024

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan statistik memiliki mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Menurut UU tersebut, statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Statistik dapat dilihat pada **Lampiran I**

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggara pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dan segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Persandian merupakan salah



satu media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam kondisi tertentu atau khusus. Data persandian hanya boleh diakses oleh petugas yang memiliki hak akses khusus untuk menangani urusan persandian karena menyangkut rahasia negara maupun keadaan darurat. Pada saat ini dimana teknologi dan informasi komunikasi sudah berkembang pesat (era digital) maka bidang persandian juga menangani sistem keamanan informasi agar data dan informasi pemerintah daerah terjaga keamanannya. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Persandian dapat dilihat pada **Lampiran I**

16. Urusan Pemerinatahan Bidang Kebudayaan

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keragaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil.

Bidang Pengembangan Budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Terlestarikan Cagar Budaya

Cagar Budaya dan sejarah Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda



alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Tabel III.34
Benda Cagar Budaya di Kota Binjai

No	Nama Benda Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	Stasiun Kereta Api	Jl. Ikan Paus Binjai Timur	Terverifikasi
2	Gedung Eks Pengadilan Negeri Binjai/Pengadilan Agama	Jl. St. Hasannuddin Binjai Kota	Terverifikasi
3	Mesjid Raya Binjai	Jl. KHA. Wahid Hasyim Binjai Kota	Terverifikasi
4	Mesjid Jami' Binjai	Jl. KH. Abdul Karim Binjai Selatan	Belum Terverifikasi
5	Vihara Setia Buddha Binjai	Jl. Jend. Sudirman Binjai Kota	Terverifikasi
6	Makam Tua Kelurahan Kebun Lada	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Olah Raga Binjai Utara	Belum Terverifikasi
7	Kuil Shri Mriamman Binjai	Jl. Jend. Ahmad Yani Binjai Kota	Terverifikasi

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (IKU)

Kota Binjai memiliki keragaman budaya, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga kebiasaan masyarakatnya, yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Seiring dengan berjalannya waktu, ragam kebudayaan masyarakat dirangkum dalam sebuah kegiatan seni budaya, yang disebut dengan festival budaya. Kegiatan ini merupakan gabungan dari rangkaian budaya, juga meliputi perasaan untuk merayakan hal yang sama.

Penyelenggaraan festival umumnya memiliki tema-tema yang menarik dan berbeda setiap tahunnya. Festival juga erat kaitannya dengan tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang menjadi kebanggaan daerahnya. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Binjai tahun 2022 sebesar 1 festival, meningkat pada tahun 2023 sebanyak 3 festival dengan acara Panggung Hiburan rakyat. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 1 festival untuk jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.



Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel III.35 dan **Lampiran I**

Tabel III.35
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan (Dinas Pariwisata Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
	Kebudayaan		
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (IKU)	Angka	3
2	Jumlah gedung kesenian	Unit	1
3	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67
4	Jumlah dokumentasi sejarah	Angka	-
5	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	55
	Kebudayaan		
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		11
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian pengayaan keberagaman)		10
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		10
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola		43
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		7
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		-
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		-
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		-
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		7
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		1
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		-
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota		-



13	Pembentukan Tim pendaftaran cagar budaya	-
14	Pembentukan Tim Ahli cagar budaya	-
15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	-
16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	-
17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kab/kota	-
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1
19	Penyelenggaraan kegiatan meseum yang melibatkan masyarakat	-
1	Terlestarikan Cagar Budaya	71.42
	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	5
	----- x 100 %	----- x 100 %
	Jumlah cagar budaya yang terdata	7

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2023

17. Urusan Pemerinatahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui program pembinaan perpustakaan.

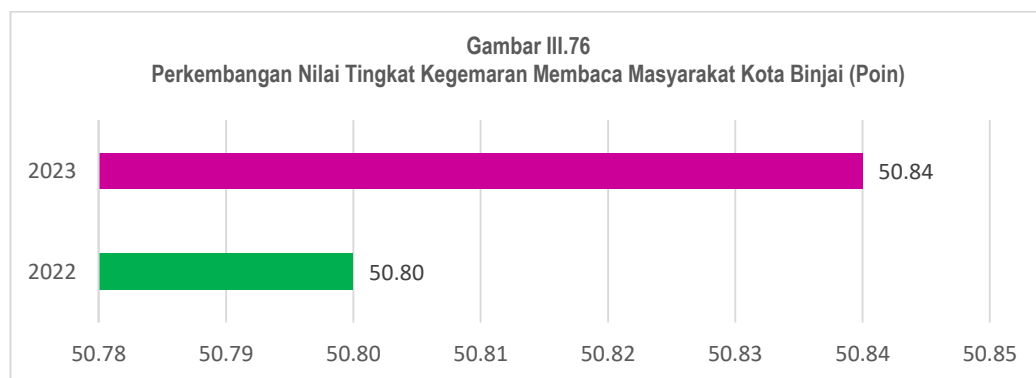
Nilai tingkatan kegemaran membaca masyarakat

Upaya membangun kualitas manusia melalui budaya literasi perlu dijadikan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan- kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan bagi Pemerintah Daerah perlu melakukan Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang



Perpustakaan, diantaranya yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Berdasarkan data Dinas Perpustakaan Kota Binjai pada Tahun 2022, nilai tingkatan kegemaran membaca masyarakat Kota Binjai sebesar 50,80 poin, meningkat pada tahun 2023 sebesar 50,84 poin atau berada pada katagori sedang.



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2024

Indeks pembangunan literasi masyarakat

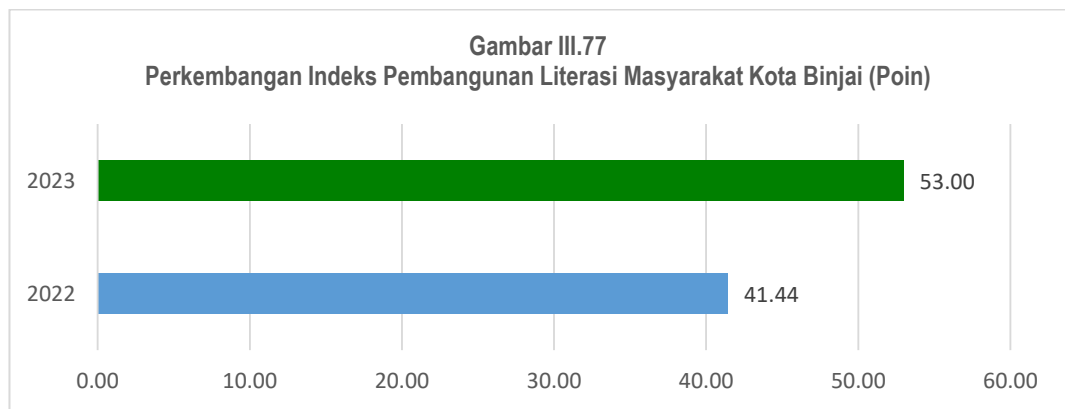
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perpustakaan Kota Binjai pada tahun 2022, indeks



pembangunan literasi masyarakat Kota Binjai tahun 2022 sebesar 41,44 poin, meningkat menjadi 53 poin pada tahun 2023.



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tbel III.36 dan **Lampiran I**

Tabel III.36

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan (Dinas Perpustakaan Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	60,749
2	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	35
3	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan	Jiwa	51
4	Jumlah koleksi/naskah kuno yang terdigitalisasi	Unit	
Perpustakaan			
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persen	23
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	20
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	0.12
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	4
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	3
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada diwilayahnya	Dokumen	
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dokumen	
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan /atau terdaftar yang ada diwilayahnya		



9	Nilai tingkatan kegemaran membaca masyarakat	Poin	50.84
10	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	53

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2024

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kerasipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebugkutan dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebugkutan suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Program dan kegiatan urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Binjai pda tahun 2023 adalah Program Pengelolaan Arsip dan Program Perizinan dan Penggunaan Arsip. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel III.37 dan Lampiran I

Tabel III.37

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan (Dinas Perpustakaan Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen	100
2	Jumlah arsip aktif	arsip	14,034
	Jumlah arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip	arsip	14,034
3	Persentase arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen	100
4	Jumlah arsip Inaktif	arsip	3,270
	Jumlah arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	arsip	3,270
5	Persentase jumlah arsip statis	persen	100
6	Jumlah arsip statis	arsip	16
7	Persentase sarana temu balik	persen	100



8	Jumlah sarana temu balik	arsip	-
9	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JKN	persen	10
10	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JKN	arsip	3,000
11	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	persen	33.33

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2024

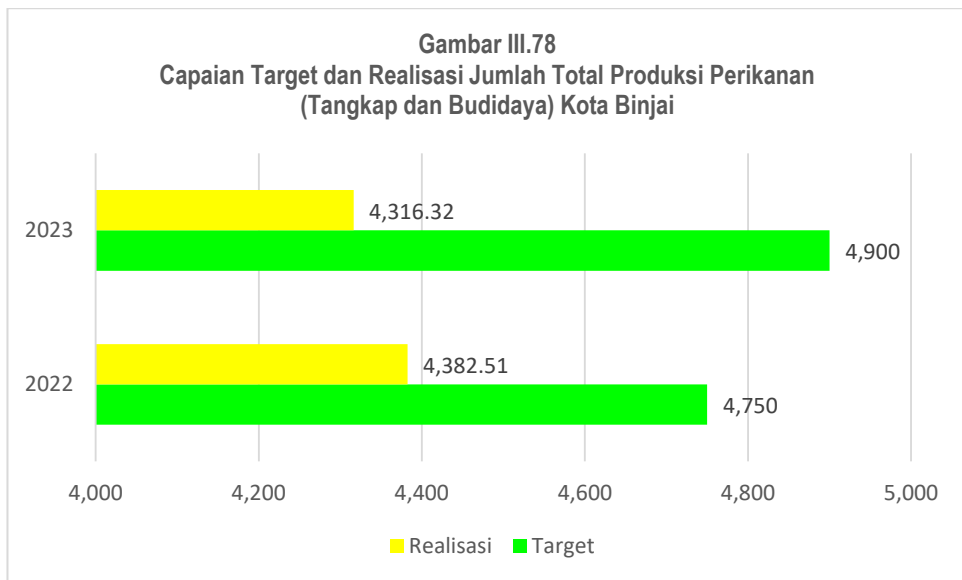
C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota

Produksi perikanan budidaya berasal dari usaha budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, budidaya sawah dan budidaya laut. Untuk sektor perikanan, produksi ikan tawar di Kota Binjai terdiri dari ikan mas, ikan lele, gurame dan nila. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kota Binjai pada tahun 2022 sebanyak 4.382,51 Ton, meningkat menjadi 4.316,32 Ton pada tahun 2023. Hal ini menunjuk keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan budidaya perikanan di Kota Binjai.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2024

Produksi ikan tawar terbesar pada tahun 2023 yaitu ikan lele sebanyak 4.181.386 Kg sedangkan produksi ikan tawar paling sedikit yaitu ikan mas, hanya sebanyak 2.877 Kg. Hal ini juga sejalan dengan produksi benih ikan, dimana produksi benih ikan lele, merupakan yang terbanyak dan yang paling sedikit ikan mas.

Tabel III.38
Total Produksi Ikan dan Produksi Benih Kota Binjai Tahun 2023

No	Uraian	Total Produksi (Kg)	Produksi Benih (Ekor)
1	Ikan Mas	2,877	234,497
2	Ikan Lele	4,181,386	49,706,366
3	Ikan Gurame	96,561	3,960,436
4	Ikan Patin	10,470	2,352,000
5	Ikan Nila	24,744	2,665,273
	Total	4,316,038	58,918,572

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Perikanan dapat dilihat pada **Lampiran I**

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam



pembangunan khususnya sebagai salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah

1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Persentase Pertumbuhan Wisatawan Nusantara

Pemerintah Kota Binjai terus berupaya untuk meningkatkan daya Tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Binjai. Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dari Tahun 2022 yaitu sebanyak 1.002.400 wisatawan meningkat pada Tahun 2023 sebesar 1.196.810 wisatawan dengan tingkat persentase pertumbuhan wisatawan nusantara di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 19,39 persen. Sementara, jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2022 sebanyak 728 wisatawan, meningkat pada tahun 2023 sebesar 738 wisatawan dengan persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1,37 persen. Hal ini perlu ditingkatkan lagi melalui upaya promosi dan pengembangan seperti wisata budaya dan wisata kuliner yang ada di Kota Binjai. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian Kota Binjai dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel III.39 dan Lampiran I

Tabel III.39

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata (Dinas Pariwisata Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
	Pariwisata		
1	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya (IKK)	Unit	17
2	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	1 s/d 2
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB (IKU)	%	-



4	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	Unit	15
5	Jumlah Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI (IKU)	Unit	9
Pariwisata			
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		1
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata		2
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota		
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		738
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		39
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Persen	1.03
	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi		15
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah tenaga kerja pariwisata		1452
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persen	6.89
	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		100
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		1452
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	28
1	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		1,37
	(Jumlah wisatawan tahun n dikurang jumlah wisatawan tahun n-1)		(738-728)
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah wisatawan tahun n-1		728
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota		19,39
	(Jumlah wisatawan tahun n dikurang jumlah wisatawan tahun n-1)		(1.196.810 - 1.002.400)
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Jumlah wisatawan tahun n-1		1.002.400
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dalam pembangunan urusan pertanian telah dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, serta persoalan yang mendasar antara lain: meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi; terjadinya perubahan iklim global; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan; serta terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor andalan, maka pelaksanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penyuluhan Pertanian

Produktivitas Pertanian

Sebagai wilayah administrative yang masih terdapat lahan pertanian didalamnya, Kota Binjai memiliki lahan sawah yang tersebar di 5 kecamatan. Lahan sawah di Kota Binjai terdiri dari lahan sawah dengan irigasi dan lahan sawah tanpa irigasi. Lahan sawah dengan irigasi hanya terdapat di 2 kecamatan saja, yaitu Binjai Timur dan Binjai Selatan. Tanaman pangan yang diusahakan di Kota Binjai pada tahun 2023 hanya 7 (tujuh) jenis tanaman utama, yaitu: padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari ke 7 jenis tanaman tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Binjai sebesar 18.703 ton.

Tabel III.40

Luas dan Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kota Binjai, 2022 dan 2023

No	Tanaman Bahan Makanan	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Rata-rata Produksi (Kw/ha)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Padi	2,865	3,034	17,069	18,703	61.73	6.16
2	Jagung	1,500	1,449	10,472	10,181	66.49	70.30
3	Kedele	-	35	-	49	-	1.40
4	Kacang Tanah	106	88	139	217.5	13.12	2.57



5	Kacang Hijau	26	36	24	45	9.08	1.25
6	Ubi Kayu	56	51.5	1,189	1,130	212.36	215.16
7	Ubi Jalar	129	116	2,415	2,190	187.21	189.20

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Produktivitas padi per hektar per tahun di Kota Binjai pada tahun 2023 sebesar 6,16 Ton/Ha dengan jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun sebanyak 18.703 Ton dan luas panen sebesar 3.034 Ha. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran I**

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam konteks menghadapi persaingan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi:

1. Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

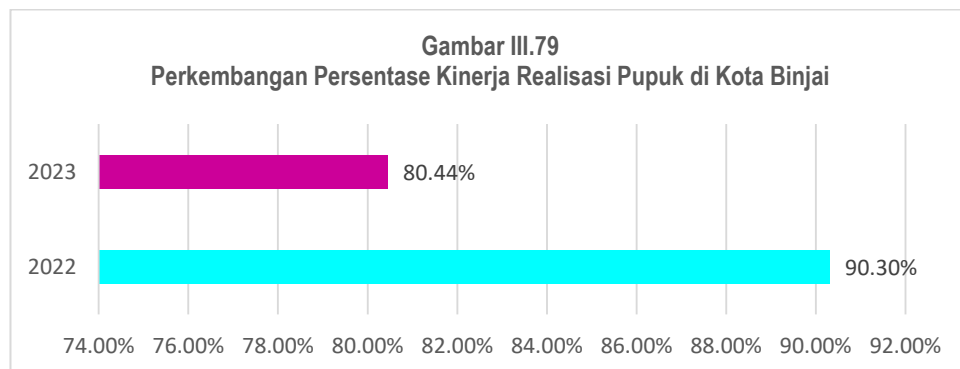
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-dag/per/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Persentase Kinerja Realisasi Pupuk di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 90,30 persen, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,44 persen dengan realisasi



penyaluran pupuk sebanyak 2.096,98 ton dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sebesar 2.607 ton.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2024

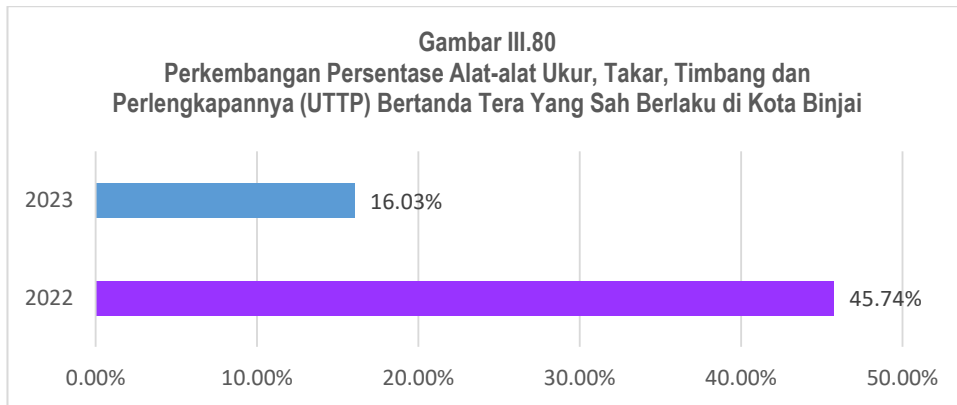
Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Bedasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, bahwa kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi :

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian; dan
- c. pembubuhan tanda Tera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera. Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur. Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, AlatTakar, atau Alat Timbang.

Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 45,74 persen dengan jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku sebanyak 521 dan jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang sebanyak 1.139. Pada tahun 2023, persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kota Binjai mengalami penurunan menjadi 16,03 persen dengan jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku sebanyak 161 dan jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang sebanyak 1.004.



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

Kegiatan perdagangan berupa transaksi barang ataupun jasa merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan melalui jual-beli, sewa beli, maupun sewa menyewa. Sebagai pelaku usaha perdagangan, baik yang berbentuk perseorangan maupun berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum, wajib mengantongi izin di bidang perdagangan dalam hal ini adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan pada tahun 2023 sebesar 83,3 persen dengan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 6.592 pelaku usaha dan jumlah total pelaku usaha di Kota Binjai sebanyak 7.918 pelaku usaha. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Perdagangan dapat dilihat pada **Lampiran I**

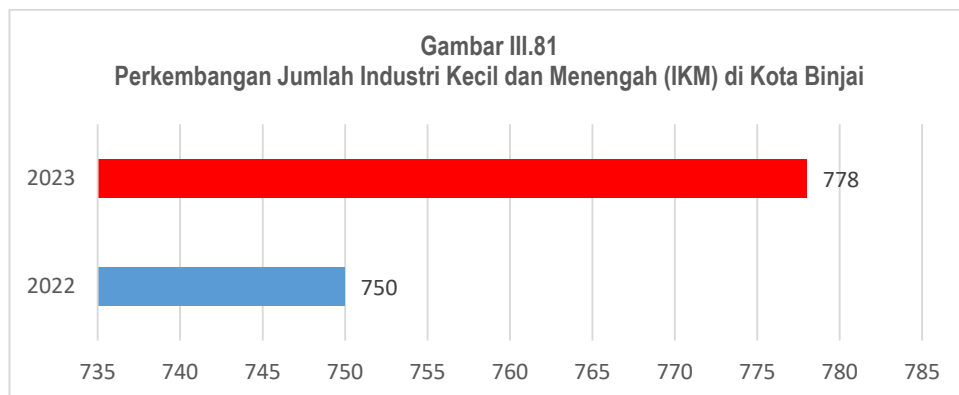
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan perindustrian berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sekaligus memegang peranan penting bagi perekonomian di Kota Binjai. Sejarah telah membuktikan bahwa para pelaku industri kecil menengah mampu bertahan dan terus berkembang seperti yang tertuang dalam Nawacita yang menyebutkan: Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.



Jumlah Industri Kecil dan Menengah

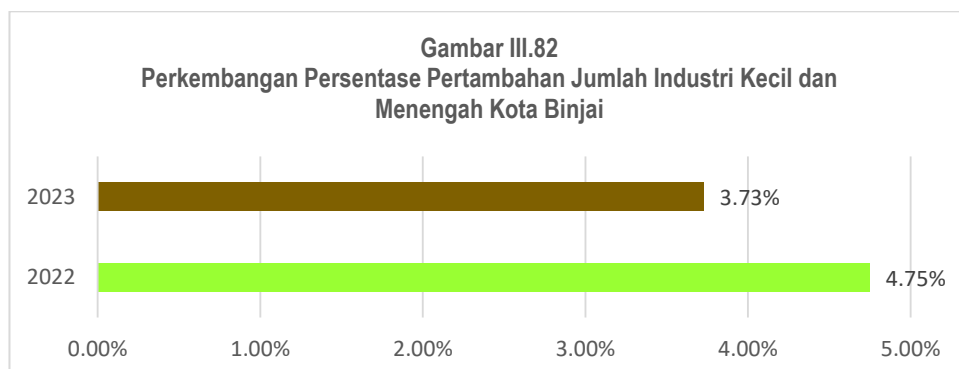
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian dengan tujuan dari menyediakan basis data pembangunan, sebagai bahan analisis kebijakan, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data, menjadi rujukan utama data dan sistem statistik nasional. Jumlah IKM di Kota Binjai tahun 2022 sebanyak 750 IKM dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 778 IKM.



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024

Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Sektor perindustrian merupakan sektor yang cukup berkontribusi bagi pembangunan Kota Binjai. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2022 sebesar 34 industri kecil dan menengah, dengan persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Binjai sebesar 4,75 persen. Pada tahun 2023 mengalami penurunan pertambahan jumlah industri kecil dan menengah menjadi 28 IKM dengan persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Binjai sebesar 3,73 persen.



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024



Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Perindustrian dapat dilihat pada **Lampiran I**

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kebijakan pada fungsi penunjang administrasi pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

1. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
3. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang lebih baik;
4. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah;
6. Intensifikasi kerjasama antar pemerintah daerah;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Binjai memandang perlu melakukan langkah-langkah penguatan fungsi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) dapat dilihat pada Tabel III.41 dan **Lampiran I**

Tabel III.41
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	6.66
	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	2	



	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	30	
2	Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	1.65
	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	30	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	1811	
3	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	persen	
	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dlam negeri usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) -jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dlam negeri usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)		
	----- x 100 %		
	jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dlam negeri usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)		
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	38.66
	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	188,334,000,000	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Total belanja langsung	487,138,000,000	

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Binjai Tahun 2024

2. Sekretariat DPRD

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) dapat dilihat pada **Lampiran I**

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan



tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program. Pemerintah Kota Binjai selalu berhasil menyediakan dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan walikota tepat waktu setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal perencanaan dan pengendalian, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kelurahan, Provinsi Sumatera Utara dan Pusat. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) dapat dilihat pada **Lampiran I**

2. Keuangan

Salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah keuangan. Fungsi penunjang ini merupakan wewenang pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah. Di sisi lain, mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Unsur penunjang keuangan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam fungsi penunjang keuangan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) dapat dilihat pada Tabel III.42 dan **Lampiran I**

Tabel III.42

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan(Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai) Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	19.17
	Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	157,957,105,735	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah APBD	823,788,501,750	
2	Rasio PAD	persen	
	Jumlah PAD		
	----- x 100 %		
	Jumlah Pendapatan pada APBD		
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures	persen	31.52
	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurang transfer expenditure	259,636,732,049	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Jumlah belanja APBD	823,788,501,750	
4	Opini Laporan Keuangan		



5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	-20.68
	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	823,788,501,750	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Total belanja APBD dikurang satu	1,038,614,999,856	
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	-63.30
	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	84,723,041,474.00	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	dibagi total PAD dalam APBD dikurang satu	230,858,054,625	
7	Manajemen Aset		
	a. Apakah ada daftar Asset tetap ? (Ya/Tidak)		ya
	b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? (ya/Tidak)		ya
	c. Apakah ada proses inventarisasi Asset Tahunan ? (Ya/Tidak)		ya
	d. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran ? (Ya/Tidak)		ya
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	persen	0.59
	Nilai realisasi SILPA	5,258,609,928.94	
	----- x 100 %	----- x 100 %	
	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	889,889,760,853.00	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2024

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah . Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam unsur kepegawaian urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



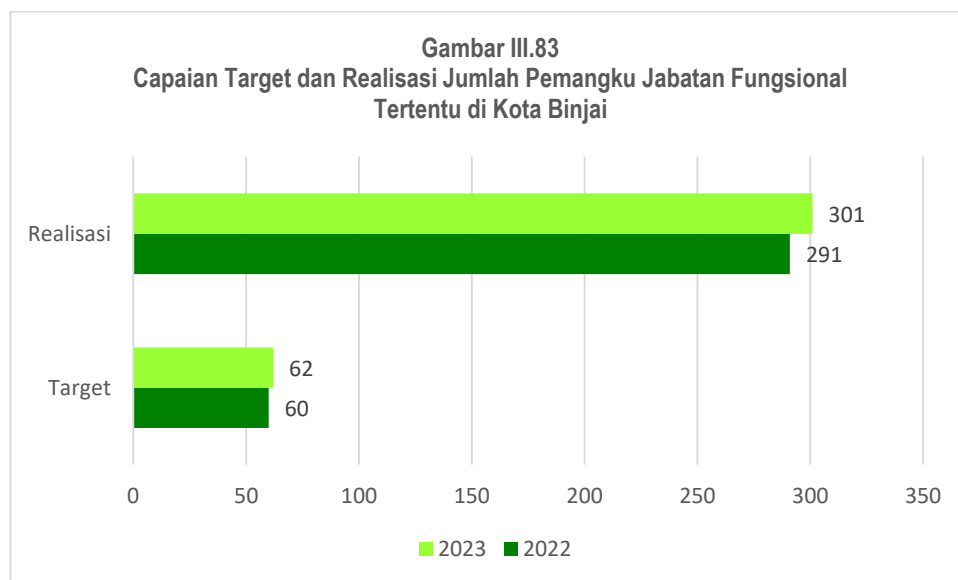
Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN di Kota Binjai tahun 2022 sebesar 44,28 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 72,56 poin. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar 68 poin untuk Indeks Profesionalitas ASN

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, sedangkan jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat pada struktur organisasi.

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kota Binjai tahun 2022 sebanyak 291 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 301 orang. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebanyak 62 orang untuk jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, 2024

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur kepegawaian Urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel III.43 dan Lampiran I



Tabel III.43
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai) Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17.5
	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)		301
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1,720
2	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100
	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi		301
	----- x 100 %		----- x 100 %
	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		301

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, 2024

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Binjai memandang perlu melakukan langkah-langkah penguatan fungsi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam fungsi penunjang pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada Tabel III.43 dan **Lampiran I**



Tabel III.44

Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Kota Binjai) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
	Tingkat kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Binjai, 2023

G. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan ditangani oleh 5 Kecamatan di Kota Binjai. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam unsur kewilayahan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada **Lampiran I**

H. Unsur Pemerintahan Umum

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya



penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat.

Program pembangunan untuk unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

. Untuk lebih jelas mengenai capaian kinerja program dan kegiatan Unsur Pemerintahan Umum dapat dilihat pada **Lampiran I**

3.1.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan adalah suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan kesejahteraan. Untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mengurangi kegagalan pelaksanaan pembangunan maka proses pembangunan di Kota Binjai harus dijalankan melalui kebijakan yang terpadu dan terarah. Adapun kebijakan strategis yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran II**.

3.1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Implementasi otonomi daerah luas, nyata, dan bertanggung jawab serta sebagai pilar utama demokrasi DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi meliputi; fungsi legislasi, budjeting, dan controlin. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah. Tata kelembagaan formal pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance), transparansi, (transparency) dan bertanggungjawab (acuntability) serta



mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang bersih (good governance), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD).

Melalui proses pembahasan yang tidak begitu lama di DPRD Kota Binjai Tahun 2022. Akhirnya LKPJ Walikota Binjai Tahun Anggaran 2021 dapat diterima secara aklamasi oleh DPRD Kota Binjai, dalam bentuk Laporan Panitia Khusus DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Binjai Tahun Anggaran 2022 yang berisi catatan-catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, yang berupa saran, masukan maupun kritikan. Hal ini akan ditindakan lanjuti sebagaimana catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun lalu yang telah kami tindaklanjuti. Adapun mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran 2022 dapat terlihat pada **Lampiran III**.



CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 11 yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Implementasi asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/ lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/ lembaga kepada kepala daerah. Pengaturan dana tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota



Binjai tidak mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Pemerintah Kota Binjai pada tahun anggaran 2023 tidak memberikan tugas pembantuan pada daerah bawahan.



PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Diharapkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tetapi peran utamanya masih tetap sama yaitu untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Berbagai keberhasilan pembangunan tersebut telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun diraih dengan mengalami berbagai tantangan dan hambatan.

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Wali Kota Binjai kepada DPRD Kota Binjai secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Binjai Akhir Tahun Anggaran 2023.



Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kota Binjai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kota Binjai yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kota Binjai membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Wali Kota Binjai Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Binjai. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

LAMPIRAN I
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI	1 Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	1	01	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		K	Rp.	K	Rp.			Meningkatkan kinerja urusan pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas SDM bidang
			2 Peningkatan Jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1	01	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			3 Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran/Output : Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 laporan	55,800,000.00	1 laporan	26,350,000.00			
				1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	100%	187,921,852,322.00	99.33%	186,667,336,483.00			
				1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran/Output : Tersedianya dana Administrasi Tugas ASN	2 dokumen	2,040,500,246.00	2 dokumen	1,606,669,050.00			
				1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Keluaran/Output : Tersedianya Dana Pelaksanaan Akutansi SKPD	2 dokumen	58,878,000.00	2 dokumen	54,893,520.00			
				1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan dan TK Pembina	1 paket	32,334,440.00	1 paket	28,585,248.00			
				1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor; Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan	1 paket	218,570,000.00	1 paket	218,570,000.00			
				1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan; Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Dinas Pendidikan dan SKB); Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas Pendidikan	1 paket	377,102,385.00	1 paket	273,059,246.00			
				1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran/Output : Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengandaan Dinas Pendidikan	1 paket	33,169,200.00	1 paket	23,723,640.00			
				1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pendidikan dan SKB)	2 dokumen	42,739,200.00	2 dokumen	37,946,800.00			
				1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 laporan	75,934,000.00	1 laporan	35,694,645.00			
				1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : Tersedianya Mebeleur Kantor Dinas Pendidikan	100%	184,310,000.00	100%	184,310,000.00			
				1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Tersedianya Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan dan SKB Kota Binjai	1 laporan	364,800,000.00	1 laporan	341,600,000.00			
				1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pendidikan dan SKB Kota Binjai	1 laporan	291,504,000.00	1 laporan	225,765,453.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Pengamanan Kantor/Sekolah; Tersedianya Premi Asuransi BPJS Tenaga Kerja; Tertibnya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan (Dinas Pendidikan, SMPN 1-15 dan SKB)	1 laporan	193,220,520.00	1 laporan	131,891,286.00			
				1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Tersedianya pemeliharaan berkala kendaraan Dinas Kantor	9 unit	82,820,000.00	4 unit	38,511,091.00			
				1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Penengkapan Gedung Kantor	75 unit	291,070,000.00	18 unit	69,879,750.00			
				1	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	keluaran/output :tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	9 unit	360,010,900.00	-	-			
				1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
				1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
				1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100%	457,147,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	1,020,791,000.00	7.35%	75,040,000.00			
				1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Keluaran/Output : Tersedianya Kebutuhan Peningkatan dan Rehabilitas Ruang Kelas Siswa Tingkat SD Negeri/Swasta Kota Binjai	100%	3,576,064,346.00	11.18%	399,853,000.00			
				1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Keluaran/Output : Tersedianya Rehabilitasi Ruang Guru Tingkat SD- SMP Negeri/Swasta Kota Binjai	100%	637,701,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Keluaran/Output : Tersedianya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah Tingkat SD dan SMP Negeri Kota Binjai	100%	361,761,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Keluaran/Output : Tersedianya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Tingkat SD-SMP Negeri/Swasta Kota Binjai	100%	496,129,998.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		100%	304,660,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		100%	2,681,000,000.00	96.56%	2,588,711,732.00			
				1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100%	5,873,882,540.00	100.00%	5,873,807,540.00			
				1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Keluaran/Output : Tersedianya Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SD/MI Paket A	100%	251,675,000.00	65.65%	165,237,000.00			
				1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		100%	31,800,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Keluaran/Output : Tersedianya Kegiatan Perlombaan dan Pelatihan Serta Pembinaan bagi motivasi bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD Kota Binjai	100%	134,040,200.00	96.93%	129,922,200.00			
				1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100%	18,929,066,500.00	0	-			
				1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		100%	1,209,441,000.00	32.92%	398,160,000.00			
				1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
				1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100%	400,079,700.00	98.43%	393,794,365.00			
				1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		100%	453,126,000.00	99.53%	450,990,989.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium		100%	1,450,223,700.00	29.25%	424,233,836.00			
				1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	411,215,952.00	40.40%	166,124,000.00			
				1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Keluaran/Output : Tersedianya Rehab Gedung Sekolah	100%	650,221,450.00	18.17%	118,170,050.00			
				1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Keluaran/Output : Tersedianya Kebutuhan Peningkatan dan Rehabilitas Ruang Kelas Siswa Tingkat SMP Negeri/Swasta Kota Binjai	100%	520,482,298.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		100%	249,474,000.00	0.00%	-			
				1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	491,714,000.00	20.70%	101,778,000.00			
				1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		100%	695,000,000.00	98.95%	687,697,000.00			
				1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100%	4,337,624,000.00	100.00%	4,337,624,000.00			
				1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Keluaran/Output : Tersedianya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online Tingkat SD dan SMP Kota Binjai	100%	277,569,278.00	61.42%	170,483,698.00			
				1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Keluaran/Output : Tersedianya Kegiatan Perlombaan dan Pelatihan Serta Pembinaan bagi motivasi bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP Kota Binjai	100%	151,648,000.00	99.94%	151,552,000.00			
				1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Keluaran/Output : Tersedianya Dana BOS untuk Sekolah Menengah Pertama	100%	10,591,760,000.00	0	-			
				1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
				1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		100%	115,935,000.00	0	-			
				1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100%	225,935,000.00	42.44%	95,879,000.00			
				1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Keluaran/Output : Rehabilitasi Ruang Belajar Berserta Perabotnya Tingkat PAUD	100%	493,945,000.00	99.97%	493,777,000.00			
				1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		100%	80,000,000.00	95.08%	76,063,265.00			
				1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Keluaran/Output : Tersedianya Pengadaan Loker Siswa dan Pengadaan Washtafel, Alat Spayer Elektrik serta Alat Themoghun	100%	35,000,000.00	96.42%	33,748,745.00			
				1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Keluaran/Output : Tersedianya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam PAUD	100%	31,276,525.00	100.00%	31,276,525.00			
				1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		100%	53,471,000.00	52.90%	28,285,000.00			
				1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Keluaran/Output : Tersedianya Pelatihan, Pembinaan, Peningkatan dan Sosialisasi bagi satuan Pendidikan PAUD Kota Binjai; Tersedianya Peningkatan Kapasitas Manajemen BOP	100%	268,425,000.00	78.68%	211,195,692.00			
				1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan								
				1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Keluaran/Output : Tersedianya Pelatihan Dasar pada Sekolah NonFormal/Kesetaraan; Tersedianya Pelatihan, Penguatan dan Pembinaan Manajemen Pengelola Lembaga DIKMAS ; Tersedianya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	67,292,000.00	73.02%	49,138,000.00			
				1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
				1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keluaran/Output : Tersedianya Pengelola Tunjangan, Motivasi PTK PAUD, Pembinaan, Penyelenggaraan OGN, Sinkronisasi Angka Kredit dan Apresiasi bagi TK,SD dan SMP di Kota Binjai	100%	1,748,280,000.00	65.92%	1,152,450,000.00			
				1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keluaran/Output : Tersedianya Diklat Berjenjang, Parenting, Literasi, Capacity Building, Pengembangan Keprofesian,MGMP,KKG dan PPG Bagi Tingkat TK, SD dan SMP Kota Binjai	100%	279,746,758.00	13.94%	39,000,000.00			
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI	1 Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2 Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat; Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk
				1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	65,587,038,953.00	1 Tahun	64,061,715,626.00			
				1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan penambahan daya	1 Tahun	30,020,000.00	1 Tahun	29,935,101.00			
				1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	146,337,600.00	0	-			
				1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK dan Makan Minum Rapat)	1 Paket	187,252,200.00	1 Paket	171,988,173.00			
				1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Tersedianya Carang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	74,866,800.00	1 Paket	55,323,350.00			
				1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	20,034,000.00	1 dokumen	10,620,000.00			
				1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	1 laporan	18,399,600.00	1 laporan	12,767,500.00			
				1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	140,198,000.00	1 laporan	51,693,630.00			
				1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4,800,000.00	1 laporan	4,700,000.00			
				1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1,329,917,260.00	1 laporan	1,075,576,381.00			
				1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	2,045,378,640.00	12 laporan	1,799,951,928.00			
				1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas	100 persen	161,833,735.00	93.25 persen	150,908,322.00			
				1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	55,600,000.00	7.38 persen	4,103,000.00			
				1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	100 persen	487,314,441.00	99.12 persen	483,048,370.00			
				1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Puskesmas/Pustu yang rehabilitasi	100 persen	5,085,663,573.00	99.56 persen	5,063,560,817.00			
				1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan sesuai standar	100 persen	983,471,400.00	99.85 persen	982,000,000.00			
				1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar	100 persen	5,244,297,878.00	87.36 persen	4,581,298,406.00			
				1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar	100 persen	5,975,488,800.00	99.40 persen	5,939,463,934.00			
				1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Keluaran/Output : Jumlah Alat Kesehatan yang dikalibrasi	100 persen	369,444,800.00	100 persen	369,444,800.00			
				1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Keluaran/Output : Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 persen	2,342,150,707.00	53.52 persen	1,253,521,879.00			
				1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Keluaran/Output : Ketersediaan BMHP di Puskesmas	100 persen	1,722,304,359.00	99.90 persen	1,720,525,115.00			
				1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota								
				1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Keluaran/Output : Cakupan Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100 persen	1,708,967,400.00	93.82 persen	1,603,321,652.00			
				1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Keluaran/Output : Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 persen	20,294,560.00	0.00	-			
				1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Keluaran/Output : Cakupan Balita mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 persen	223,858,000.00	70.73 persen	158,356,200.00			
				1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Keluaran/Output : Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 persen	183,200,000.00	99.89 persen	183,000,000.00			
				1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar	100 persen	98,138,400.00	87.94 persen	86,305,000.00			
				1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	100 persen	31,595,400.00	99.06 persen	31,300,000.00			
				1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai Standar	100 persen	14,568,000.00	0	-			
				1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100 persen	45,000,000.00	96 persen	43,200,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan pada OrangTerduga TB sesuai Standar	100 persen	143,400,000.00	82.36 persen	118,100,000.00			
				1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Keluaran/Output : Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS sesuai Standar	100 persen	6,000,000.00	5 persen	300,000.00			
				1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Keluaran/Output : Cakupan Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi KLB	100 persen	46,040,000.00	88.49 persen	40,740,000.00			
				1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Kasus Gizi Buruk/Kurang yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	3,676,802,000.00	70.04 persen	2,575,408,450.00			
				1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Keluaran/Output : Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 persen	9,360,000.00	18.16 persen	1,700,000.00			
				1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Keluaran/Output : Persentase Keluarga menghuni Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	100 persen	206,393,000.00	100 persen	206,393,000.00			
				1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Keluaran/Output : Persentase Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 persen	36,373,400.00	98.89 persen	35,970,000.00			
				1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Keluaran/Output : Persentase Penyelidikan Epidemiologi pada kelurahan yang terjadi Kejadian Luar Biasa < 24 Jam	100 persen	288,483,291.00	63.37 persen	182,818,000.00			
				1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Keluaran/Output : Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 persen	16,000,000.00	92.5 persen	14,800,000.00			
				1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Keluaran/Output : Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Beresiko pada saat Krisis Kesehatan	100 persen	90,419,625.00	100 persen	90,419,625.00			
				1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Keluaran/Output : Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit DBD	100 persen	671,659,149.00	93.41 persen	627,400,000.00			
				1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Keluaran/Output : Persentase Masyarakat Memiliki JKN di Kota Binjai	100 persen	16,566,267,880.00	43.27 persen	7,167,887,360.00			
				1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Keluaran/Output : Jumlah Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	100 persen	13,993,577,665.00	89.69 persen	12,551,353,595.00			
				1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Puskesmas terakreditasi	100 persen	751,900,000.00	25.91 persen	194,852,500.00			
				1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Keluaran/Output : Persentase Penduduk mendapatkan pelayanan gawat darurat	100 persen	569,092,000.00	67.92 persen	386,506,080.00			
				1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
				1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Keluaran/Output : Tersusunnya Profil Kesehatan Kota Binjai	1 dokumen	19,311,000.00	0	-			
				1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan sesuai standar yang dilaksanakan	100 persen	52,400,000.00	20.42 persen	10,700,000.00			
				1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
				1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Pembinaan dan Pengawasan SDM	100 persen	42,268,600.00	0	-			
				1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi	100 persen	868,848,300.00	28.06 persen	243,842,000.00			
				1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
				1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional								
				1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Keluaran/Output : Persentase Pengawasan Obat Peredaran Obat dan Bahan Berbahaya di Sarana Pelayanan Kefarmasian	100 persen	86,598,000.00	6.93 persen	6,000,000.00			
				1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
				1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Keluaran/Output : Persentase Sarana P-IRT yang memenuhi kerentuan dan memiliki Sertifikat	100 persen	157,621,800.00	8.25 persen	13,000,000.00			
				1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
				1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Keluaran/Output : Cakupan Sarana Produksi Makanan dan Minuman IRT yang diperiksasesuai standar	100 persen	113,769,894.00	0	-			
				1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
				1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100 persen	71,449,800.00	0	-			
				1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Keluaran/Output : Rumah Tangga berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 persen	550,000,000.00	91.36 persen	502,500,000.00			
				1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Keluaran/Output : Jumlah Bimbingan Teknis UKBM yang terlaksana	100 persen	36,353,000.00	74.39 persen	27,044,000.00			
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	RSUD Dr.RM DJOELHAM KOTA BINJAI	1 Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Melakukan evaluasi kinerja RSUD Dr. Djoelham dari Type B menjadi Type C dan meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan
			2 Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : terbayarnya gaji dan tunjangan	1 tahun	35,572,516,344.00	1 tahun	34,609,232,613.00			
				1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : terlaksananya pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	436,417,200.00	12 dokumen	393,526,500.00			
				1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran/Output : Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	7,698,400.00	12 laporan	5,576,750.00			
				1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran/Output : Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	2 dokumen	1,926,500.00	2 dokumen	894,000.00			
				1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	55,205,000.00	0	-			
				1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81,734,000.00	1 Paket	51,645,300.00			
				1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	120,037,600.00	0	-			
				1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,123,000.00	0	-			
				1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	199,977,145.00	0	-			
				1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	55,232,000.00	0	-			
				1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1,134,019,556.00	12 laporan	1,031,859,532.00			
				1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,363,920,000.00	12 laporan	1,244,445,036.00			
				1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	71,488,700.00	46.26 persen	33,067,000.00			
				1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	79,060,000.00	18.32 persen	14,485,500.00			
				1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	62,698,800.00	70.96 persen	44,492,300.00			
				1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	260,105,706.00	100 persen	260,105,706.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	118,870,000.00	84.98 persen	101,020,500.00			
				1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	162,120,000.00	40.74 persen	66,053,280.00			
				1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								
				1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keluaran/Output : terselenggaranya pelayanan BLUD	100 persen	30,479,438,003.00	100.38 persen	30,595,886,438.00			
				1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
				1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran/Output : diadakannya sekat pembatas trolly emergensi, pallet plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipal, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, gergaji forensik serta peralatan untuk kegiatan ins. Forensik; tersedianya peralatan penunjang di instalasi-instalasi penunjang medis	100 persen	52,828,769.00	100 persen	52,828,769.00			
				1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 persen	11,287,434,926.00	48.46 persen	5,469,726,342.00			
				1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Keluaran/Output : pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksanan dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi; sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum , air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	100 persen	143,590,000.00	0	-			
				1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 persen	18,042,200.00	25.03 persen	4,515,600.00			
				1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 persen	7,967,720.00	0	-			
				1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Keluaran/Output : jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 persen	9,900,000.00	0	-			
				1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 persen	4,707,960,000.00	90.06 persen	4,240,027,747.00			
				1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100 persen	93,491,490.00	0	-			
				1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Keluaran/Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 persen	10,361,000.00	0	-			
				1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
				1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
				1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Keluaran/Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 persen	49,226,800.00	12.51 persen	6,160,000.00			
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BINJAI	1 Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Memaksimalkan kinerja pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan di masyarakat melalui pelaksanaan:
			2 penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			3 peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			4 penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat	1	03	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah								6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	5,326,921,179.00	93.77 persen	4,995,014,252.00			7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	229,893,000.00	95.38 persen	219,269,761.00			
				1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 persen	7,536,000.00	46.58 persen	3,510,000.00			
				1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Bahan Logistik Kantor	100 persen	87,743,260.00	43.19 persen	37,893,300.00			
				1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah barang Cetak dan Penggandaan	100 persen	35,283,600.00	86.49 persen	30,517,600.00			
				1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	22,996,800.00	44.79 persen	10,300,000.00			
				1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	168,444,000.00	98.57 persen	166,029,740.00			
				1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	40,200,000.00	98.51 persen	39,600,000.00			
				1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	104,038,100.00	82.93 persen	86,275,228.00			
				1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	64,642,800.00	72.96 persen	47,163,800.00			
				1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan					Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
					1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	118,910,000.00	95.23 persen	113,239,554.00			
					1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100 persen	171,330,000.00	80.09 persen	137,225,500.00			
					1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	100 persen	11,160,000.00	33.24 persen	3,710,000.00			
					1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100 persen	20,000,000.00	25.5 persen	5,100,000.00			
					1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
					1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
					1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	100 persen	264,660,000.00	0	-			
					1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Keluaran/Output : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	100 persen	7,816,962,408.00	64.65 persen	5,053,563,500.00			
					1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Keluaran/Output : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	100 persen	1,520,881,000.00	34.35 persen	522,459,000.00			
					1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
					1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
					1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Keluaran/Output : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	100 persen	861,316,000.00	53.56 persen	461,316,000.00			
					1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Keluaran/Output : Tersedianya Jaringan Air Bersih	100 persen	864,378,800.00	90.11 persen	778,874,226.00			
					1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
					1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Tersedianya Data	100 persen	346,399,800.00	0	-			
					1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Keluaran/Output : Terlaksananya operasional UPTD air limbah domestik	100 persen	347,062,400.00	51.24 persen	177,826,350.00			
					1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		100 persen	3,540,473,000.00	97.70 persen	3,458,930,000.00			
					1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
					1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran/Output : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun	100 persen	5,558,018,092.00	74.17 persen	4,122,585,620.00			
					1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Keluaran/Output : Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	100 persen	5,511,506,342.00	67.69 persen	3,730,834,104.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan							Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD			
					1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Keluaran/Output : Panjang Saluran Drainase yang dioperasikan dan dipelihara	100 persen	1,510,790,100.00	41.18 persen	622,209,800.00						
					1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
					1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											
					1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	100 persen	50,474,822,461.00	66.42 persen	33,527,580,474.00						
					1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Rehabilitasi dan Renovasi Gedung	100 persen	7,861,519,336.00	64.30 persen	5,054,768,802.00						
					1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1,683,772,800.00	93.47 persen	1,573,747,800.00						
					1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
					1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											
					1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Keluaran/Output : Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan / Jembatan	100 persen	143,640,000.00	0	-						
					1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Keluaran/Output : Terbangunnya jalan	100 persen	281,170,306.00	96.45 persen	271,190,355.00						
					1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Keluaran/Output : Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	100 persen	24,517,882,971.00	62.22 persen	15,255,099,669.00						
					1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Keluaran/Output : Panjang Jalan yang Direhabilitasi	100 persen	3,820,949,821.00	77.93 persen	2,977,869,817.00						
					1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Keluaran/Output : Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 persen	5,142,125,216.00	22.49 persen	1,156,678,600.00						
					1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	100 persen	796,594,000.00	72.53 persen	577,764,000.00						
					1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
					1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											
					1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100 persen	178,868,000.00	43.69 persen	78,140,592.00						
					1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
					1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100 persen	822,476,700.00	100 persen	822,476,700.00						
					1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
					1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Keluaran/Output : tersedianya Data Informasi	100 persen	82,599,000.00	0	-						
					1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
					1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 persen	66,219,400.00	43.49 persen	28,800,000.00						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI	1 Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Memaksimalkan kinerja pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan:
				1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	3,620,212,060.00	90.22 persen	3,266,112,642.00			
				1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	186,660,000.00	88.43 persen	165,060,000.00			
				1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,112,884.00	0	-			
				1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	137,491,437.00	31.75 persen	43,653,950.00			
				1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	9,843,480.00	10 paket	7,950,500.00			
				1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	26,712,000.00	45.67 persen	12,200,000.00			
				1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	41,360,000.00	25 laporan	29,240,500.00			
				1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4,440,000.00	1 laporan	1,000,000.00			
				1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20,648,903,213.00	12 laporan	20,515,605,595.00			
				1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	441,430,359.00	12 laporan	367,584,784.00			
				1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	664,322,700.00	38.84 persen	258,035,200.00			
				1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	54,610,000.00	20.77 persen	11,345,000.00			
				1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	49,590,000.00	0	-			
				1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	12,200,000.00	77.05 persen	9,400,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
				1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
				1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 dokumen	339,890,016.00	1 dokumen	245,528,172.00			
				1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
				1	04	02	2.06	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 persen	202,800,000.00	83.33 persen	169,000,000.00			
				1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
				1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha								
				1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Keluaran/Output : Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	1 dokumen	99,825,000.00	1 dokumen	99,825,000.00			
				1	04	03	2.03	02	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh							
				1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Keluaran/Output : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	120 Unit	223,600,000.00	0	-			
				1	04	05	2.01		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
				1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
				1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Keluaran/Output : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 persen	19,586,323,913.00	67.11 persen	13,144,684,034.00			
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI	1 Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
				1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Terciptanya kesejahteraan pegawai PNS/ASN	100 persen	3,390,709,375.00	94.11 persen	3,190,888,318.00			
				1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Tersedianya laporan Keuangan kantor BPBD	12 laporan	203,220,000.00	12 laporan	187,220,000.00			
				1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	12 paket	34,575,438.00	12 paket	31,379,200.00			
				1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	20 paket	134,070,000.00	20 paket	133,572,000.00			
				1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya alat tulis kantor dan Makanan dan minuman penanggulangan bencana	100 persen	42,774,600.00	67.80 persen	29,003,000.00			
				1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Terlaksananya tata administrasi dengan baik	100 persen	32,948,880.00	54.09 persen	17,821,125.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Meningkatkan wawasan dan informasi petugas BPBD	100 persen	3,017,000.00	76.23 persen	2,300,000.00			
				1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Tersedianya makanan dan minuman	100 persen	22,379,200.00	59.72 persen	13,364,000.00			
				1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	100 persen	111,086,000.00	70.34 persen	78,141,612.00			
				1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : Pengadaan Mebel yang terpenuhi	100 persen	82,483,200.00	92.87 persen	76,600,000.00			
				1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Responsif terhadap informasi masyarakat	24 laporan	141,599,691.00	24 laporan	114,191,700.00			
				1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Terciptanya suasana kerja yang bersih dan sehat	12 laporan	110,890,400.00	12 laporan	106,497,038.00			
				1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Maksimalnya fungsi kendaraan operasional kantor BPBD	100 persen	614,222,873.00	79.63 persen	489,132,710.00			
				1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 persen	65,920,000.00	53.84 persen	35,491,000.00			
				1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Terciptanya kantor lebih baik dan indah	0	-	0	-			
				1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
				1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
				1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Penyusunan perda bencana kota binjai							
				1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Terlaksananya kesiapsiagaan petugas BPBD	100 persen	386,349,202.00	79.54 persen	307,300,000.00			
				1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Terciptanya kesejahteraan pegawai satgas BPBD	12 dokumen	2,916,000,000.00	12 dokumen	2,916,000,000.00			
				1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : penanganan bencana yang memadai							
				1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
				1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Terciptanya kesejahteraan pegawai satgas BPBD	100 persen	3,024,600,000.00	100 persen	3,024,600,000.00			
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	SATPOL PP KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Penegakan disiplin PNS, menekan peredaran narkoba dan melakukan penindakan terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB
				1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 persen	5,021,328,759.00	96.86 persen	4,863,461,147.00			
				1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	24 dokumen	145,500,000.00	24 dokumen	138,000,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran/Output : Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	245 paket	140,326,200.00	245 paket	140,325,000.00			
				1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan							
				1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	10,320,900.00	3 paket	10,318,805.00			
				1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	124,281,482.00	5 paket	124,018,802.00			
				1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	47,829,980.00	5 paket	44,571,980.00			
				1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	32 dokumen	12,085,200.00	32 dokumen	12,085,000.00			
				1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen	180,000.00	0	-			
				1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	05	01	3.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 persen	24,576,000.00	100 persen	24,576,000.00			
				1	05	01	2.08		Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 laporan	75,542,964.00	3 laporan	57,765,405.00			
				1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	29,803,680.00	2 laporan	27,235,080.00			
				1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelayakan pajak dan perizinannyahara dan dib	100 persen	408,160,400.00	86.23 persen	351,975,075.00			
				1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 persen	23,060,000.00	94.10 persen	21,699,200.00			
				1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
				1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Keluaran/Output : Jumlah laporan akuntabilitas instansi pemerintah	100 persen	4,759,560,000.00	99.98 persen	4,758,562,848.00			
1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat serta melakukan Update data
				1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
				1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	100 persen	3,490,385,671.00	89.40 persen	3,120,418,761.00			4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran/Output : Honor administrasi keuangan	2 dokumen	427,012,800.00	2 dokumen	407,585,020.00			5 PROGRAM PENANGAN BENCANA
				1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
				1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	100 persen	51,910,000.00	86.88 persen	45,099,405.00			
				1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Instalasi listrik penerangan kantor tersedia	100 persen	10,796,800.00	0	-			
				1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : alat tulis kantor	100 persen	76,815,000.00	79.15 persen	60,802,600.00			
				1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Cetak dan penggandaan tersedia	100 persen	17,040,720.00	87.66 persen	14,937,360.00			
				1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Terlaksananya Kegiatan	100 persen	15,505,200.00	0	-			
				1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Biaya perjalanan dinas luar daerah	100 persen	206,566,000.00	18.13 persen	37,445,400.00			
				1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	19,425,000.00	100 persen	19,425,000.00			
				1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Surat Menyurat dan Materai Tersedia	100 persen	3,894,800.00	64.09 persen	2,496,200.00			
				1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	155,530,308.00	66.71 persen	103,752,002.00			
				1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 persen	54,569,640.00	98.31 persen	53,647,080.00			
				1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 persen	74,340,000.00	62.73 persen	46,637,200.00			
				1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	100 persen	42,120,000.00	12.11 persen	5,100,000.00			
				1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
				1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
				1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	100 persen	159,136,608.00	47.01 persen	74,810,800.00			
				1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
				1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
				1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran/Output : Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Penyediaan Alat Bantu	100 persen	46,405,682.00	0	-			
				1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran/Output : Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100 persen	70,922,055.00	0	-			
				1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	110,352,800.00	66.85 persen	73,771,301.00			
				1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah PMKS yang Mendapatkan Manfaat Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	100 persen	2,220,000.00	100 persen	2,220,000.00			
				1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
				1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota								
				1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Program BPNT Terlaksana dengan Baik; Program Keluarga Harapan Berjalan dengan Baik; Verifikasi dan Validasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dilaksanakan dengan Baik	100 persen	177,554,131.00	74.43 persen	132,150,000.00			
				1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah penerima manfaat KPM yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	32,801,680.00	0	-			
				1	06	06			PROGRAM PENANGAN BENCANA								
				1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
				1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	504,465,189.00	78.65 persen	396,751,500.00			
				1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
				1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
				2	06	07	3.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jasa perawatan TMP Syuhada yang tersedia	100 persen	77,964,955.00	73.88 persen	57,603,704.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	1 Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			3 Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA								2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			4 Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			5 Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)	2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran/Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	4,804,780.00	1 dokumen	2,690,000.00			4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			6 Penguatan kapasitas dan ketrampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar	2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,803,940.00	1 dokumen	675,000.00			
			7 Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat	2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,899,940.00	1 dokumen	1,307,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			8 Peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan perguruan tinggi	2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	1 dokumen	2,104,800.00	1 dokumen	1,745,000.00			
				2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2,071,200.00	1 dokumen	1,285,000.00			
				2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran/Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	3,592,800.00	1 dokumen	3,102,000.00			
				2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah gaji dan tunjangan ASN	34 orang/12 bulan	3,566,751,862.00	34 orang/12 bulan	3,368,753,366.00			
				2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150 dokumen	129,020,400.00	150 dokumen	123,515,997.00			
				2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1,847,400.00	1 laporan	1,570,000.00			
				2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
				2	07	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Keluaran/Output : Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah	12 laporan	138,390,000.00	12 laporan	138,360,000.00			
				2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran/Output : Jumlah pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah							
				2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	22,888,000.00	0	-			
				2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	33,037,920.00	9 paket	5,614,000.00			
				2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	79 paket	162,345,240.00	75 paket	108,350,319.00			
				2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	84,324,000.00	13 paket	62,772,375.00			
				2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	81,966,000.00	35 laporan	60,125,085.00			
				2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	14,366,160.00	2 unit	5,900,000.00			
				2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	21,589,800.00	0	-			
				2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	22,560,000.00	12 laporan	22,520,000.00			
				2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	686,325,828.00	12 laporan	322,146,980.00			
				2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	46,641,560.00	12 laporan	45,081,000.00			
				2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	356,040,000.00	29 unit	206,938,941.00			
				2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58 unit	36,390,000.00	20 unit	6,680,000.00			
				2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	290,623,446.00	3 unit	150,715,446.00			
				2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	10,370,000.00	7 unit	3,700,000.00			
				2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
				2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
				2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Keluaran/Output :Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	181 orang	193,768,000.00	181 orang	10,140,000.00			
				2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
				2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								
				2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Keluaran/Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 persen	107,292,600.00	100 persen	107,292,600.00			
				2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
				2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Keluaran/Output : Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	542 orang	79,070,700.00	542 orang	78,240,000.00			
				2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
				2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
				2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Keluaran/Output : Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 laporan	5,810,000.00	0	-			
				2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
				2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah perselisihan yang dicegah	100 persen	51,762,000.00	99.22 persen	51,360,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
				2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	2,664,070,309.00	95.45 persen	2,542,981,388.00			4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				2	08	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	175,234,400.00	1 dokumen	161,216,709.00			5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4,069,815.00	12 paket	4,069,550.00			
				2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	70,461,528.00	12 paket	69,407,200.00			
				2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	11,917,620.00	12 paket	8,936,440.00			
				2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	68,359,000.00	81.74 persen	55,874,401.00			
				2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah kendaraan dinas							
				2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : jumlah Paket Mebel yang Disediakan							
				2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 persen	35,795,600.00	100 persen	35,795,600.00			
				2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,000,000.00	12 laporan	2,250,000.00			
				2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8,850,000.00	12 laporan	8,057,000.00			
				2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	206,734,188.00	12 laporan	194,207,396.00			
				2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	42,290,000.00	94.40 persen	39,921,885.00			
				2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	12,609,600.00	74.98 persen	9,455,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	30,000,000.00	100 persen	30,000,000.00			
				2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	7,320,000.00	74.45 persen	5,450,000.00			
				2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
				2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
				2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	15,594,225.00	93.37 persen	14,559,645.00			
				2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
				2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	46,875,200.00	88.73 persen	41,591,000.00			
				2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
				2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	217,491,112.00	26.44 persen	57,497,940.00			
				2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
				2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	102,577,223.00	90.73 persen	93,064,335.00			
				2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
				2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	6,747,943.00	1 dokumen	2,090,000.00			
				2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
				2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output :Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37,686,000.00	1 dokumen	31,878,000.00			
				2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	52,528,200.00	1 dokumen	34,835,000.00			
				2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Operasional Kegiatan PUSPAGA	1 dokumen	25,915,800.00	1 dokumen	23,100,000.00			
				2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
				2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	46,874,600.00	1 dokumen	41,681,000.00			
				2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	181,976,600.00	10 orang	168,420,000.00			
				2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	63,737,500.00	0	-			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	1 Peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaku UMKM	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Pengembangan produk unggulan UMKM kemitraan antar usaha	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran/Output : Dokumen Renja yang tersusun	1 dokumen	5,915,340.00	0	-			
				2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran/Output : Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1 dokumen	3,530,466.00	1 dokumen	2,841,800.00			
				2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	100 persen	9,404,927,226.00	83.1226177	8,590,793,076.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Kegiatan jasa administrasi keuangan yang terlaksana	1	211,151,568.00	0.80350623	169,661,600.00			
				2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 tahun	4,173,822.00	1 tahun	2,685,000.00			
				2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan makan minum kantor yang tersedia	1 tahun	52,336,944.00	1 tahun	44,786,640.00			
				2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan dinas yang tersedia	1 tahun	5,715,612.00	1 tahun	3,499,680.00			
				2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 tahun	16,416,000.00	1 tahun	8,835,000.00			
				2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana	1 tahun	131,851,000.00	1 tahun	66,498,270.00			
				2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 persen	189,092,736.00	65 persen	122,904,395.00			
				2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang terlaksana	100 persen	232,859,832.00	95.34 persen	222,004,318.00			
				2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang terlaksana	100 persen	97,270,000.00	61.35 persen	59,674,450.00			
				2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terlaksana	100 persen	21,500,000.00	22.79 persen	4,900,000.00			
				2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang terlaksana	100 persen	7,320,000.00	34.08 persen	2,495,000.00			
				2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
				2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
				2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Keluaran/Output : Dilaksanakannya Kegiatan PRSU; Dilaksanakannya kegiatan Ulang Tahun Kota Binjai; Dipantaunya data harga pangan strategis secara berkala di 3 pasar Kota Binjai; Penyusunan Neraca Bahan Makanan	100 persen	11,313,200.00	39.95 persen	4,520,000.00			
				2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
				2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Keluaran/Output : Penyusunan Rencana tanam,pengembangan peternakan dan perikanan 2023 dan pencapaian target tanam,peternakan dan perikanan tahun 2023; Pos Simpul Koordinasi (Posko) yang terlaksana; Statistik Pertanian	3 dokumen	26,999,640.00	0	-				
				2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									
				2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Keluaran/Output : Diperolehnya data pola pangan harapan (PPH) di kota Binjai	1 laporan	11,751,570.00	0	-				
				2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Keluaran/Output : Memotivasinya PKK dan masyarakat /keluarga dalam penganekaragaman pangan lokal dengan pola menu B2SA dengan pemanfaatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	100 persen	58,204,515.00	45.40 persen	26.426.400.00				
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI	1 Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Memaksimalkan kinerja pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan:	
				2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
				2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									
				2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
				2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,000,000.00	0	-				
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI	1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, green office, sekolah berbudaya lingkungan dan adipura	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :	
			2 Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan izin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			3 Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			4 Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			5 Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	100 persen	8,088,556,301.00	97.780762	7,678.691,249.00			4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	518,220,000.00	12 dokumen	442,930,868.00			5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	11	01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah								6 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	10,943,712.00	75.76 persen	8,291,020.00			
				2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	56,615,994.00	61.90 persen	35,044,514.00			
				2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	20,107,672.00	60.63 persen	12,190,980.00			
				2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi	100 persen	12,020,400.00	49.58 persen	5,960,000.00			
				2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	4,225,637.00	81.71 persen	3,452,592.00			
				2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	44,974,000.00	47.64 persen	21,424,900.00			
				2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	3,940,500.00	50.75 persen	2,000,000.00			
				2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	396,061,129.00	98.49 persen	390,078,248.00			
				2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	99,491,875.00	76.74 persen	76,351,690.00			
				2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	158,890,000.00	49.55 persen	78,737,750.00			
				2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	29,040,000.00	59.38 persen	17,244,500.00			
				2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	39,276,000.00	87.07 persen	34,200,000.00			
				2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	6,100,000.00	29.51 persen	1,800,000.00			
				2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
				2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota								
				2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	150,388,640.00	1 dokumen	104,302,820.00			
				2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
				2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan Hidup Kabupaten / Kota/ atau Kerusakan Lingkungan								
				2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualtias Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	100 persen	183,547,320.00	64.24 persen	117,910,600.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
				2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
				2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Keluaran/Output : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	2,595,276,932.00	89.57 persen	2,324,479,300.00			
				2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 persen	38,103,240.00	29 persen	11,050,000.00			
				2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
				2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
				2	11	06	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Keluaran/Output : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 persen	126,172,376.00	90.36 persen	114,011,814.00			
				2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
				2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								
				2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,Diangkut,Diolah,Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	100 persen	3,611,380,400.00	94.83 persen	3,424,803,100.00			
				2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Keluaran/Output : Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100 persen	1,640,195,498.00	90.31 persen	1,481,287,000.00			
				2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk pemilahan, pengumpulan, pengankuta, pengelolaan, dan pemrosesan akhir	100 persen	2,826,085,056.00	93.10 persen	2,630,967,600.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pelayanan untuk pencapaian kepemilikan KTP di Kota Binjai melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	2,862,641,797.00	92.55 persen	2,649,307,442.00			
				2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	94,200,000.00	12 dokumen	90,440,000.00			
				2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	22,105,920.00	37.66 persen	8,326,220.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	128,271,600.00	1 paket	122,075,000.00			
				2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	86,394,600.00	1 paket	57,692,200.00			
				2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	62,004,000.00	1 paket	41,928,000.00			
				2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4,006,800.00	1 dokumen	3,916,744.00			
				2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	11,024,400.00	38.14 persen	4,205,028.00			
				2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	149,531,000.00	89.67 persen	134,079,662.00			
				2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	12,552,000.00	24.38 persen	3,060,000.00			
				2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	324,654,000.00	12 laporan	282,761,738.00			
				2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	503,410,800.00	1 laporan	450,324,512.00			
				2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	76,840,000.00	76.60 persen	58,859,325.00			
				2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	97,832,000.00	59.77 persen	58,472,000.00			
				2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	98,435,000.00	55.70 persen	54,830,000.00			
				2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	51,240,000.00	37.13 persen	19,025,000.00			
				2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
				2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk								
				2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100 persen	536,897,300.00	99.99 persen	536,822,300.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								1 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 persen	200,246,000.00	99.36 persen	198,962,000.00			
				2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran/Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 persen	52,320,000.00	95.27 persen	49,846,000.00			
				2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 persen	1,301,400,000.00	97.70 persen	1,271,462,405.00			
				2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	203,809,400.00	80.78 persen	164,628,600.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI								2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	3,259,578,318.00	94.06 persen	3,066,125,796.00			
				2	14	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	139,879,400.00	12 dokumen	129,987,060.00			
				2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	6,231,066.00	2 laporan	6,231,066.00			
				2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
				2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	18,648,000.00	1 paket	18,648,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	80,700,600.00	61.61 persen	49,722,000.00			
				2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	17,479,860.00	30.32 persen	5,299,860.00			
				2	14	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 persen	18,498,000.00	40.53 persen	7,497,000.00			
				2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	81,507,000.00	61.16 persen	49,847,198.00			
				2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	71,006,220.00	12 laporan	62,134,153.00			
				2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	145,020,000.00	12 laporan	132,528,192.00			
				2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	75,908,000.00	66.29 persen	50,321,375.00			
				2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	277,504,200.00	55.37 persen	153,667,596.00			
				2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	17,460,000.00	66.70 persen	11,680,000.00			
				2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
				2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
				2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		100 persen	80,000,000.00	100 persen	80,000,000.00			
				2	14	02	2.02		Pemetakan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
				2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Keluaran/Output : jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 laporan	64,200,000.00	1 laporan	63,224,500.00			
				2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Keluaran/Output : Data Keluarga se Kota Binjai Tersedia	1 laporan	21,600,000.00	1 laporan	21,600,000.00			
				2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 laporan	127,800,000.00	12 laporan	118,038,344.00			
				2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
				2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal								
				2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisai yang mendapatkan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	100 persen	120,000,000.00	99.94 persen	119,926,000.00			
				2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	100 persen	150,000,000.00	100 persen	150,000,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 laporan	943,713,800.00	5 laporan	862,429,726.00			
				2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
				2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0				
				2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Keluaran/Output : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 persen	106,200,000.00	90.57 persen	96,184,000.00			
				2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
				2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 persen	16,200,000.00	100 persen	16,200,000.00			
				2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen	728,708,000.00	81.02 persen	590,402,200.00			
				2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Keluaran/Output : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 persen	881,401,320.00	74.81 persen	659,356,000.00			
				2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 persen	11,700,000.00	89.74 persen	10,500,000.00			
				2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB								
				2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	100 persen	184,000,000.00	99.97 persen	183,955,000.00			
				2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Keluaran/Output : Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100 persen	142,500,000.00	94.03 persen	133,999,000.00			
				2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
				2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
				2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran/Output : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 persen	360,000,000.00	98.04 persen	352,950,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran/Output : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 persen	1,260,000,000.00	100 persen	1,260,000,000.00			
				2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
				2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 persen	54,608,400.00	94.03 persen	51,346,364.00			
				2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	100 persen	125,997,800.00	94.49 persen	119,060,000.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA								
				2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	4,517,748,982.00	84.53 persen	3,819,044,759.00			
				2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output :Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	208,570,000.00	99.42 persen	207,360,000.00			
				2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran/Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	186,480,000.00	100 persen	186,480,000.00			
				2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	19,290,690.00	99 persen	19,098,500.00			
				2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	142,617,798.00	90.11 persen	128,514,000.00			
				2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	151,722,718.00	87.75 persen	133,140,000.00			
				2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	83,302,000.00	99.63 persen	82,992,632.00			
				2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	6,000,000.00	66.67 persen	4,000,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	364,210,308.00	85.19 persen	310,268,872.00			
				2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	72,900,000.00	99.91 persen	72,832,766.00			
				2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	115,507,400.00	80.26 persen	92,708,750.00			
				2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	515,760,000.00	95.06 persen	490,270,000.00			
				2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	16,730,000.00	96.83 persen	16,200,000.00			
				2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	211,807,675.00	98.76 persen	209,173,675.00			
				2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
				2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota								
				2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 persen	437,768,926.00	99.41 persen	435,200,235.00			
				2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Keluaran/Output : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	100 persen	423,567,948.00	59.95 persen	253,920,000.00			
				2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
				2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 persen	46,398,000.00	100 persen	46,398,000.00			
				2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
				2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100 persen	95,000,000.00	97.05 persen	92,200,000.00			
				2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	94,461,000.00	86.82 persen	82,011,000.00			
				2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100 persen	160,595,000.00	50.46 persen	81,038,000.00			
				2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota								
				2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	3,825,360,000.00	99.91 persen	3,821,971,622.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	15	02	2	09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota								
				2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 persen	935,880,000.00	99.93 persen	935,261,489.00		
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA								2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
				2	16	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	2,047,897,529.00	94.12 persen	1,927,553,051.00		
				2	16	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	115,843,600.00	98.58 persen	114,200,000.00		
				2	16	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 persen	25,000,000.00	18.01 persen	4,503,400.00		
				2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 persen	20,912,400.00	99.94 persen	20,900,000.00		
				2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 persen	115,706,561.00	90.29 persen	104,467,680.00		
				2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	100 persen	78,543,400.00	83.46 persen	65,555,300.00		
				2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100 persen	77,464,800.00	88.99 persen	68,940,000.00		
				2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	63,336,000.00	46.79 persen	29,634,000.00		
				2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	146,342,000.00	29.35 persen	42,952,500.00		
				2	16	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	16	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	17,700,000.00	33.90 persen	6,000,000.00		
				2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	79,920,000.00	59.67 persen	47,685,600.00		
				2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100 persen	124,127,520.00	98.61 persen	122,408,000.00		
				2	16	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	135,770,000.00	82.38 persen	111,850,000.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	56,270,000.00	61.31 persen	34,498,000.00			
				2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
				2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
				2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Keluaran/Output : Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan perencanaan media komunikasi publik	100 persen	60,760,000.00	69.54 persen	42,250,000.00			
				2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Pengelolaan media Komunikasi Komunikasi Publik	100 persen	910,365,000.00	89.31 persen	813,051,000.00			
				2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100 persen	306,486,788.00	51.49 persen	157,799,120.00			
				2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Keluaran/Output : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pers; Tersedianya Layanan Media	100 persen	730,000,000.00	99.87 persen	729,050,000.00			
				2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Keluaran/Output : Jumlah dokumen Kemitraan dengan pemangku kepentingan	100 persen	96,273,466.00	33.91 persen	32,647,666.00			
				2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								
				2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
				2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	28,143,606.00	94.93 persen	26,715,460.00			
				2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 persen	789,777,140.00	62.52 persen	493,799,549.00			
				2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
				2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelolal	100 persen	429,570,000.00	95.72 persen	411,199,999.00			
				2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keluaran/Output : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	100 persen	762,981,360.00	99.01 persen	755,392,000.00			
				2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengembangan dan pengelblaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100 persen	173,009,654.00	11.67 persen	20,184,154.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BINJAI	1 Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kinerja pada sektor perdagangan, sektor industri dan sektor Jasa melalui pelaksanaan:
			2 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
			3 Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA								2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			4 Peningkatan keterampilan dan inovasi pelaku UMKM	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI KSP/USP KOPERASI
			5 Pengembangan produk unggulan UMKM dan kemitraan antar usaha	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen	2,916,882,893.00	91.69 persen	2,674,548,312.00			4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			6 Peningkatan keahlian pengelola koperasi dan lembaga pembiayaan mikro	2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	100 persen	109,200,000.00	100 persen	109,200,000.00			5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								6 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 paket	6,005,760.00	4 paket	6,002,100.00			
				2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya bahan logistik kantor (ATK ; makan minum kantor)	12 paket	23,314,317.00	12 paket	23,251,397.00			
				2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 paket	12,184,200.00	12 paket	11,318,340.00			
				2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	5,342,400.00	12 dokumen	5,310,500.00			
				2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 dokumen	59,272,000.00	72 dokumen	59,176,652.00			
				2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 laporan	4,000,000.00	12 laporan	4,000,000.00			
				2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik	100 persen	51,250,000.00	79.97 persen	40,984,993.00			
				2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor (alat/bahan kebersihan, honorarium Non PNS, BPJS Ketenagakerjaan Non PNS)	24 laporan	95,271,960.00	24 laporan	92,180,428.00			
				2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100 persen	53,220,000.00	94.66 persen	50,376,000.00			
				2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 persen	15,560,000.00	92.31 persen	14,362,860.00			
				2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
				2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota								
				2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan	40 unit usaha	59,997,860.00	40 unit usaha	58,992,100.00			
				2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USH MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
				2	17	07	2.01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan								
				2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan	100 persen	288,250,000.00	78.47 persen	226,205,000.00			
				2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan	50 unit usaha	12,250,180.00	0	-			
				2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan	120 unit usaha	369,369,710.00	120 unit usaha	360,946,870.00			
				2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan	100 persen	199,273,440.00	75.17 persen	149,795,200.00			
				2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
				2	17	08	2.01		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil								
				2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Keluaran/Output : Terlaksananya kegiatan; Terlaksananya pemberian alat bantu usaha bagi pelaku UMKM	100 persen	1,208,653,152.00	97.84 persen	1,182,582,760.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			3 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran/Output : tersusunnya dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	3,864,000.00	1 dokumen	3,864,000.00			4 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : tersedianya gaji dan tunjangan yang dibayarkan	100 persen	3,229,985,570.00	91.15 persen	2,944,271,628.00			
				2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya koordinasi akuntansi OPD	100 persen	149,319,200.00	98.08 persen	146,460,000.00			
				2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5,361,300.00	1 paket	5,361,300.00			
				2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Terselenggaranya bahan logistik kantor	2 paket	100,112,700.00	2 paket	99,969,000.00			
				2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Tersediaanya bahan cetak dan penggandaan	1 paket	59,391,840.00	1 paket	58,784,440.00			
				2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Tersedianya surat kabar/bahan bacaan yang tersedia	100 persen	33,390,000.00	47.14 persen	15,740,000.00			
				2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Tersedianya makan minum tamu	100 persen	12,990,240.00	97.78 persen	12,702,240.00			
				2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Terkoordinasi dan lancarnya perjalanan dinas luar daerah	100 persen	20,798,000.00	82.48 persen	17,155,000.00			
				2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	92,983,000.00	83.21 persen	77,368,673.00			
				2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor	100 persen	222,844,000.00	98.44 persen	219,361,359.00			
				2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah kendarat perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 persen	33,470,000.00	96.46 persen	32,286,600.00			
				2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan	100 persen	76,970,000.00	75.83 persen	58,368,500.00			
				2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : pemelihara peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	100 persen	26,500,000.00	99.91 persen	26,475,000.00			
				2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : sarana dan prasarana yang terpelihara	100 persen	9,150,000.00	99.67 persen	9,120,000.00			
				2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
				2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				2	18	05	2.01	01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran/Output : jumlah pemantauan							
				2	18	05	2.01	02	Kordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran/Output : Jumlah pembinaan	100 persen	270,926,400.00	98.11 persen	265,821,000.00			
				2	18	05	2.01	03	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran/Output : jumlah pengawasan	100 persen	52,473,600.00	0	-			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			3 Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN
				2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang Yang Menenima Gaji dan Tujangan yang dibayarkan	100 persen	4,944,774,098.00	82.17 persen	4,063,039,740.00			
				2	19	01	2.02	04	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	513,320,000.00	12 dokumen	505,340,224.00			
				2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	9,952,440.00	1 paket	9,916,440.00			
				2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	49,986,000.00	1 paket	49,973,400.00			
				2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	20,526,660.00	1 paket	20,525,400.00			
				2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	100 persen	14,691,600.00	77.15 persen	11,335,000.00			
				2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	98,370,000.00	12 laporan	94,023,974.00			
				2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7,500,000.00	1 laporan	7,500,000.00			
				2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	264,999,382.00	1 laporan	253,008,643.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	11,982,060.00	1 laporan	11,935,560.00			
				2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48,360,000.00	1 unit	47,260,027.00			
				2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	46,220,000.00	2 unit	38,546,270.00			
				2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	112,776,695.00	63.64 persen	71,772,800.00			
				2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
				2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
				2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Keluaran/Output : Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	350 orang	62,875,700.00	350 orang	62,875,700.00			
				2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Keluaran/Output : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	368 orang	999,562,861.00	368 orang	990,074,581.00			
				2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Keluaran/Output : Jumlah Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	15 orang	162,365,900.00	15 orang	161,585,548.00			
				2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
				2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100 persen	395,832,070.00	61.28 persen	242,560,850.00			
				2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
				2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	100 persen	554,752,460.00	94.68 persen	525,232,460.00			
				2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0				
				2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Keluaran/Output : jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	2 dokumen	1,150,000,000.00	2 dokumen	1,150,000,000.00			
				2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
				2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Festival	100 persen	195,410,860.00	88.17 persen	172,302,860.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
				2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
				2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	16,860,000.00	0	-			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI		2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Keluaran/Output : Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	40 orang	16,454,200.00	0	-			
			1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
				2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI		2	20	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	-			
				2	20	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0	-			
			1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya lokal	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI		2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								3 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
				2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 laporan	118,488,068.00	1 laporan	114,952,408.00			
				2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
				2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Keluaran/Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 persen	150,000,000.00	100 persen	150,000,000.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	2,317,510,776.00	95.17 persen	2,205,554,832.00			
				2	23	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	95,200,632.00	95.48 persen	90,900,000.00			
				2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	5,186,200.00	57.05 persen	2,959,000.00			
				2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,330,000.00	1 paket	12,330,000.00			
				2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	37,147,885.00	87.14 persen	32,372,100.00			
				2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16,956,360.00	1 paket	15,216,000.00			
				2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	8,013,600.00	55.72 persen	4,465,000.00			
				2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 dokumen	130,106,000.00	15 dokumen	127,981,581.00			
				2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 dokumen	7,133,915.00	0	-			
				2	23	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 dokumen	3,000,000.00	0	-			
				2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1,000,000.00	12 laporan	1,000,000.00			
				2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	74,354,700.00	91.52 persen	68,048,021.00			
				2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	110,139,979.00	12 laporan	101,745,299.00			
				2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	100,890,000.00	67.19 persen	67,784,214.00			
				2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	20,060,000.00	61.09 persen	12,255,000.00			
				2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
				2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Keluaran/Output : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	100 persen	20,845,445.00	20.72 persen	4,320,000.00			
				2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Keluaran/Output : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 persen	10,540,800.00	61.47 persen	6,480,000.00			
				2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	43 perpustakaa n	23,400,000.00	43 perpustakaa n	23,400,000.00			
				2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Keluaran/Output : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2000 eksemplar	55,455,000.00	2000 eksemplar	52,404,425.00			
				2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Keluaran/Output : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 eksemplar	1,879,050.00	2000 eksemplar	1,820,000.00			
				2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 persen	195,012,228.00	77.13 persen	150,422,000.00			
				2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Keluaran/Output : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 persen	39,590,180.00	73.99 persen	29,294,340.00			
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DINAS PERPUSTAKAAN KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			3 Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								2 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
				2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
				2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Keluaran/Output : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3000 berkas	25,464,030.00	3000 berkas	24,489,900.00			
				2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
				2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Keluaran/Output : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3000 arsip	62,087,424.00	3000 arsip	60,672,000.00			
				2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								
				2	24	04	2.01		Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota								
				2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Keluaran/Output : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	5,848,812.00	1 SOP	5,814,300.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	1 Peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaku UMKM	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Pengembangan produk unggulan UMKM kemitraan antar usaha	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
				3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Keluaran/Output : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pembudidaya dan produksi ikan air tawar	10 kelompok	128,427,090.00	10 kelompok	126,330,000.00			
				3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Keluaran/Output : meningkatnya SDM pelaku perikanan	100 persen	47,386,806.00	81.06 persen	38,413,000.00			
			3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
			3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Menghasilkan benih yang berkualitas dan yang terjamin keamanan di BBI	100 persen	262,254,023.00	84.80 persen	222,387,841.00				
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan dan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	2,770,586,351.00	94.81 persen	2,626,803,110.00			
				3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 dokumen	167,550,000.00	24 dokumen	149,780,000.00			
				3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	3,285,500.00	12 paket	2,602,200.00			
				3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	86,538,716.00	10 paket	85,678,116.00			
				3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 paket	6,505,888.00	50 paket	6,371,508.00			
				3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	4,006,800.00	77.87 persen	3,120,000.00			
				3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	71,256,000.00	56.28 persen	40,104,379.00			
				3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4,600,000.00	12 laporan	4,600,000.00			
				3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	30,378,050.00	80.08 persen	24,326,437.00			
				3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	107,506,921.00	12 laporan	107,506,921.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	150,210,000.00	67.75 persen	101,773,832.00			
				3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	5,520,000.00	100 persen	5,520,000.00			
				3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	25,000,000.00	100 persen	25,000,000.00			
				3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
				3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
				3	26	03	2.01	01	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
				3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dokumen	29,629,530.00	6 dokumen	29,629,530.00			
				3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dokumen	123,899,000.00	6 dokumen	123,899,000.00			
				3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
				3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
				3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 persen	56,192,493.00	98.815 persen	55,526,493.00			
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI	1 Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								Menjamin ketersediaan pupuk dimasyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan:
			2 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Keluaran/Output : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100 persen	48,871,172.00	79.39 persen	38,800,000.00			4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
				3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Keluaran/Output : Agro Wisata; Jasa konsultan untuk Rehab kebun pohon induk hortikultura dan buah-buahan; Pemeliharaan dan perawatan sumber Perbenihan dan mata tempel di BPMT dan kebun induk hortikultura dan buah-buahan; Pengadaan Sumur Bor; Penyediaan bibit berlabel hortikultura yang bermutu baik	100 persen	62,003,406.00	81.09 persen	50,280,000.00			
				3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
				3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Bebasnya hewan pembawa rabies yang dipelihara masyarakat Kota Binjai dari penyakit	100 persen	35,951,472.00	74.90 persen	26,926,500.00			
				3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								
				3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Keluaran/Output : Masyarakat terhindar dari bahaya penyakit yang bersumber dari hewan	100 persen	73,964,538.00	89.90 persen	66,495,800.00			
				3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan								
				3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Keluaran/Output : Pengetahuan dalam pengolahan bahan pangan asal hewan yang meningkat	1 laporan	54,826,146.00	1 laporan	44,755,200.00			
				3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
				3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
				3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Keluaran/Output : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Binjai terlaksana	100 persen	137,737,316.00	62.07 persen	85,492,320.00			
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	1 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								Meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjalankan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan:
				3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								2 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								3 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Keluaran/Output : Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pasar perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	6 dokumen	1,048,900,000.00	3 dokumen	222,529,703.00			4 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang								
				3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Keluaran/Output : Jumlah dokumen tanda daftar gudang	20 dokumen	8,924,000.00	0	-			
				3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
				3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Keluaran/Output : Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 unit	1,052,387,354.00	7 unit	990,323,981.00			
				3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								
				3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12 dokumen	394,770,000.00	12 dokumen	355,759,753.00			
				3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
				3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
				3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Keluaran/Output : Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	100 persen	11,704,520.00	39.39 persen	4,610,000.00			
				3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
				3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 laporan	30,749,100.00	12 laporan	27,740,000.00			
				3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Keluaran/Output : Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan			0				
				3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	2 laporan	27,208,060.00	1 laporan	16,159,840.00			
				3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
				3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
				3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Keluaran/Output : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat perlengkapan ditera ulang	100 persen	84,405,600.00	23.17 persen	19,560,000.00			
				3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
				3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
				3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Pelaku UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	100 persen	352,418,800.00	66.95 persen	235,950,500.00			
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	1 Pengembangan Wirausaha industri berbasis komunitas	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								Menjalankan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan:
			2 Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Taman Teknologi Kota Binjai"	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			3 Membangun dan mengembangkan sentra industri dalam skala pelayanan lokal dan regional	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			4 Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya Sentra Industri Binjai	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri.	4 dokumen	75,507,000.00	4 dokumen	57,842,894.00			
				3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
				3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupate/Kota dalam penyampaian data ke SIINas	4 dokumen	12,300,000.00	0	-			
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	BAGIAN UMUM	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan dan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan :
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.UMUM)								1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	100 persen	11,862,115,868.00	90.10 persen	10,687,412,988.00			
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Koordinasi dan Akutansi SKPD yang terlaksana	1 dokumen	437,810,000.00	1 dokumen	364,823,168.00			
				4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran/Output : Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	15 paket	287,000,000.00	15 paket	287,000,000.00			
				4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang tersedia	40 orang	75,000,000.00	40 orang	75,000,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Komponen instalasai listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 paket	199,931,372.00	25 paket	198,746,300.00			
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Bahan logistik kantor yang tersedia	100 paket	406,052,550.00	100 paket	395,818,957.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Keluaran/Output : Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	25 paket	245,344,800.00	25 paket	242,274,850.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	120 dokumen	84,042,000.00	120 dokumen	83,995,000.00			
				4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 laporan	9,485,845,156.00	100 laporan	9,401,034,210.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	500 laporan	541,659,000.00	500 laporan	541,608,189.00			
				4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : kendaraan dinas jabatan yang tersedia	4 unit	707,900,000.00	4 unit	707,900,000.00			
				4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : mebel yang tersedia	50 unit	580,156,625.00	50 unit	575,973,385.00			
				4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	30 unit	159,119,400.00	30 unit	158,869,400.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	60 unit	1,214,819,319.00	60 unit	1,132,687,975.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : jasa surat menyurat yang tersedia	35 laporan	30,000,000.00	35 laporan	23,000,000.00			
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 laporan	1,849,820,864.00	36 laporan	1,710,181,536.00			
				4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	120 laporan	5,112,963,141.00	120 laporan	4,810,993,303.00			
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	150 laporan	3,984,344,314.00	150 laporan	3,965,042,327.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang tersedia	12 unit	1,242,200,000.00	12 unit	853,392,398.00			
				4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang tersedia	240 unit	2,164,840,000.00	240 unit	1,898,812,582.00			
				4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Keluaran/Output : mebel yang terpelihara	100 unit	120,000,000.00	100 unit	83,716,000.00			
				4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	50 unit	4,830,837,589.00	50 unit	4,717,471,981.00			
				4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : kondisi fisik prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihra dengan baik	20 unit	195,000,000.00	20 unit	194,588,500.00			
				4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : kondisi fisik prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihra dengan baik	200 unit	781,560,000.00	200 unit	714,944,553.00			
				4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
				4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keluaran/Output : Gaji dan tunjangan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	2 orang/bulan	769,986,103.00	2 orang/bulan	766,455,490.00			
				4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keluaran/Output : Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	10 paket	643,000,000.00	10 paket	643,000,000.00			
				4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
				4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Keluaran/Output : Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang tersedia	50 paket	667,738,190.00	50 paket	654,275,500.00			
				4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Keluaran/Output : Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	40 paket	374,215,820.00	40 paket	363,985,000.00			
		BAGIAN HUKUM		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.HUKUM)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : TPP dan Tunjangan BPJS yang tersedia							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Laporan keuangan dan aset yang tersedia	1 dokumen	95,640,000.00	1 dokumen	95,640,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : ATK dan logistik yang tersedia	100 persen	45,717,120.00	65.49 persen	29,938,320.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100 persen	32,134,740.00	83.88 persen	26,954,460.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Bahan bacaan yang tersedia	100 persen	7,345,800.00	83.04 persen	6,100,000.00			
				4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Makan minum tamu yang tersedia	100 persen	4,608,000.00	40.48 persen	1,865,400.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Biaya Perjalanan Dinas yang tersedia	100 persen	82,010,000.00	59.38 persen	48,699,409.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jasa surat menyurat yang tersedia	100 persen	21,470,000.00	80.01 persen	17,178,260.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Kendaraan Dinas yang terawat	100 persen	75,114,200.00	82.72 persen	62,134,788.00			
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Peralatan kantor yang terpelihara	100 persen	4,260,000.00	51.17 persen	2,180,000.00			
				4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	1,220,000.00	45.08 persen	550,000.00			
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
				4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Keluaran/Output : Produk Hukum yang terfasilitasi	833 dokumen	162,534,000.00	833 dokumen	157,400,000.00			
				4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Keluaran/Output : Kasus yang terselesaikan dan ham yang dilaksanakan	100 persen	183,954,000.00	41.36 persen	76,085,110.00			
				4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Keluaran/Output : Produk hukum yang terdokumentasi	835 dokumen	163,982,640.00	835 dokumen	160,112,990.00			
		BAGIAN PEMERINTAHAN		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG. PEMERINTAHAN)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jasa Administrasi Pengelola Keuangan	100 persen	99,358,200.00	95.96 persen	95,343,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Peralatan Kantor; Perlengkapan Kantor	100 persen	14,400,000.00	0	-			
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Alat Tulis Kantor; Makanan dan Minuman Harian Pegawai	100 persen	21,514,080.00	100 persen	21,514,080.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Cetakan dan Fotocopy	100 persen	38,268,600.00	58.01 persen	22,200,000.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	100 persen	1,780,800.00	96.58 persen	1,720,000.00			
				4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Makanan dan Minuman Tamu	100 persen	30,007,920.00	35.19 persen	10,559,040.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Laporan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100 persen	149,584,000.00	98.45 persen	147,267,770.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Alat Benda Pos	100 persen	8,000,000.00	48.75 persen	3,900,000.00			
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Fasilitas Telepon, Air dan Listrik	100 persen	7,080,000.00	48.81 persen	3,455,760.00			
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Gaji Honoror dan BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	100 persen	102,060,000.00	100 persen	102,060,000.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	48,720,000.00	82.62 persen	40,254,112.00			
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Terjaganya Peralatan Gedung Kantor	100 persen	25,940,000.00	36.24 persen	9,400,000.00			
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								
				4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Keluaran/Output : Pemenang dan Laporan	100 persen	239,455,560.00	94.07 persen	225,255,190.00			
				4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Keluaran/Output : Laporan	100 persen	345,848,500.00	99.15 persen	342,918,500.00			
				4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Keluaran/Output : Laporan dan Hari Peringatan	100 persen	163,481,800.00	92.08 persen	150,541,010.00			
				4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah								
				4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Keluaran/Output : Terlaksananya Evaluasi	100 persen	65,138,400.00	81.58 persen	53,138,400.00			
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.PEMBANGUNAN)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	42,240,000.00	12 dokumen	40,560,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	1,656,000.00	45.89 persen	760,000.00			
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Terlaksananya Administrasi Perkantoran; Terlaksananya Makanan dan Minuman	12 paket	18,226,920.00	12 paket	18,201,120.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan; Terlaksana Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	6,862,200.00	12 paket	6,862,200.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	12,020,400.00	50.93 persen	6,121,500.00			
				4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output :Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	3,600,000.00	12 laporan	3,600,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	64,727,000.00	40.96 persen	26,509,700.00			
				4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	100 persen	4,800,000.00	98.44 persen	4,725,000.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1,500,000.00	12 laporan	1,500,000.00			
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	68,460,000.00	12 laporan	68,460,000.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	46,371,600.00	84.57 persen	39,217,940.00			
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	20,040,000.00	54.94 persen	11,010,000.00			
				4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 persen	4,880,000.00	93.65 persen	4,570,000.00			
				4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
				4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
				4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	40,800,000.00	12 laporan	36,800,000.00			
		BAGIAN ORGANISASI		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.ORGANISASI)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : penyediaan jasa administrasi keuangan yang terlaksana	3 dokumen	67,420,000.00	3 dokumen	65,620,000.00			
				4	01	01	2.06		Aministrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : penyediaan peralatan dan perlengkapan yang tersedia							
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : penyediaan logistik kantor yang tersedia	1 paket	13,626,120.00	1 paket	13,626,120.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terlaksana	1 paket	17,155,440.00	1 paket	17,155,440.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : <i>penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana</i>	5 laporan	4,723,200.00	5 laporan	4,723,200.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : <i>peningkatan koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah yang terlaksana</i>	5 laporan	98,382,000.00	5 laporan	93,021,500.00			
				4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	100 persen	2,352,000.00	100 persen	2,352,000.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : <i>penyediaan jasa surat menyurat di Bagian Organisasi yang terealisasi</i>	1 laporan	29,340,000.00	1 laporan	29,340,000.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : <i>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional gedung akntor yang terlaksana</i>	2 unit	55,346,000.00	2 unit	50,553,000.00			
				4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : <i>pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan gedung kantor yang terlaksana</i>	1 unit	2,440,000.00	1 unit	2,440,000.00			
				4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								
				4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Keluaran/Output : <i>sistem penataan Perangkat Daerah Terkelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Jabatan dan ABK terlaksana</i>	1 dokumen	19,885,440.00	1 dokumen	17,135,440.00			
				4	01	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Keluaran/Output : <i>sistem Pelayanan Publik Meningkat</i>	1 laporan	30,198,000.00	1 laporan	26,948,000.00			
				4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Keluaran/Output : <i>Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi birokrasi terlaksana dengan baik</i>	1 dokumen	76,602,100.00	1 dokumen	73,852,100.00			
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : <i>Penyediaan tunjangan ASN yang terpenuhi</i>							
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : <i>Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD</i>	1 dokumen	65,400,000.00	1 dokumen	65,400,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : <i>Alat tulis kantor dan ketersediaan makan minum rapat pegawai</i>	1 paket	72,518,375.00	1 paket	72,215,375.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran/Output : <i>barang cetakan dan penggandaan dokumen terlaksana</i>	1 paket	11,509,200.00	1 paket	11,509,200.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : <i>Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan untuk ASN yang terpenuhi</i>	100 persen	18,273,600.00	73.14 persen	13,365,000.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : <i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	100 persen	71,064,000.00	6.09 persen	4,330,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jasa surat menyurat terlaksana	2 laporan	6,000,000.00	2 laporan	6,000,000.00			
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yg tersedia	100 persen	16,200,000.00	61.60 persen	9,979,160.00			
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Kantor yang bersih dan nyaman, gaji tenaga honorer	1 laporan	160,927,680.00	1 laporan	160,127,680.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 persen	41,196,000.00	94.32 persen	38,854,500.00			
				4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Servis kendaraan dinas terlaksana							
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor terlaksana	100 persen	22,100,000.00	98.96 persen	21,870,000.00			
				4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor terlaksana	100 persen	12,200,000.00	100 persen	12,200,000.00			
				4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
				4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
				4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Keluaran/Output : Peningkatan kinerja BUMD Kota Binjai	1 dokumen	62,523,549.00	1 dokumen	62,423,549.00			
				4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Keluaran/Output : Terlaksananya TPID yg mengawasi kestabilan harga dan Satgas Pangan yang mengawasi ketersediaan pangan di Kota Binjai	2 laporan	178,928,280.00	2 laporan	175,234,193.00			
				4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Keluaran/Output : Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4 dokumen	815,937,034.00	4 dokumen	808,651,616.00			
				4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Keluaran/Output : Proses penetapan Perda BUMD	100 persen	94,627,775.00	48.89 persen	46,260,375.00			
		BAGIAN KESEJAHTERAAN		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Keuangan	1 dokumen	89,570,000.00	1 dokumen	80,540,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 persen	34,066,950.00	72.18 persen	24,589,590.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 persen	4,344,000.00	100 persen	4,344,000.00			
				4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	10,684,800.00	100 persen	10,684,800.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : jumlah laporan rapat koordinasi da konsultasi SKPD	100 persen	35,244,000.00	51.78 persen	18,250,000.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 persen	900,000.00	100 persen	900,000.00			
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 persen	5,994,000.00	56.06 persen	3,359,979.00			
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 persen	93,646,020.00	88.84 persen	83,196,985.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	40,870,000.00	93.06 persen	38,033,500.00			
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaara	100 persen	2,840,000.00	100 persen	2,840,000.00			
				4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 persen	2,440,000.00	100 persen	2,440,000.00			
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
				4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
				4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 persen	3,080,963,216.00	87.41 persen	2,693,043,073.00			
				4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100 persen	7,154,140,380.00	82.42 persen	5,896,818,275.00			
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.PENGADAAN BARANG DAN JASA)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Gaji dan TPP ASN			0				
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Administrasi Keuangan SKPD tersedia	12 dokumen	87,480,000.00	12 dokumen	78,390,000.00			
				4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Dokumen Laporan Keuangan			0				
				4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran/Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	15,800,000.00	93.61 persen	14,790,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 persen	54,008,000.00	77.77 persen	42,000,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : komponen instalasi listrik tersedia	100 persen	5,533,142.00	76.52 persen	4,234,000.00			
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Logistik kantor tersedia	100 persen	22,985,600.00	98.20 persen	22,571,450.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100 persen	9,546,800.00	52.92 persen	5,051,900.00			
				4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	20,835,200.00	82.36 persen	17,159,500.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	100 persen	56,930,000.00	95.18 persen	54,184,318.00			
				4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : jumlah peralatan gedung kantor	100 persen	18,750,000.00	100 persen	18,750,000.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : biaya rekening listrik, air, telepon dan internet	100 persen	186,231,199.00	95.70 persen	178,229,998.00			
				4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : jasa pelayanan umum yang baik	100 persen	70,460,000.00	85.57 persen	60,290,155.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 persen	20,389,590.00	100 persen	20,389,590.00			
				4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	15,020,000.00	57.12 persen	8,580,000.00			
				4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
				4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
				4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Keluaran/Output : 80 paket pelelangan	100 persen	110,006,400.00	99.94 persen	109,941,000.00			
				4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Keluaran/Output : Bimtek SIRUP	100 persen	109,995,600.00	95.17 persen	104,682,000.00			
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	01				SEKRETARIAT DAERAH (BAG.PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH)								
				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0				
				4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	174,240,000.00	1 dokumen	155,565,270.00			
				4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran/Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	159,312,000.00	94.51 persen	150,570,000.00			
				4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 persen	406,773,480.00	81.84 persen	332,900,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 persen	154,299,345.00	95.29 persen	147,027,750.00			
				4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 persen	322,217,850.00	96.87 persen	312,126,000.00			
				4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tercapai	100 persen	1,865,099,000.00	98.91 persen	1,844,748,232.00			
				4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100 persen	30,674,280.00	54.75 persen	16,793,636.00			
				4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 persen	171,998,400.00	97.10 persen	167,006,020.00			
				4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
				4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 persen	316,800,000.00	89.27 persen	282,800,000.00			
				4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Keluaran/Output : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Daerah yang terpenuhi	100 persen	54,240,000.00	100 persen	54,240,000.00			
				4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Keluaran/Output : Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terpublikasi	100 persen	201,885,390.00	99.53 persen	200,940,000.00			
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	SEKRETARIAT DPRD KOTA BINJAI	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
				4	02				SEKRETARIAT DPRD								
				4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	3,357,497,942.00	96.22 persen	3,230,464,171.00			
				4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	202,720,000.00	70.99 persen	143,920,000.00			
				4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	145,366,000.00	1 laporan	135,946,238.00			
				4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1,082,161,719.00	1 paket	1,063,701,719.00			
				4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 paket	24,120,000.00	1 paket	19,220,000.00			
				4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 paket	1,505,679,800.00	1 paket	1,228,545,600.00			
				4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	313,386,000.00	1 paket	309,668,100.00			
				4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Keluaran/Output : Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket	34,637,200.00	1 paket	34,637,200.00			
				4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	2,690,559,000.00	20 unit	2,566,743,186.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,000,000.00	0	-			
				4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	332,397,000.00	77.33 persen	257,033,952.00			
				4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	638,208,000.00	1 laporan	601,776,288.00			
				4	02	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah								
				4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 persen	219,320,000.00	82.93 persen	181,888,430.00			
				4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen	45,800,000.00	99.65 persen	45,640,000.00			
				4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 persen	14,500,000.00	22.93 persen	3,325,000.00			
				4	02	01	2.15		Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
				4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Keluaran/Output : Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100 persen	15,140,274,050.00	88.19 persen	13,352,338,329.00			
				4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Keluaran/Output : Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 persen	104,400,000.00	99.71 persen	104,100,000.00			
				4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
				4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								
				4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Keluaran/Output : Jumlah Naskah Akademik	100 persen	202,420,000.00	98.27 persen	198,920,000.00			
				4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								
				4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Keluaran/Output : Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	100 persen	753,630,000.00	99.86 persen	752,558,000.00			
				4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Keluaran/Output : Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100 persen	242,976,000.00	99.17 persen	240,969,040.00			
				4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Keluaran/Output : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Komisi	100 persen	242,976,000.00	98.77 persen	240,000,000.00			
				4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
				4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Keluaran/Output : Jumlah Pelaksanaan Reses	100 persen	861,100,000.00	99.42 persen	856,130,000.00			
				4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								
				4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Keluaran/Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 persen	24,000,000,000.00	99.98 persen	23,996,451,709.00			
				4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Keluaran/Output : Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100 persen	1,000,000,000.00	99.95 persen	999,485,616.00			
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
			2 Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas	5	01				PERENCANAAN								
				5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran/Output : Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 yang Tersusun	2 dokumen	18,379,200.00	0	-			
				5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,326,600.00	1 laporan	9,801,600.00			
				5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	4,052,804,175.00	98.19 persen	3,979,561,468.00			
				5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Administrasi Keuangan yang terbayar; Kegiatan SPIP dan SSH yang terbayar	60 dokumen	116,820,000.00	60 dokumen	115,460,000.00			
				5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran/Output : Laporan Keuangan yang Tersusun	1 laporan	4,732,800.00	1 laporan	4,717,800.00			
				5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Keluaran/Output : SPIP dan PPID yang terlaksana	41 dokumen	14,022,600.00	41 dokumen	14,022,600.00			
				5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran/Output : Anjab, ABK yang tersusun	41 dokumen	7,209,000.00	41 dokumen	7,209,000.00			
				5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 persen	16,202,200.00	50.78 persen	8,227,200.00			
				5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Makan minum dan Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 paket	163,678,080.00	12 paket	155,377,489.00			
				5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 paket	90,858,520.00	12 paket	88,451,390.00			
				5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Tersedia	100 persen	22,950,000.00	61.22 persen	14,050,000.00			
				5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Makan minum tamu yag tersedia	100 persen	66,280,200.00	49.90 persen	33,075,000.00			
				5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang terlaksana	100 persen	552,819,000.00	91.06 persen	503,392,586.00			
				5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jasa Surat menyurat yang tersedia	100 persen	1,000,000.00	100 persen	1,000,000.00			
				5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jaringan Internet, air, listrik yang tersedia	100 persen	148,671,540.00	34.69 persen	51,571,518.00			
				5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Alat Kebersihan, Jasa Kebersihan dan Jasa pengamanan Kantoryang tersedia	100 persen	151,854,480.00	52.52 persen	79,761,295.00			
				5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	97,790,000.00	86.61 persen	84,694,909.00			
				5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara secara Rutin / Berkala	100 persen	74,850,000.00	100 persen	74,850,000.00			
				5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin	100 persen	19,120,000.00	89.34 persen	17,081,000.00			
				5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin	100 persen	54,900,000.00	99.82 persen	54,800,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
				5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
				5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 dokumen	207,578,400.00	5 dokumen	169,106,240.00			
				5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Keluaran/Output : Usulan Musrembang kelurahan dan kecamatan yang terkoordinasi	1 berita acara	36,413,800.00	1 berita acara	27,583,800.00			
				5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Keluaran/Output : Forum SKPD Terlaksana	1 berita acara	90,917,400.00	1 berita acara	60,617,400.00			
				5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Musrenbang Kota yang terlaksana	1 berita acara	177,358,000.00	1 berita acara	163,658,000.00			
				5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Keluaran/Output :Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500 usulan	5,374,200.00	500 usulan	5,374,200.00			
				5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Dokumen RKPD Tahun 2023 dan P RKPD Tahun 2022 yang Tersusun	4 dokumen	358,666,400.00	4 dokumen	320,412,680.00			
				5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
				5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran/Output : Apalikasi dan Informasi Pembangunan yang Update, dan ekspose yang tersedia; Aplikasi IPKD yang terupdate	2 laporan	143,427,800.00	2 laporan	112,347,000.00			
				5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
				5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : keterlaksanaan koordinasi	1 laporan	59,739,840.00	1 laporan	22,178,240.00			
				5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Keluaran/Output : Laporan Evaluasi yang tersusun	1 laporan	98,770,100.00	1 laporan	28,970,180.00			
				5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
				5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Keluaran/Output : Laporan Matriks 3 (SDGs) yang tersusun; Laporan Perlindungan Anak; Laporan PUG yang tersusun	2 laporan	223,620,880.00	2 laporan	207,120,940.00			
				5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
				5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Keluaran/Output : Terkoordinasinya Program program Pemerintah Bidang Ekonomi Kreatif, terselenggranya Forum Ekonomi	1 laporan	210,311,560.00	1 laporan	191,211,560.00			
				5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
				5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Keluaran/Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100 persen	44,536,960.00	29.25 persen	13,026,360.00			
				5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Keluaran/Output : Pokja PKP, Forum PKP serta laporan Koordinasi perumahan	100 persen	92,652,185.00	26.92 persen	24,940,760.00			
				5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Keluaran/Output : keterlaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi	100 persen	19,139,400.00	8.88 persen	1,700,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Membentuk panitia khusus dalam rangka meningkatkan PAD Kota Binjai; Penggunaan belanja pegawai dan belanja hibah harus lebih terukur; Meningkatkan PAD Kota Binjai melalui sektor Pajak dan Retribusi Daerah; Meningkatkan pengelolaan Aset-aset Pemko
			2 Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	5	02				KEUANGAN								1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	14,485,382,549.00	77.67 persen	11,250,781,490.00			
				5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	482,150,000.00	99.06 persen	477,610,000.00			
				5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	23,826,883.00	12 paket	21,203,000.00			
				5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	181,177,260.00	13 paket	178,402,000.00			
				5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	514,730,845.00	12 paket	453,940,029.00			
				5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	156,802,796.00	68.31 persen	107,112,300.00			
				5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	41,078,000.00	65.29 persen	26,822,000.00			
				5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	63,971,000.00	12 paket	63,450,149.00			
				5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	765,922,000.00	99.96 persen	765,608,400.00			
				5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 persen	156,013,000.00	88.59 persen	138,213,500.00			
				5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 persen	37,606,700.00	98.73 persen	37,130,000.00			
				5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 persen	12,438,338.00	97.52 persen	12,130,000.00			
				5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	248,950,000.00	12 laporan	201,862,674.00			
				5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	495,447,600.00	12 laporan	366,873,065.00			
				5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	259,783,661.00	12 laporan	224,393,611.00			
				5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	349,552,800.00	97.60 persen	341,179,078.00			
				5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	94,170,000.00	40 Unit	58,994,098.00			
				5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	202,337,000.00	1 Unit	199,671,854.00			
				5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	187,008,600.00	65.50 persen	122,483,800.00			
				5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
				5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
				5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	114,231,200.00	1 dokumen	109,577,000.00			
				5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	118,383,400.00	1 dokumen	105,070,000.00			
				5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Keluaran/Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	416,534,600.00	2 dokumen	401,482,896.00			
				5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Keluaran/Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	341,926,400.00	2 dokumen	257,845,350.00			
				5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
				5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	204,747,890.00	1 dokumen	181,755,000.00			
				5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 dokumen	132,084,600.00	1 dokumen	116,344,800.00			
				5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	1 dokumen	346,498,000.00	1 dokumen	341,228,400.00			
				5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	35,530,000.00	1 dokumen	22,400,800.00			
				5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 persen	84,985,000.00	69.73 persen	59,260,400.00			
				5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
				5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 laporan	133,671,600.00	1 laporan	94,306,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keluaran/Output : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	178,747,362.00	1 laporan	171,793,000.00			
				5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 persen	187,570,545.00	98.99 persen	185,684,800.00			
				5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
				5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	792,116,908.00	0	-			
				5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
				5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								
				5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Keluaran/Output : Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	100,730,107.00	1 dokumen	90,346,500.00			
				5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	41,495,470.00	1 laporan	40,492,750.00			
				5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	132,483,697.00	1 laporan	122,699,277.00			
				5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	60,898,398.00	1 dokumen	59,571,250.00			
				5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	159,718,999.00	1 laporan	157,982,450.00			
				5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 persen	84,359,998.00	68.54 persen	57,823,200.00			
				5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								
				5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	583,002,808.00	2 Laporan	576,953,000.00			
				5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	62 Unit	518,530,788.00	62 Unit	518,477,000.00			
				5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	282,639,731.00	2 Laporan	278,112,000.00			
				5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	668,231,200.00	2 Laporan	665,416,198.00			
				5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Keluaran/Output : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100 persen	585,984,183.00	95.53 persen	559,773,943.00			
				5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 persen	647,724,537.00	93.45 persen	605,285,820.00			
				5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Kegiatan	589,890,867.00	1 Kegiatan	563,691,700.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 persen	604,651,274.00	99.69 persen	602,777,502.00			
				5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	778,919,934.00	8 Dokumen	773,792,160.00			
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	1 Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Meningkatkan Kualitas SDM di Lingkungan Pemko Binjai (PNS) dan peningkatan disiplin PNS dan penempatan jabatan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki melalui
			2 Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja	5	03				KEPEGAWAIAN								1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			3 Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	3,492,019,677.00	35.6557797	3,112,767,108.00			
				5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	120,517,600.00	1 dokumen	119,657,600.00			
				5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	10,974,000.00	64.30 persen	7,056,000.00			
				5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	92,411,640.00	81.89 persen	75,679,400.00			
				5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	57,547,200.00	88.96 persen	51,196,600.00			
				5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	21,168,000.00	100 persen	21,168,000.00			
				5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 persen	4,110,000.00	0	-			
				5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	207,900,000.00	99.28 persen	206,411,533.00			
				5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 persen	193,301,080.00	90.47 persen	174,888,350.00			
				5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	5,820,000.00	57.37 persen	3,339,200.00			
				5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	216,461,276.00	84.35 persen	182,576,938.00			
				5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 persen	267,200,400.00	94.81 persen	253,340,268.00			
				5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 persen	82,990,000.00	59.08 persen	49,034,435.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	32,050,000.00	38.22 persen	12,250,000.00			
				5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	31,130,000.00	0	-			
				5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	32,810,000.00	71.08 persen	23,320,000.00			
				5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
				5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian Dan informasi kepegawaian ASN								
				5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 dokumen	98,760,000.00	1 dokumen	57,320,200.00			
				5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	44,266,400.00	1 dokumen	43,840,000.00			
				5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	93,740,000.00	1 dokumen	84,610,000.00			
				5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								
				5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	29,817,000.00	1 dokumen	23,705,000.00			
				5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								
				5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Keluaran/Output : Jumlah ASN Mengikuti Ujian Dinas; Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji PNS	100 persen	68,369,490.00	25.32 persen	17,313,200.00			
				5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 dokumen	204,160,000.00	1 dokumen	174,460,000.00			
				5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
				5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Keluaran/Output : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 persen	200,000,000.00	100 persen	200,000,000.00			
				5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 dokumen	28,565,800.00	1 dokumen	15,594,400.00			
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI	1 Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Meningkatkan Kualitas SDM di Lingkungan Pemko Binjai (PNS) dan peningkatan disiplin PNS dan penempatan jabatan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki melalui
			2 Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			3 Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
				5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								
				5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Keluaran/Output : Jumlah ASN Mengikuti Diklat Barang dan Jasa; Jumlah ASN Mengikuti Diklat Bendebara Barang; Jumlah ASN Mengikuti Diklat Bendebara Pengeluaran; Jumlah ASN Mengikuti Diklat Kelas Jabatan; Jumlah ASN Mengikuti Diklat SKP	100 persen	83,427,400.00	50.43 persen	42,076,100.00	50.43438966		
				5	04	02	2.01		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5	04	02	2.01	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Keluaran/Output : Jumlah ASN mengikuti Diklat PIM II; Jumlah ASN mengikuti Diklat PIM III; Jumlah ASN mengikuti Diklat PIM IV; Jumlah ASN Mengikuti LATSAR CPNS; Jumlah ASN mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Jumlah ASN mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	100 persen	274,648,040.00	50.73 persen	139,337,500.00	50.73311282		
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA KOTA BINJAI	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
			2 Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
				5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
				5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
				5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Keluaran/Output : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	100 persen	64,512,600.00	80.47 persen	51,915,240.00			
				5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian							
				5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100 persen	425,468,600.00	69.72 persen	296,650,200.00			
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT KOTA BINJAI	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
			2 Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	6	01				INSPEKTORAT DAERAH								
				6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA								
				6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Penyusunan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5,973,000.00	1 dokumen	5,973,000.00			
				6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 persen	7,870,920,057.00	95.94 persen	7,551,313,791.00			
				6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	196,790,400.00	12 dokumen	190,448,300.00			
				6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran/Output : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 persen	82,050,000.00	84.18 persen	69,071,000.00			
				6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran/Output : Tercakupnya Anggaran Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	16,450,000.00	86.93 persen	14,300,000.00			
				6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 persen	5,383,200.00	41.91 persen	2,256,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 persen	64,145,880.00	81.10 persen	52,022,000.00			
				6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 persen	70,155,200.00	77.05 persen	54,057,280.00			
				6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang disediakan	12 dokumen	12,243,000.00	12 dokumen	11,370,000.00			
				6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 persen	7,768,800.00	46.19 persen	3,588,600.00			
				6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen	140,454,000.00	99.90 persen	140,311,549.00			
				6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100 persen	75,231,410.00	85.95 persen	64,659,787.00			
				6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 persen	72,631,840.00	80.86 persen	58,728,880.00			
				6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 persen	57,471,000.00	58.62 persen	33,688,000.00			
				6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 persen	14,100,000.00	54.64 persen	7,705,000.00			
				6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 persen	16,650,000.00	47.87 persen	7,970,000.00			
				6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 persen	10,858,500.00	99.74 persen	10,830,000.00			
				6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
				6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
				6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja pemerintah daerah	100 persen	132,620,400.00	88.73 persen	117,672,400.00			
				6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan pengawasan Keuangan pemerintah daerah	100 persen	99,558,000.00	53.73 persen	53,490,000.00			
				6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Keluaran/Output : jumlah laporan pengawasan reviu laporan kinerja	100 persen	129,628,200.00	66.02 persen	85,578,200.00			
				6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Keluaran/Output : jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	100 persen	296,797,800.00	71.16 persen	211,206,800.00			
				6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Keluaran/Output : jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100 persen	151,797,000.00	41.52 persen	63,024,000.00			
				6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
				6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Keluaran/Output : jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	100 persen	49,966,800.00	1.63 persen	815,400.00			
				6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 persen	247,284,000.00	56.30 persen	139,213,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
				6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								
				6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Keluaran/Output : jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	100 persen	939,600.00	100 persen	939,600.00			
				6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								
				6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			0				
				6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keluaran/Output : jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	100 persen	154,220,400.00	78.98 persen	121,810,400.00			
				6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100 persen	258,007,800.00	94.73 persen	244,418,200.00			
				6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penegakan Integritas	100 persen	50,810,400.00	44.58 persen	22,649,400.00			
VII	Unsur Kewilayahan	KECAMATAN BINJAI UTARA	1 Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	7					UNSUR KEWILAYAHAN								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
				7	01				KECAMATAN								1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	6,507,801,527.00	60.0843265	6,015,644,177.00			
				7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPDealisasi	12 dokumen	152,272,800.00	12 dokumen	130,680,500.00			
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 persen	11,845,500.00	42.14 persen	4,992,000.00			
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 persen	106,419,600.00	20.48 persen	21,797,385.00			
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	42,045,300.00	45.37 persen	19,077,600.00			
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 persen	17,524,800.00	50.27 persen	8,810,000.00			
				7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 persen	22,195,200.00	40.55 persen	9,000,000.00			
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	7,762,000.00	97.01 persen	7,530,000.00			
				7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5,000,000.00	12 laporan	4,000,000.00			
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 persen	122,764,534.00	72.64 persen	89,178,455.00			
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	546,848,120.00	12 laporan	504,176,570.00			
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	33,470,000.00	99.99 persen	33,465,750.00			
				7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	133,840,000.00	48.15 persen	64,449,850.00			
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen	22,030,000.00	40.87 persen	9,003,500.00			
				7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 persen	7,320,000.00	52.05 persen	3,810,000.00			
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan								
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemenintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	932,160,000.00	99.46 persen	927,160,000.00			
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 persen	358,962,040.00	65.02 persen	233,400,000.00			
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran/Output :Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	220,489,760.00	91.74 persen	202,281,300.00			
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 persen	24,662,440.00	99.77 persen	24,605,000.00			
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 persen	20,000,000.00	0	-			
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	11,197,400.00	0	-			
		KECAMATAN BINJAI TIMUR		7					UNSUR KEWILAYAHAN								
				7	01				KECAMATAN								
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah ASN	100 persen	6,122,354,093.00	89.25 persen	5,464,089,776.00			
				7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran/Output : Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	50 dokumen	170,040,000.00	50 dokumen	170,040,000.00			
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	2,304,150.00	44.08 persen	1,015,700.00			
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah bahan logistik kantor	1 paket	103,238,000.00	1 paket	86,404,600.00			
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	19,874,520.00	1 paket	11,206,400.00			
				7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah kunjungan tamu	20 laporan	35,088,600.00	20 laporan	33,865,200.00			
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100 persen	19,940,000.00	32.75 persen	6,530,000.00			
				7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah kendaraan dinas operasional							
				7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : Mebeleur Kantor yang tersedia	100 persen	32,897,750.00	99.39 persen	32,697,750.00			
				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah jasa surat menyurat	1 laporan	3,560,000.00	1 laporan	1,680,000.00			
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet	12 laporan	50,407,270.00	12 laporan	40,748,764.00			
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	225,276,000.00	12 laporan	205,032,600.00			
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	100 persen	63,070,000.00	74.97 persen	47,283,793.00			
				7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	100 persen	85,740,000.00	77.59 persen	66,522,707.00			
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100 persen	5,600,000.00	34.38 persen	1,925,000.00			
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran/Output : Jumlah kepala lingkungan	1 dokumen	156,000,000.00	1 dokumen	156,000,000.00			
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran/Output : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 dokumen	113,098,000.00	1 dokumen	104,654,498.00	
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	180,002,258.00	1 laporan	180,002,258.00	
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah usulan Musrenbang	100 persen	20,074,800.00	100 persen	20,074,800.00	
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 persen	1,159,013,550.00	84.97 persen	984,852,301.00	
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0			
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	12 laporan	19,969,600.00	12 laporan	19,969,600.00	
		KECAMATAN BINJAI KOTA		7					UNSUR KEWILAYAHAN						
				7	01				KECAMATAN						
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Gaji dan tunjangan yang terpenuhi	100 persen	5,702,952,327.00	91.29 persen	5,206,016,992.00	
				7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : akuntansi SKPD terlaksana	2 dokumen	168,480,000.00	2 dokumen	165,280,000.00	
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : komponen alat listrik tersedia	100 persen	8,392,500.00	87.38 persen	7,333,325.00	
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : peralatan gedung kantor tersedia	100 persen	30,699,600.00	62.54 persen	19,200,200.00	
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : jasa logistik kantor tersedia	100 persen	44,115,634.00	39.25 persen	17,316,344.00	
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : barang cetakan dan penggandaan tersedia	100 persen	23,833,080.00	39.57 persen	9,429,750.00	
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : bahan bacaan tersedia	100 persen	5,342,400.00	30.14 persen	1,610,000.00	
				7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : fasilitasi kunjungan tamu tersedia	100 persen	9,886,800.00	97.46 persen	9,636,000.00	
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : rapat koordinasi dan konsultasi tersedia	100 persen	36,656,000.00	91.86 persen	33,671,930.00	
				7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Keluaran/Output : mebel tersedia	100 persen	20,550,200.00	61.07 persen	12,550,200.00	
				7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : meningkatnya pelayanan proses surat menyurat	100 persen	3,400,000.00	30.88 persen	1,050,000.00	
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : meningkatnya kinerja pelayanan	100 persen	63,241,000.00	64.50 persen	40,790,907.00	
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : jasa pelayanan umum kantor tersedia	100 persen	366,300,000.00	98.17 persen	359,607,138.00	
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : <i>perpanjangan pajak kendaraan dinas</i>	100 persen	171,310,000.00	60.04 persen	102,856,761.00			
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : <i>peralatan dan mesin lainnya terpelihara</i>	100 persen	26,180,000.00	25.94 persen	6,790,000.00			
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan								
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemenintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran/Output : <i>bantuan operasional kepala lingkungan tersedia</i>	12 laporan	61,200,000.00	12 laporan	61,200,000.00			
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran/Output : <i>penataan lingkungan, ruang terbuka hijau tersedia</i>	100 persen	52,409,670.00	80.66 persen	42,272,898.00			
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	174,851,160.00	1 laporan	169,497,500.00			
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluaran/Output : <i>bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat</i>	100 persen	1,035,397,850.00	70.82 persen	733,306,204.00			
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				7	01	03	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum								
				7	01	03	2.01	02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran/Output : <i>buka puasa bersama</i>							
		KECAMATAN BINJAI SELATAN		7					UNSUR KEWILAYAHAN								
				7	01				KECAMATAN								
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : <i>Dokumen Amprah Gaji</i>	100 persen	6,517,953,782.00	93.03 persen	6,063,695,083.00			
				7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : <i>Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD</i>	1 dokumen	120,240,000.00	1 dokumen	120,240,000.00			
				7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	71,760,000.00	1 laporan	71,760,000.00			
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : <i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100 persen	7,885,260.00	40.94 persen	3,228,000.00			
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : <i>Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	100 persen	24,667,740.00	2.17 persen	535,600.00			
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : <i>Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat</i>	100 persen	78,441,840.00	41.32 persen	32,410,794.00			
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Keluaran/Output : <i>Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan</i>	100 persen	45,063,600.00	23.99 persen	10,810,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Tersedianya Kebutuhan Bacaan	100 persen	10,017,000.00	29.65 persen	2,970,000.00			
				7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Kantor	100 persen	77,540,000.00	19.85 persen	15,395,400.00			
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	100 persen	34,050,000.00	42.52 persen	14,479,000.00			
				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah								
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Surat- Menyurat	100 persen	2,000,000.00	100 persen	2,000,000.00			
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet	100 persen	60,307,408.00	49.52 persen	29,864,016.00			
				7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Peralatan Kantor, Penunjang Kinerja di Luar Ruangan sebagai Penunjang Kinerja	100 persen	12,780,000.00	3.44 persen	440,000.00			
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100 persen	318,120,000.00	98.90 persen	314,628,376.00			
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 persen	100,304,800.00	38.36 persen	38,473,090.00			
				7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100 persen	43,062,000.00	71.58 persen	30,825,600.00			
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran/Output : Terlaksananya Operasional Kepala Lingkungan di Wilayah Kecamatan Binjai Selatan	1 dokumen	82,020,000.00	1 dokumen	73,200,000.00			
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran/Output : Tersedianya Biaya Penataan Lingkungan dan Pembersihan Drainase	1 dokumen	37,200,000.00	1 dokumen	37,200,000.00			
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	165,894,000.00	1 laporan	164,904,058.00			
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran/Output : Dokumen Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	100 persen	23,376,000.00	85.94 persen	20,089,600.00			
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluaran/Output : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berkelanjutan dan Sinergis	100 persen	1,191,025,592.00	87.14 persen	1,037,884,246.00			
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum								
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran/Output : Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan							
		KECAMATAN BINJAI BARAT		7					UNSUR KEWILAYAHAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01				KECAMATAN								
				7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	5,673,800,129.00	90.16 persen	5,115,512,343.00			
				7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 persen	140,280,000.00	100 persen	140,280,000.00			
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 persen	4,683,100.00	99.36 persen	4,652,900.00			
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 persen	25,932,000.00	99.75 persen	25,868,000.00			
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	100 persen	81,085,800.00	99.55 persen	80,718,531.00			
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 persen	18,341,220.00	90.67 persen	16,630,800.00			
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100 persen	6,372,000.00	99.73 persen	6,355,000.00			
				7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 persen	3,981,000.00	97.97 persen	3,900,000.00			
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	10,410,000.00	95.97 persen	9,990,000.00			
				7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah Pembayaran Jasa Surat Menyurat	100 persen	10,080,000.00	84.33	8,500,000.00			
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	66,354,600.00	91.88	60,964,990.00			
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 persen	235,161,360.00	98.96 persen	232,718,345.00			
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				7	01	01	2.10	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 persen	108,518,000.00	60.10 persen	65,214,225.00			
				7	01	01	2.11	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dina operasional atau lapangan dibayar	100 persen	66,940,000.00	60.37 persen	40,412,000.00			
				7	01	01	2.13	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 persen	10,670,000.00	100 persen	10,670,000.00			
				7	01	01	2.15	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 persen	7,930,000.00	100 persen	7,930,000.00			
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
				7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	51,600,000.00	100 persen	51,600,000.00			
				7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
				7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 persen	12,800,000.00	100 persen	12,800,000.00			
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
				7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	139,996,960.00	100 persen	139,992,520.00			
				7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
				7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 persen	6,705,600.00	20.04 persen	1,344,000.00			
				7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluaran/Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 persen	850,664,016.00	84.88 persen	722,006,572.00			
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum								
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 persen	4,050,000.00	100 persen	4,050,000.00			
VIII	Unsur Pemerintahan Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	1 Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								Pemerintah Kota Binjai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan :
			2 Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			3 Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
				8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran/Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	3,469,730,261.00	94.90 persen	3,292,960,676.00			4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
				8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran/Output : Jumlah Dokume Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	303,574,200.00	12 dokumen	303,572,848.00			5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
				8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100 persen	5,107,800.00	99.95 persen	5,105,100.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Paket Bahan LogistikKantor Yang DIsediakan	100 persen	60,715,440.00	99.98 persen	60,706,240.00			
				8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran/Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 persen	20,484,840.00	96.40 persen	19,746,720.00			
				8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	100 persen	16,254,000.00	97.45 persen	15,840,000.00			
				8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran/Output : Juumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100,984,000.00	99.97 persen	100,956,547.00			
				8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran/Output : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,800,000.00	12 laporan	2,800,000.00			
				8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	64,102,365.00	5 laporan	57,112,192.00			
				8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran/Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	39,999,600.00	12 laporan	39,982,883.00			
				8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran/Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 persen	62,154,000.00	84.88 persen	52,758,263.00			
				8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran/Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 persen	20,110,000.00	99.98 persen	20,107,000.00			
				8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
				8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan								
				8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 dokumen	87,302,570.00	1 dokumen	71,052,570.00			
				8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Keluaran/Output : Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 persen	539,230,898.00	94.49 persen	509,497,014.00			
				8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				8	01	03	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik								
				8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun			0				
				8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100 persen	10,576,291,480.00	99.97 persen	10,573,447,390.00			
				8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
				8	01	04	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan								
				8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Yang Disusun	100 persen	31,042,918.00	91.95 persen	28,542,800.00			
				8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
				8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya								
				8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 persen	235,101,820.00	92.34 persen	217,100,000.00			
				8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 persen	75,464,059.00	71.56 persen	54,000,000.00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan						Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
				8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial								
				8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Keluaran/Output : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	100 persen	145,426,200.00	88.98 persen	129,400,000.00			

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II
Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebijakan untuk menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas	PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas.
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERDAGANGAN	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	

LAMPIRAN II

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG LAYANAN KONSULTASI SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEMERINTAHAN DAERAH	

LAMPIRAN II

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BINJAI	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA	
	Kebijakan untuk penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.	PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024	
	Kebijakan untuk menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik	PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
	Kebijakan untuk membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai	PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA BINJAI	Mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing

LAMPIRAN II

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	
		PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN ANGGARAN 2023	
	Kebijakan untuk meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik
	Kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan	PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	Memberikan layanan bagi peserta didik

LAMPIRAN III

LAMPIRAN III

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, sehingga administrasi pegawai dapat terencana, terorganisasi, terarah dan terkendali dengan harapan tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.	Memperbaiki sistem perencanaan dan pengembangan pegawai sebagai upaya untuk menyaring dan memetakan pegawai yang akan dipromosikan sesuai dengan tingkat kompetensi dan kinerja pegawai	Penempatan ASN pada jabatan sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya secara objektif, adil dan wajar
2	Realisasi kegiatan pada pemerintah daerah melalui APBD Tahun 2022 tidak sesuai dengan realisasi anggaran, contohnya pembayaran pelaksanaan kegiatan belum terpenuhi 100 %. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah kota untuk tertib anggaran.	Penurunan penerimaan pendapatan mengakibatkan terhambatnya pembayaran atas kegiatan yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kontrak kerja. Penundaan pembayaran kepada pihak ketiga tersebut, diakui sebagai utang daerah yang menjadi kewajiban bersifat mengikat. Mekanisme penundaan pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan Mereview belanja tersebut untuk diakui sebagai utang daerah yang bersifat mengikat dan menganggarkan kembali utang daerah ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja berkenaan melalui pergeseran anggaran pada tahun anggaran 2023.	Meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
3	Pemerintah Kota Binjai untuk segera berbenah memperbaiki pelayanan publik pada setiap organisasi perangkat daerah, khusus yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena dilihat dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang telah dikeluarkan oleh OMBUDSMAN sebagai lembaga pengawas dalam pelayanan publik, Kota Binjai termasuk dalam zona merah bersama 5 kabupaten/kota lainnya di Sumut	Pemerintah Kota Binjai akan menindaklanjuti terkait penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dengan melakukan koordinasi kepada organisasi perangkat daerah dengan melakukan kegiatan penyusunan standar pelayanan publik dan memberikan penekanan kepada organisasi perangkat daerah untuk memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.	Peningkatan standar pelayanan publik Kota Binjai
4	Diharapkan untuk tahun 2023, angka harapan hidup di Kota Binjai dapat meningkat seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Binjai	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dan meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

LAMPIRAN III

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5	Pada bidang kesehatan, diminta agar pelayanan kepada masyarakat agar lebih diutamakan dan untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesehatan khususnya pada pengurangan maupun pencegahan peningkatan angka gizi buruk dan pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum agar lebih ditingkatkan.	a. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas layanan kesehatan di tempat pelayanan dan lingkungan masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		b. Menjaga ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu penggunaan obat guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	
6	Kegiatan sosial terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat belum menunjukkan keseimbangan sehingga dinas sosial harus lebih proposional dalam mendata masyarakat penerima bantuan	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat serta melakukan Update data terkait penerima bantuan sosial	Update data bagi masyarakat penerima bantuan secara by name by addres
7	Dalam proses maupun merealisasikan program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga dalam merealisasikan program harus memperhatikan kepentingan masyarakat	Memaksimalkan kinerja pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan di masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan dan sarana prasarana penunjang jalan
8	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah untuk perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan sehingga proyek terlaksana tapi keuangan/pembayaran tidak tersedia. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah Kota Binjai untuk menyelesaikan pembayaran tersebut sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tahun berikutnya.	Meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan prioritas untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan	Meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
9	Peningkatan PAD masih jauh dari angka yang ditargetkan pada tahun anggaran 2022, diminta kepada OPD terkait untuk dapat meningkatkan PAD dan Retibusi dari masing-masing OPD.	a. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi diantaranya melalui:	Optimalisasi Pajak dan retribusi daerah
		b. Pelaksanaan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang disesuaikan	
		c. Menyiapkan dan menyempurnakan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	
		d. Pemuktahiran data potensi dan data piutang pajak daerah	

LAMPIRAN III

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		e. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah	
10	Bagi OPD yang tidak hadir pada pembahasan pansus, agar menjadi perhatian bagi Wali Kota Binjai agar mereview kembali kinerja kepala OPD tersebut atau mengganti kepala OPD tersebut dengan yang lebih kompeten.	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah.	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan